KUNJUNGAN MR. JIANG ZUOJUN WAKIL KETUA MPR RRT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

EDISI NO.10/TH.XVII/OKTOBER 2023

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN MPR

MPR PERLU DIBERI KEWENANGAN Mengeluarkan Ketetapan

ISSN 0854-6371

20 **Nasional**
Keberadaan Pedagang Jamu Perlu Didukung Agar Tetap Eksis

32 **Kajian MPR**
Membahas Tradisi Baru di MPR

39 **Selingan**
Catatan Nyleneh di Galeri MURI

58 **Sosialisasi**
Ajak Mahasiswa Tampil Jadi Pimpinan Nasional

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

PANCASILA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

Daftar Isi

08 BERITA UTAMA

Memperkuat Kelembagaan MPR

Kewenangan MPR perlu diperkuat, di antaranya dengan kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat mengatur atau regeling. Untuk hal-hal yang strategis seperti PPHN, MPR perlu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Tap MPR. Juga jika terjadi kekosongan kekuasaan atau kedaruratan.

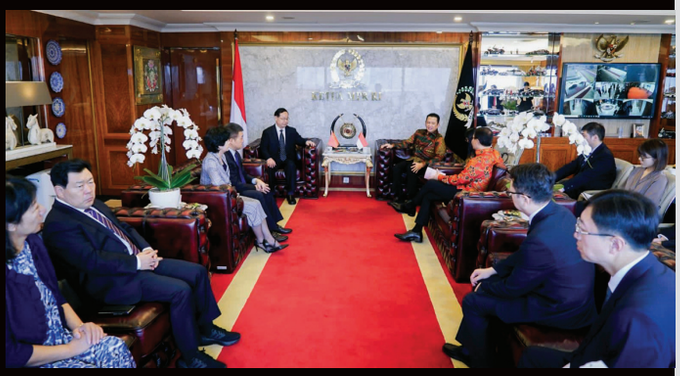

16 Nasional
Kunjungan Wakil Ketua MPR RRT Mr. Jiang Zuojun

58 Sosialisasi
Anggota MPR Ajak Mahasiswa Tampil Jadi Pemimpin Nasional

39 SELINGAN
Catatan Nyleneh di MURI

72 Wawancara
Intan Fauzi

Pengantar Redaksi 04
Perspektif 06
Kajian MPR 32
Kolom 36
Aspirasi Masyarakat 47
Gema Pancasila 48
Varia MPR 67
Figur 74
Ragam 76
Dari Rumah Kebangsaan 82
Rehal 84

COVER
Edisi No.10/TH.XVII/Oktober 2023
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Pengantar Redaksi

Kewenangan Subjektif Superlatif MPR

DALAM beberapa kesempatan, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan tentang kewenangan subjektif superlatif MPR. Apa maksudnya? Inilah kewenangan yang sebenarnya melekat pada lembaga MPR. Kewenangan yang diperoleh dari konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan subjektif superlatif tersebut terkait dengan pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Pasal itu berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Sesuai amanat Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 ini MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat pengaturan, guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun politik yang tidak dapat diantisipasi. Kewenangan subjektif superlatif yang dimaksud adalah kewenangan MPR untuk membuat atau mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar (*regeling*).

Seperti disebutkan di atas, kewenangan subjektif superlatif ini penting untuk menghadapi suatu keadaan kahar fiskal maupun politik. Misalnya, terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan (pemerintah atau eksekutif) dengan lembaga DPR (legislatif) atau kebuntuan politik pemerintah dan DPR dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (yudikatif). Lembaga mana yang bisa menengahi kebuntuan politik itu?

Contoh lain, jika terjadi bencana alam, peperangan, pemberontakan, pandemi, dan keadaan darurat negara, lalu pemilihan umum (Pemilu) yang seharusnya dilaksanakan sesuai jadwal tetapi harus ditunda karena *force majeure* seperti itu, bagaimana jalan keluar dari keadaan seperti itu?

Paling tepat adalah lembaga MPR, karena MPR merupakan representasi pemegang kedaulatan rakyat. Anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD merupakan representasi dari rakyat karena anggota DPR dan DPD dipilih langsung oleh rakyat. Dengan kewenangan subjektif superlative, yaitu kewenangan MPR untuk membuat atau mengeluarkan Ketetapan MPR, menjadi solusi manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan kedaruratan atau kegentingan yang memaksa.

Persoalannya, seiring perubahan (amandemen) UUD 1945, MPR saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa Tap MPR. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara sehingga MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa Tap MPR yang bersifat mengatur (*regeling*).

Karena itulah, perlu amandemen UUD NRI Tahun 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR membuat Tap yang bersifat mengatur. Amandemen UUD NRI yang dimaksud adalah amandemen yang sifatnya terbatas untuk keperluan adanya aturan-aturan konstitusional bila terjadi situasi kedaruratan yang disebabkan kebuntuan politik atau kondisi *force majeure* sehingga Pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu.

Namun, Pimpinan MPR telah sepakat tidak ada amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam waktu dekat dan amandemen bisa dilakukan setelah gelaran Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Alasannya, kalau amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan sebelum pemilu maka bisa muncul persepsi dan prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa amandemen UUD itu adalah cara untuk menghidupkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Plt. Jenedjri M. Gaffar
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Indro Gutomo
KOORDINATOR REPORTASE
Dhina Kurnia Winanda
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Yenita Revi, Try Syilvani, Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta , Alfonso DK Tahapary
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Faridz Rizky, Wira, Subhan
PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Anggun Permana, Achmad Farobi, Widya Permataningrum
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238, 57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

DIRGAHAYU TNI
5 OKTOBER 2023

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR RI
Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara
INDONESIA

Memurnikan Kedaulatan Rakyat Perkokoh Sistem Ketatanegaraan

POTENSI terjadinya kondisi darurat yang diakibatkan oleh kebuntuan konstitusi menjadi pertanda sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis belum cukup bijaksana, dan karenanya tidak protektif. Darurat konstitusi akan tereliminasi dengan sendirinya jika Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara pengemban kedaulatan rakyat berfungsi efektif. Sebab, melalui MPR, rakyat yang berdaulat menyatakan kehendak dan amanatnya saat harus menanggapi ragam persoalan akibat kebuntuan konstitusi.

Salah satu muatan inti dan tujuan utama dari konstitusi adalah melindungi atau memproteksi negara-bangsa dari berbagai persoalan dan ancaman. Konstitusi pun mewajibkan suprastruktur politik mengelola kehidupan berbangsa-bernegara sebagaimana mestinya agar negara-bangsa sekali-kali tidak boleh terjerumus atau terjebak kondisi darurat. Maka, sistem ketatanegaraan harus berpijak pada titah konstitusi itu. Dinamika kehidupan berbangsa-bernegara kemudian ditata oleh institusi suprastruktur politik, seperti lembaga perwakilan MPR,DPR serta DPD, bekerjasama dengan presiden - wakil presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga Badan Pemeriksa Keuangan

Tidak ada yang pernah mau — atau bahkan berharap — hidup dalam kondisi darurat. Pengalaman terbaru dari darurat kesehatan akibat wabah Covid-19 menjadi bukti betapa tidak nyamannya dinamika kehidupan sepanjang periode wabah itu. Semua berharap, pengalaman seperti itu tak berulang. Maka, sejauh akal budi manusia mampu mengeliminasi potensi terjadinya kondisi darurat, sebisa mungkin potensi dimaksud dihilangkan sejak dini.

Dalam konteks itu, infrastruktur politik yang meliputi sejumlah kalangan dan organisasi kemasyarakatan terus mengkaji UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Berpijak pada visi-misi bernegara-berbangsa yang telah dimeteraikan dalam Pembukaan UUD 1945, rangkaian kajian itu menelaah kemurnian dan konsistensi UUD 1945 hasil amandemen 2002 saat dihadapkan pada empat alinea pembukaan dimaksud.

Dari sejumlah kajian itu, muncul aspirasi atau dorongan bagi upaya pemurnian terhadap norma dan filosofi UUD 1945. Utamanya pemurnian terhadap hakikat kedaulatan rakyat serta hakikat visi-misi bernegara-berbangsa. Tentu saja semangatnya adalah merawat keutuhan negara-bangsa dan mewujudkan kemakmuran rakyat di tengah perubahan zaman. Oleh karena perubahan zaman menghadirkan ragam tantangan baru, konstitusi negara dan sistem ketatanegaraan harus dimampukan untuk responsif, solutif dan protektif.

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tentang Kedaulatan rakyat paling sering dipersoalkan. Sebelum amandemen, pasal ini berbunyi “Kedaulatan adalah di Tangan Rakyat, dan Dilaksanakan Sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”. Sangat tegas dinyatakan bahwa MPR itulah pengemban kedaulatan rakyat. Setelah amandemen, bunyi pasal ini diganti menjadi “Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut UUD”.

Dengan perubahan pernyataan Pasal 1 ayat 2 ini, kedaulatan rakyat diambangkan karena dilepas dari genggaman MPR. Pengejawantahan kedaulatan rakyat tak lagi bersifat mutlak di tangan rakyat, melainkan bisa diperdebatkan (debatable), dan bisa dipindahkan oleh faktor konfigurasi kekuatan politik di lembaga perwakilan. Lebih dari itu, perubahan pernyataan Pasal 1 ayat 2 itu pun terkesan kontradiktif. Sebab, rakyat disebut berdaulat, tetapi MPR tidak boleh menetapkan amanat rakyat kepada penyelenggara negara.

Jika mengacu pada terminologi berdaulat atau kekuasaan tertinggi, rakyat yang berdaulat sejatinya berhak dan berwenang merumuskan serta membuat ketetapan (TAP) strategis berskala nasional pada semua aspek kehidupan berbangsa-bernegara. TAP dari rakyat yang berdaulat itu tak lain adalah amanat rakyat yang menjadi pijakan bagi suprastruktur politik – khususnya penyelenggara pemerintahan — untuk menyusun kebijakan pembangunan nasional, baik pembangunan dari aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya hingga pertahanan dan keamanan. Dengan begitu, adalah keniscayaan jika wewenang MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat dipulihkan untuk membuat TAP MPR. .

Dengan memurnikan kembali hakikat kedaulatan rakyat yang

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE.,SH.,MBA.
Ketua MPR RI

diemban oleh MPR, pondasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia kembali kokoh, responsif, solutif dan protektif. Karena menjunjung setinggi-tingginya hakikat kedaulatan rakyat, sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis akan menjadi sangat bijaksana, karena mampu membebaskan negara-bangsa dari potensi terjadinya kondisi darurat yang diakibatkan oleh kebuntuan konstitusi. Serumit apa pun persoalan yang mengemuka di tengah kehidupan berbangsa-bernegara, persoalan itu akan terselesaikan ketika rakyat yang berdaulat menetapkan amanatnya.

Bersyukur bahwa negara-bangsa telah selamat melewati kondisi darurat akibat wabah Covid-19. Pengalaman dari pandemi itu secara tidak langsung mengingatkan semua elemen bangsa untuk selalu mewaspadai bentuk lain dari keadaan luar biasa yang kehadirannya tak pernah bisa diprediksi. Salah satu kemungkinannya adalah ketika pemilu tidak dapat diselenggarakan tepat waktu sesuai perintah konstitusi, misalnya karena alasan bencana alam akibat gempa bumi megathrust, perang atau kerusuhan massal.

Konsekuensi dari Pemilu yang tertunda adalah kekosongan, karena pemerintah telah demisioner dan masa bakti anggota legislatif pun telah berakhir. Kekosongan terjadi karena produk Pemilu yang meliputi Presiden-Wakil Presiden, serta anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah, belum terpilih. Manakala kemungkinan ini terjadi, negara-bangsa terperangkap dalam kondisi darurat akibat kebuntuan konstitusi. Kedaruratan seperti itu tak bisa dihindari karena tidak ada lembaga yang memiliki kuasa dan kewajiban hukum untuk mengatasi situasi seperti itu. Belum ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik saat terjadinya kekosongan akibat pemilu yang tertunda.

Darurat konstitusi seperti itu akan tereliminasi dengan sendirinya jika MPR sebagai lembaga tertinggi negara pengemban kedaulatan rakyat berfungsi efektif. Sebab, melalui MPR, rakyat yang berdaulat pasti akan menyatakan kehendak dan amanatnya menanggapi persoalan kebuntuan itu. Inilah urgensi mengembalikan kewenangan Subjektif Superlatif MPR RI melalui TAP MPR RI.

TAP MPR RI menjadi solusi bagi ragam persoalan negara manakala dihadapkan pada kebuntuan konstitusi, termasuk kebuntuan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan fiskal dalam skala besar. Ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dan lembaga DPR RI, TAP MPR dengan sendirinya akan mengatasi kebuntuan itu.

Untuk mengawal perjalanan negara-bangsa ke arah yang lebih baik di masa depan, fungsi dan peran MPR harus diperkuat sejak dini. Fungsi dan peran MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat hendaknya dipulihkan. Tak kalah pentingnya adalah mengembalikan hak dan kewenangan Subjektif Superlatif MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI. Kewenanangan ini patut dimaknai sebagai pintu darurat manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan situasi kedaruratan luar biasa yang tidak bisa diatasi dengan tindakan yang biasa.

Dan, agar arah pembangunan nasional selalu berpijak pada visi-misi negara-bangsa sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, pulihkan pula wewenang MPR untuk merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan nasional. ❑

Memperkuat Kelembagaan MPR

MPR Perlu Diberi Kewenangan Mengeluarkan Ketetapan

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kewenangan MPR perlu diperkuat, di antaranya dengan kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat mengatur atau regeling. Untuk hal-hal yang strategis seperti PPHN, MPR perlu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Tap MPR. Juga jika terjadi kekosongan kekuasaan atau kedaruratan.

BERAWAL dari pertanyaan, jika terjadi bencana alam, peperangan, pemberontakan, pandemi, dan keadaan darurat negara, lalu pemilihan umum (Pemilu) yang seharusnya dilaksanakan sesuai jadwal tetapi harus ditunda karena *force majeure* seperti itu, bagaimana jalan keluar dari keadaan seperti itu? Pasalnya, bila Pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu maka terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, begitu juga dengan anggota DPR, DPD, DPRD.

"Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum? Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis?"

Begitulah pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat berkaitan erat dengan konstitusi. Pertanyaan seperti itu dikemukakan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 di Ruang Sidang Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. Sidang Tahunan MPR yang dirangkai dengan Sidang Bersama DPR-DPD ini dihadiri, antara lain: Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Selain itu, ada juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti, serta anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Turut hadir juga sejumlah ketua umum parpol, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Sebenarnya, Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, sudah sejak lama mengungkapkan persoalan konstitusi tersebut. Bermula saat Bamsoet mempertahankan disertasi dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, pada Sabtu, 28 Januari 2023. Dalam disertasi berjudul: "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas," Bamsoet mengungkapkan, PPHN sebagai produk hukum dapat dihadirkan

dengan menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

Kewenangan subjektif superlatif yang dimaksud adalah kewenangan MPR untuk membuat atau mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar (regeling). Dengan demikian, PPHN dapat dihadirkan melalui Tap MPR atau tanpa melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. "Kita butuh haluan negara yang dikuatkan dengan landasan hukum yang lebih kuat, bukan sekadar melalui undang-undang yang setiap saat dapat ditorpedo dengan Perppu atau di-*judicial review* ke MK. Landasan hukum yang kuat tersebut, yakni berupa Tap MPR yang berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan berada di atas undang-undang," terang Bamsoet.

Dalam konteks haluan negara, sambung Bamsoet, landasan hukum Tap MPR pernah dipakai untuk haluan negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, haluan negara yang diberi nama Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) sebagai landasan program pembangunan nasional memiliki alas hukum Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN.

"Terdapat juga Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Berencana 1961-1969 dan Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelak-sananaan GBHN dan Haluan Pembangunan. Begitu juga di masa Orde Baru. Semua perencanaan jangka panjang yang merupakan haluan negara atau peta jalan bangsa dikuatkan dengan Tap MPR," jelasnya.

Tak hanya untuk PPHN, dalam pandangan Bamsoet, kewenangan subjektif superlatif MPR juga penting ketika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan. Misalnya, kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan (pemerintah/eksekutif) dengan lembaga DPR (legislatif) atau kebuntuan politik pemerintah dan DPR dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (yudikatif). "Siapa yang berhak memutuskan jika terjadi suatu kondisi force majeure atau kahar fiskal dalam skala besar, namun terjadi kebuntuan antara presiden dan DPR? Menurut saya, yang paling tepat adalah MPR sebagai representasi pemegang kedaulatan rakyat," katanya.

"Menurut saya, Tap MPR merupakan salah satu solusi manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan kedaruratan atau kegentingan yang memaksa, seperti halnya Presiden yang memiliki kewenangan Perppu manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa," sambung Bamsoet.

Lalu, dari mana MPR mempunyai kewenangan subjektif superlatif itu? Asal muasal kewenangan subjektif superlatif MPR adalah Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Pasal itu berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Sesuai amanat Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 ini MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat pengaturan, guna

Arsul Sani FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun politik yang tidak dapat diantisipasi.

Jadi, Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan dapat menjadi solusi ketika Indonesia mengalami masa darurat, seperti bencana besar atau pandemi, termasuk untuk mengeluarkan ketetapan penundaan Pemilu pada masa darurat tersebut. "Kalau terjadi dispute, tanpa kita mempunyai kewenangan Tap, maka tidak bisa, dan tidak ada jalan keluarnya," ujar Bamsoet. Dengan mengembalikan kewenangan subjektif superlatif MPR maka MPR bisa menjadi lembaga tertinggi negara.

"Idealnya, memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. (Hal itu) sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi Ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," kata Bamsoet dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Dua hari kemudian Bamsoet meluruskan pernyataannya yang mewacanakan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi. Bamsoet menegaskan bahwa MPR kembali menjadi lembaga tertinggi bukanlah seperti MPR pada masa Orde Baru yang memilih presiden dan wakil presiden. Bamsoet menjelaskan bahwa wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara berkaitan dengan kewenangan subjektif superlatif yang diatur kembali dalam UUD NRI Tahun 1945.

"Tertinggi yang dimaksud bukan berarti pemilihan presiden dan wakil presiden kembali ke MPR. Yang dimaksud bukanlah untuk menjadikan kembali presiden sebagai Mandataris MPR. Bukan itu, tetapi lebih kepada kewenangan MPR dalam hal ketetapan-ketetapan ketika MPR dapat kembali mengeluarkan ketetapan yang bersifat mengatur (regeling)," katanya di Komplek Parlemen, Jumat, 18 Agustus 2023.

Ketetapan MPR dan Lembaga Tertinggi Negara

Wakil Ketua MPR Arsul Sani menjelaskan lebih lanjut pendapat dan pernyataan Bamsoet. Menurut Arsul Sani, kewenangan MPR perlu diperkuat, di antaranya dengan kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat mengatur atau *regeling*. "Untuk hal-hal yang strategis seperti PPHN, MPR perlu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Tap MPR. Juga jika terjadi kekosongan kekuasaan atau kedaruratan, perlu Tap MPR," katanya kepada *Majelis*.

Mengapa MPR, bukan lembaga negara lainnya? Sebab, MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama dipilih rakyat. "Jadi, MPR merupakan representasi rakyat. Mengapa bukan MA atau MK? Karena, Pimpinan MA maupun MK dipilih DPR atau hasil seleksi (fit and proper test) di DPR. Tidak masuk akal jika pimpinan MA atau MK hasil seleksi memiliki kewenangan yang melebihi pejabat yang dipilih rakyat," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP ini.

Meski memiliki kewenangan subjektif superlatif dengan mengeluarkan Tap MPR yang bersifat mengatur (*regeling*), Arsul memastikan bukan berarti MPR menjadi lembaga tertinggi negara seperti pada waktu lalu. Bahkan, Arsul berpendapat, tidak ada urgensi menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. "Tidak ada urgensinya kita mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Bahkan, kita sendiri di MPR tidak pernah berpikir untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi, kita tidak berpikir ke arah sana. Yang kita pikirkan adalah memperkuat kelembagaan MPR, termasuk soal Ketetapan MPR," jelasnya.

Persoalannya, seiring perubahan (amandemen) UUD 1945, MPR saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa Tap MPR. Ini berbeda ketika UUD 1945 belum diamandemen. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. MPR menjadi lembaga tertinggi negara karena kedudukannya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tersebut disertai pula dengan kewenangan mengatur (regeling). Kewenangan mengatur itu dituangkan dalam produk hukum bernama Ketetapan MPR (Tap MPR).

Namun, seiring perubahan (amandemen) UUD 1945, di mana kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa Tap MPR. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan produk hukum berupa Tap

MPR yang bersifat mengatur (regeling), tetapi MPR hanya bisa mengeluarkan Tap MPR yang bersifat (hanya sebatas) *beschikking* (penetapan).

Sebenarnya, Badan Pengkajian MPR periode 2014- 2019 sudah pernah mengkaji soal kewenangan MPR untuk membentuk Tap MPR. Bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pengkajian menuangkan kajian itu dalam buku dengan judul: "Kajian Akademik: Penataan Wewenang dan Tugas MPR," yang diterbitkan tahun 2020. Salah satu bab dalam buku itu adalah kewenangan MPR untuk membentuk Tap MPR. Dari kajian itu disimpulkan bahwa tidak ada urgensi memberikan kewenangan MPR untuk membentuk Tap MPR yang bersifat mengatur (*regeling*). Namun, masih dimungkinkan bagi MPR untuk membentuk Tap MPR yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Karena itulah, mengembalikan kewenangan MPR membuat Tap yang bersifat mengatur berjalan seiring dengan wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud adalah amandemen yang sifatnya terbatas untuk keperluan adanya aturan-aturan konstitusional bila terjadi situasi kedaruratan yang disebabkan kebuntuan politik atau kondisi *force majeure*, sehingga Pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Namun, Arsul Sani memastikan, tidak ada amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam waktu dekat dan amandemen bisa dilakukan setelah gelaran Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Martin Hutabarat

Jimly Asshiddiqie

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

"Kenapa setelah Pemilu 2024? Karena kalau amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan sebelum pemilu maka bisa muncul persepsi dan prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa amandemen UUD itu adalah cara untuk menghidupkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," ujanya.

Akan halnya wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tentu bakal menimbulkan pro dan kontra. Ketua MPR Bamsoet telah mengklarifikasi bahwa yang dimaksud MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah kewenangan subjektif superlatif mengeluarkan Ketetapan (Tap) MPR yang bersifat mengatur, bukan memilih presiden dan wakil presiden di MPR dan presiden menjadi mandataris MPR. Namun, tak urung berkembang persepsi di masyarakat bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi adalah MPR seperti pada masa Orde Baru.

Secara objektif anggota DPD, Jimly Asshiddiqie, berpendapat, wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa menjadi bahan diskusi publik. Dengan adanya diskusi publik itu, Jimly mengharapkan adanya evaluasi sistem ketatanegaraan. "Yang paling penting adalah adanya kesediaan untuk melakukan evaluasi. Nanti pasti ada tukar pikiran yang moderat dan lebih tepat," katanya.

Menurut Jimly, perbincangan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara bukanlah hal yang tabu. Bahkan, sudah cukup banyak tokoh yang memikirkan hal tersebut. Karena itu, perlu proses tukar pikiran dan musyawarah. "Nyatanya di masyarakat masih banyak tokoh-tokoh yang berpikir seperti itu (menjadikan MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara), termasuk mantan Wakil Presiden Try Sutrisno," sebutnya.

Fraksi Partai Gerindra MPR RI pun telah menggelar diskusi publik dengan tema: "Mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara: Kemajuan atau Kemunduran dalam Demokrasi" di Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 16 September 2023 (lihat bagian kedua, "Mungkinkah MPR Kembali Menjadi Lembaga Tertinggi Negara?"). Dalam diskusi publik itu, Martin Hutabarat menekankan, perlu diperjelas lebih dulu konsep mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Lembaga tertinggi negara seperti apa dan bagaimana yang diinginkan saat ini. Apakah lembaga tertinggi negara yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 atau yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945?" tanyanya. Karena itu, menurut anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan ini, perlu kajian dan serap aspirasi masyarakat untuk melihat untung dan rugi jika MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. ❑

MBO/BSC

Mungkinkah MPR Kembali Menjadi Lembaga Tertinggi Negara?

Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara mungkin saja bisa diwujudkan. Namun, tentu bukanlah hal yang mudah. Sebab, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pasti akan menimbulkan perdebatan di masyarakat sehingga diskursus ini perlu disertai dengan kajian akademis yang matang.

IDEALNYA memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. (Hal itu) sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi Ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu".

Itulah kutipan penggalan pidato pengantar Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 pada Rabu, 16 Agustus 2023. Penggalan pernyataan ini kemudian banyak dikutip media. Dalam berbagai judul yang beragam di media-media terbersit inti bahwa ada keinginan untuk menjadikan lembaga MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara lagi. MPR menjadi lembaga tertinggi negara lagi (seperti masa Orde Baru)?

Bambang Soesatyo

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Perubahan kedudukan dan fungsi MPR masih menyisakan persoalan. Itu sebabnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam pidato pengantarnya pada Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2023 lalu menyebutkan agar MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. "Setelah 25 tahun memasuki era reformasi, saatnya merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara," katanya dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Perubahan (amandemen) UUD 1945 yang berlangsung selama empat tahap sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 telah mengubah kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada. Perubahan (amandemen) UUD 1945 itu juga melahirkan lembaga-lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Salah satu penataan ulang itu membuat kedudukan MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara, menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya: Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), MK, KY, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bamsoet menjelaskan, pengembalian status MPR sebagai lembaga tertinggi ini penting agar jika terjadi sesuatu di luar dugaan, seperti bencana alam, peperangan, pemberontakan, atau pandemi, yang tidak segera bisa diatasi, atau keadaan darurat yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya atau tepat pada waktunya sesuai perintah konstitusi, maka MPR dengan kewenangan subjektif superlatif bisa mengatasi keadaan darurat tersebut.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai representasi prinsip kedaulatan rakyat, MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum. Artinya, MPR dapat mengambil keputusan atau ketetapan yang bersifat pengaturan (regeling) untuk mengatasai dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Karena itulah, MPR perlu dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.

Resonansi MPR menjadi lembaga tertinggi negara lagi semakin kuat ketika dalam sidang paripurna yang sama, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti menyampaikan pidato pengantar Sidang Bersama DPD dan DPR. Dalam pidato pengantar Sidang Bersama DPR-DPD, La Nyalla mengatakan, DPD mendukung gagasan untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Menurut La Nyalla, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah menjadi keputusan Sidang Paripurna DPD pada 14 Juli 2023. Dalam Sidang Paripurna DPD itu, DPD menawarkan lima hal pokok untuk penguatan sistem kelembagaan negara.

"Pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan yang menampung semua elemen bangsa, yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik

La Nyalla Mattalitti

dan pelaksana kedaulatan," katanya.

Usulan lainnya adalah peluang adanya anggota DPR yang berasal dari peserta Pemilu unsur perseorangan atau non partisan, utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah bukan penunjukan oleh presiden seperti saat Orde Baru, memberikan kewenangan kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh, menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah terbentuk di era reformasi sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan.

Dalam konteks usulan versi DPD itu, mengembalikan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus memberi wewenang MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pada saat yang sama, MPR juga kembali diberi wewenang menerbitkan ketetapan-ketetapan sebagai produk hukum sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara.

Ide mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pastilah menuai pro kontra di kelangan elit politik, pejabat pemerintah, dan masyarakat. Tak sedikit kalangan yang memprotes usulan tersebut lantaran mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi dianggap tidak sesuai dengan agenda reformasi. Sehingga mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara bukanlah usulan yang tepat untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan.

Diskursus mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi tema bahasan dalam diskusi publik yang digelar Fraksi Partai Gerakan Indonesia Rayat (F-Gerindra) MPR RI pada Rabu, 16 September 2023. Tema diskusi publik ini adalah "Mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara: Kemajuan atau Kemunduran dalam Demokrasi?". Pembicara diskusi publik ini, antara lain Sekretaris F-Gerindra MPR Elnino Mohi, Sodik Mudjahid, Fuad Bawazier, Martin Hutabarat.

Dalam diskusi publik itu, Fuad Bawazier mengungkapkan, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa saja diwujudkan bila ada kesepakatan. Ia mencontohkan pada masa Orde Baru ada kesepakatan perlunya lembaga tertinggi negara yang dapat mengambil keputusan sepihak saat negara dalam keadaan darurat. Sebaliknya, pada masa reformasi ada sekepakatan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan disejajarkan dengan lembaga negara lainnya. "Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tentu tidak serta merta seperti MPR pada masa Orde Baru, tetapi ada penyesuaian-penyesuaian dengan dinamika masyarakat saat ini," ujarnya.

Tidak jauh berbeda, Martin Hutabarat menekankan, perlu diperjelas lebih dulu konsep mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. "Lembaga tertinggi negara seperti apa dan bagaimana yang diinginkan saat ini. Apakah lembaga tertinggi negara yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 atau yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945," tanyanya. Karena itu, menurut Martin Hutabarat, perlu kajian dan serap aspirasi masyarakat untuk melihat untung dan rugi jika MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara.

Pada akhirnya, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara mungkin saja bisa diwujudkan. Namun, tentu mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara bukanlah hal yang mudah. Sebab, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara pasti akan menimbulkan perdebatan di masyarakat sehingga diskursus ini perlu disertai dengan kajian akademis yang matang. Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak serta merta berbentuk seperti pada masa lalu (MPR masa Orde Lama dan Orde Baru) melainkan perlu penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika masyarakat saat ini. ❑

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

H. Arsul Sani, SH, M.Si, LL.D., Wakil Ketua MPR RI

Kewenangan MPR Perlu Diperkuat

DI PENGHUJUNG masa jabatan MPR RI periode 2019-2024 bergulir wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Berawal dari pidato pengantar Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 pada Rabu, 16 Agustus 2023. Dalam pidato pengantar itu, Bambang Soesatyo menyebutkan, "Idealnya MPR memang dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara."

Pernyataan Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, itu dalam konteks MPR menjadi lembaga tertinggi negara, karena MPR memiliki kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan kewenangan subjektif superlatif itu, MPR bisa mengeluarkan keputusan atau ketetapan (Tap) yang mengatur ke luar bila negara dalam keadaan darurat. Kewenangan serupa juga diperlukan untuk mengeluarkan Tap tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Tentu saja wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan subjektif superlatif tersebut itu menuai perdebatan dan pro kontra di tengah masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh gagasan tersebut, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Arsul Sani, SH., M.Si., LL.D. Berikut petikan wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP itu.

Saat ini muncul wacana untuk melakukan kembali amandemen UUD, seperti usulan DPD untuk melakukan amandemen kelima UUD. Apa tanggapan Bapak?

Dihitung dari sisi waktu, amandemen terhadap UUD 1945 telah berusia 20 tahun. Dalam rentang waktu itu, amandemen yang pernah kita lakukan mulai terasa dampaknya. Ada yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu tidak bisa dinafikkan. Tapi, sebagian orang juga merasa ada dampak negatif, dari perspektif kesepakatan kita bernegara. Khususnya, kesepakatan kita saat negara ini mau didirikan.

Mereka yang memandang negatif melihat, empat tahap perubahan, dilakukan dalam tanda kutip terburu-buru. Ada satu euforia ingin lari dari alam sebelumnya yang dirasa sebagai alam yang tidak demokratis, cenderung otoritarian, menuju ke alam demokrasi. Seperti, demokrasi yang dirasakan oleh negara-negara yang demokrasinya mapan.

Ada kesan kita ingin melepaskan diri dari persepsi otoritarianisme, kurang demokratis menuju demokrasi yang dinilai kebablasan. Kenapa dinilai kebablasan karena kita meninggalkan prinsip-prinsip intrinsik atau prinsip asli yang menjadi ciri khas dan disepakati waktu negara ini akan dibentuk.

Banyak negara, juga melakukan amandemen terhadap konstitusinya. Tetapi, mereka tidak meninggalkan apa yang diyakini sebagai nilai-nilai *intrinsic value*. Amerika misalnya, presiden dipilih langsung melalui Pilpres. Tapi, kemenangan seorang presiden Amerika bukan ditentukan oleh *popular vote*, tetapi *electoral vote*.

Itulah yang disebut sebagai *American intrinsic value*, meskipun itu dikritik, tetapi orang Amerika, minimal Partai Republic dan Democrat tidak tertarik mengamandemen sistem pemilihan presiden dari konstitusinya. Karena itulah *American intrinsic value*, yang membedakan dengan negara lain.

Di kita, intrinsic value bernegaranya

adalah sila keempat Pancasila. Tekanannya ada pada permusyawaratan perwakilan. Dan, itu sudah ditinggalkan sama sekali. Mulai dari Pilpres, Pilgub, Pilkab, Pilwalkot dan Pilkades. Semua dilakukan secara langsung. Dampaknya bisa dirasakan, yaitu keterbelahan masyarakat.

Dalam 20 tahun setelah amandemen, kita juga melihat perubahan yang tanggung. Misalnya, kita menciptakan sistem parlemen yang bikameral. Ada DPR dan DPD, mestinya konsepnya seperti *house of representative* dan senat. Tetapi, kekuasaan yang disebut sebagai senator atau DPD demikian kecil.

Selain itu, ada lembaga negara namanya Komisi Yudisial (KY). Desainnya untuk mengawasi pelaku kekuasaan kehakiman, baik Hakim Agung di MA, hakim peradilan di bawahnya, maupun hakim MK. Tiba-tiba oleh MK digusur. MK mengatakan, karena kewenangan keputusan tidak bisa diawasi oleh KY. Dengan adanya akrobat ketatanegaraan yang dilakukan MK, keberadaan KY jadi tanggung dan perlu ditata ulang. Jadi DPD, KY dan MK perlu ditata ulang.

Karena itu, hemat saya memang perlu amandemen. Bukan saja menurut saya, MPR periode lalu juga memberikan rekomendasi. Ada yang rekomendasinya itu untuk ditindaklanjuti dalam bentuk amandemen terbatas dalam bentuk PPHN. Ada yang untuk dikaji lebih jauh, menyangkut sistem presidensial, kekuasaan kehakiman (MA, MK dan KH) dan terkait peran DPD.

Persoalannya adalah pemilihan waktu. Ketika timingnya itu menjelang pemilu dan suhu politk lagi hangat, itu tidak pas. Yang pas menurut saya, begitu selesai pemilu kita langsung melaksanakan proses amandemen. Karena, saat itu tidak akan ketemu dengan kepentingan politik pemilu.

Apa yang perlu diamandemen?

Yang perlu ditata ulang minimal menyangkut PPHN. Semua sudah sepakat tentang PPHN, negara ini perlu Pokok-Pokok Haluan Negara, yang berbeda hanya wadahnya. Enam fraksi plus DPD setuju dalam bentuk Ketetapan MPR. Tiga Fraksi, yaitu Golkar, Demokrat, dan PKS setuju dalam bentuk UU, berarti menggantikan RPJPM.

Padahal antara RPJPM dengan PPHN agak berbeda. Agar bentuknya bukan UU yang bisa diuji di MK, diperlukan bentuk hukum yang kuat, maka perlu ada ketetapan. Agar MPR bisa membuat ketetapan, paling bagus melalui amandemen UUD. Meskipun bisa juga dengan perubahan UU No. 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Kenapa perlu diamandemen, karena agak lucu. Misalnya, di Pasal 3 UUD, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Mengubah UUD tapi tidak boleh membikin ketetapan kan lucu. Terus kalau sudah diubah dan ditetapkan itu wadahnya apa. Justru itulah kelemahan UUD sekarang. Empat tahap amandemen, apa coba wadahnya, kan tidakk ada wadahnya. Adanya hanya notulen keputusan rapat paripurna MPR saja. Tidak ada Ketetapan

MPR tentang Amandemen Pertama UUD.

Terkait wacana mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, apa ada urgensinya?

Tidak ada urgensinya kita mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Bahkan, kita di MPR sendiri tidak berpikir untuk menjadikan MPR sebagai lembaga tertingi negara. Jadi, jangan ditanya urgensinya, karena kita tidak berpikir ke arah sana. Yang kita pikirkan adalah agar kewenangan MPR itu diperkuat atau dikuatkan, termasuk soal penetapan. Sedangkan soal pemilihan presiden pun tidak, soal pemilihan presiden terserah.

Tapi hal-hal strategis, kewenangan mengeluarkan Tap PPHN, kemudian terkait dengan kekosongan kekuasaan. Kalau terjadi kedaruratan (seperti dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo) itu saja karena memang harus ada lembaga yang berwenang menyelesaikan dan yang paling mungkin dan paling dekat itu MPR. Kenapa, karena di MPR bersatu antara anggota DPR dan DPD yang sama-sama dipilih oleh rakyat. Jadi, MPR merupakan representasi rakyat. Bukan misalnya MA atau MK, karena baik MK maupun MA pimpinannya adalah hasil diseleksi. Tidak masuk akal jika pejabat yang diseleksi kewenangannya melebih pejabat yang dipilih negara.

Seberapa penting kewenangan MPR itu diperkuat atau dikuatkan dengan implementasi dari kewenangan subjektif superlatif tadi?

Kalau kita bicara seberapa penting dan mendesak tentu tidak bisa secara kualitatif. Kalau buat saya sederhana saja, kita merasakaan atau tidak, mari kita tanya. Selain hal-hal yang baik dari amandemen, apakah masih ada yang tidak pas. Ada yang kemudian menjadikan intrinsic value menjadi seolah terpinggirkan.

Masih banyak kalangan yang khawatir terhadap amandemen UUD meskipun niat MPR hanya untuk memperkuat kelembagaan MPR dengan kewenangan subjektif superlatif itu?

Itu karena mereka berpikir bahwa proses amandemen UUD itu sama dengan proses perubahan UU atau pembuatan UU, padahal berbeda. Di DPR, dalam membahas UU, baik UU baru maupun UU perubahan, yang tidak ada di naskah akademis, maupun naskah RUU boleh tiba-tiba muncul. Sedangkan diamandemen tidak bisa begitu.

Pasal 37 UUD NRI tahun 1945, itu sudah jelas. Pertama, kalau mau amandemen yang mengusulkan minimal 1/3 anggota MPR, berarti 237 orang. Dalam usulan itu tertera apa yang mau diamandemen, pasal mana yang mau diamandemen, beserta alasan dan alternatif penggantinya seperti apa. Di rapat tidak boleh tiba-tiba muncul pasal lain yang tidak ada dalam proposal. Itu bedanya proses amandemen UUD dengan proses pembahasa uu atau amandemen uu.

Banyak orang mengatakan, ini seperti membuka kotak pandora ada agenda selundupan. Itu berarti orang tersebut tidak mengerti bahwa proses amandemen itu berbeda dengan proses pembahasan UU. ❑

Kunjungan Wakil Ketua MPR RRT

Bamsoet Tetarik Pelajari Kesuksesan Tiongkok Menerapkan Haluan Negara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tidak ada salahnya jika kita belajar dari keberhasilan Tiongkok dengan kembali memiliki rencana pembangunan yang terstruktur, sistematis dan masif.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, bersama Wakil Ketua National Committee of The Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) sekaligus Ketua Komite Sentral Partai Zhi Gong Tiongkok Mr. Jiang Zuojun menjajaki kerjasama antara MPR RI dengan CPPCC. MPR RI akan melakukan studi banding ke CPPCC untuk mempelajari perumusan, perealisasian, sekaligus keberhasilan Tiongkok menjalankan program pembangunan mikro dan makro dengan jangka waktu 5 tahun, 15 tahun, hingga 100 tahun. Sebagai bahan pertimbangan MPR RI menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang/pedoman penunjuk arah pembangunan Indonesia.

"Program pembangunan mikro dan makro tersebut merupakan kekuatan Tiongkok bisa menjadi negara besar dunia. Bahkan, pada periode tahun 1970-an/1980-an saja Tiongkok telah memiliki rencana pembangunan hingga tahun 2050, yakni pada saat usia kemerdekaan Tiongkok memasuki usia ke-100 tahun," ujar Bamsoet usai menerima Wakil Ketua National CPPCC sekaligus Ketua Komite Sentral Partai Zhi Gong Tiongkok Mr. Jiang Zuojun, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, Senin (11/9/23).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok sekaligus Wakil Ketua Komite Sentral Partai Zhi Gong Tiongkok Ms. Xu Xiaolan, Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Zhi Gong Tiongkok Mr. Lu Guoyi, serta Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Mr. Lu Kang. Hadir pula Presiden Yayasan Amal Zhifu Charity Foundation Ms. Tang Jiuhong, serta Direktur Kantor Umum Komite Sentral Partai Zhi Gong Tiongkok Mr. Ren Hao.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sasaran pembangunan mikro dan makro di Tiongkok terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama mewujudkan masyarakat Tiongkok yang sejahtera. Tahap kedua Tiongkok menjadi negara maju. Serta tahap ketiga Tiongkok menjadi negara modern. Tiga tahap tersebut memakan waktu 100 tahun dari mulai kemerdekaan Tiongkok pada 1 Oktober 1949 hingga perayaan ulang tahun ke-100 pada 1 Oktober 2050.

"Dalam fifth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China (CPC) yang ditutup pada 29 Oktober 2020,

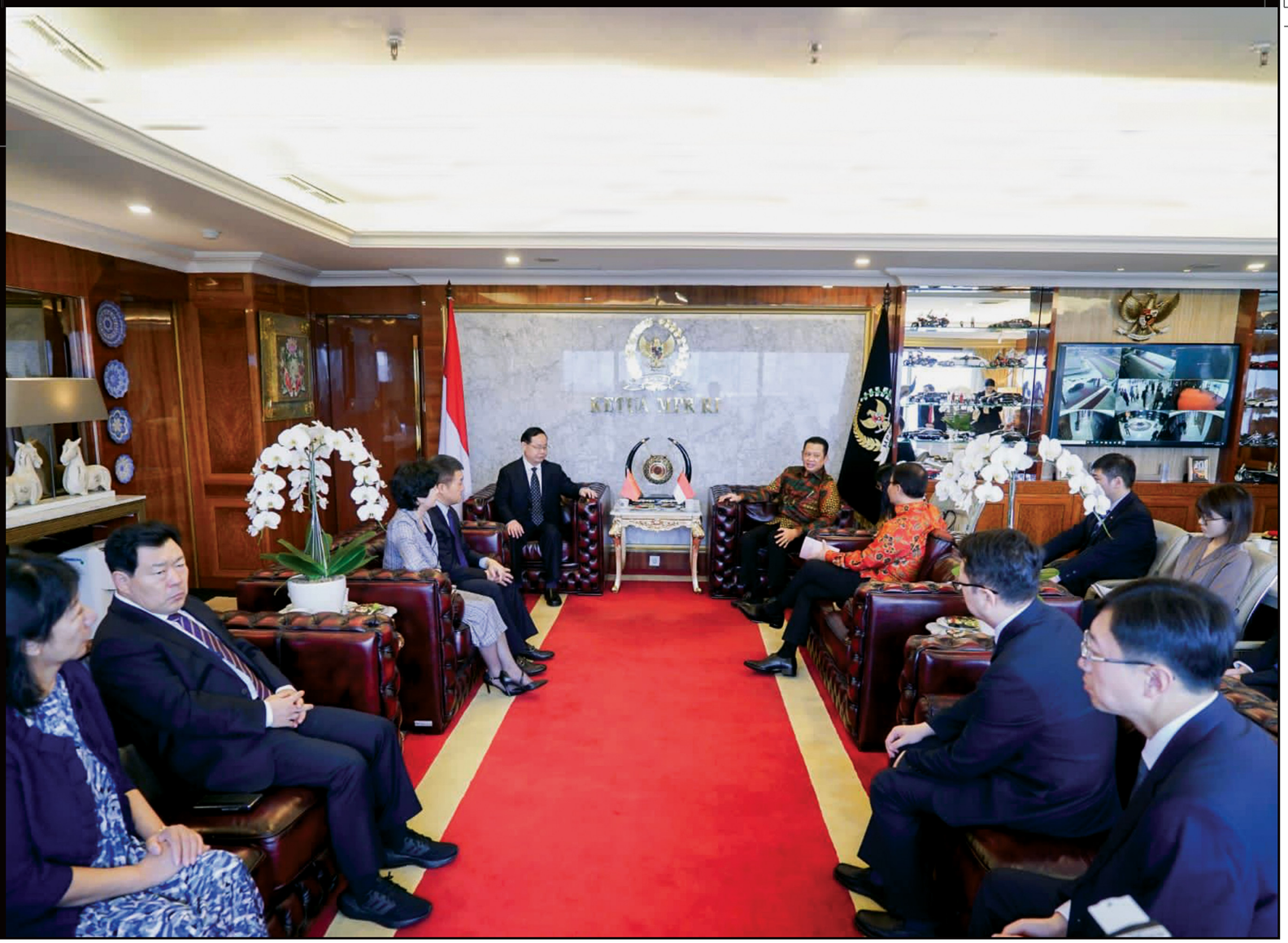

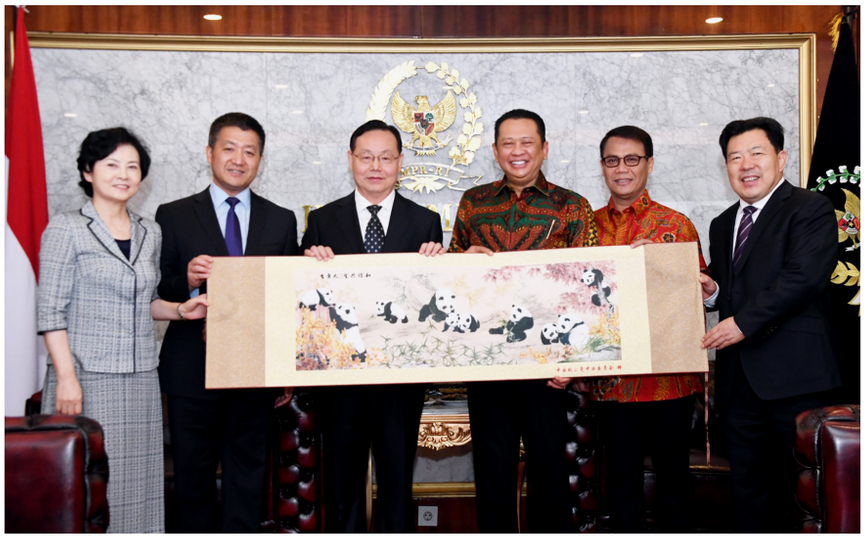

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Tiongkok telah merumuskan Rencana Lima Tahun ke-14 (2021-2025) serta Tujuan Jangka Panjang 15 tahun pada 2035. Salah satu tujuan yang akan dicapai pada tahun 2035 tersebut adalah Tiongkok menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pola pembangunan Tiongkok tersebut, yang memiliki rencana pembangunan 5 tahun, 15 tahun, hingga 100 tahun, sebetulnya tidak ubahnya seperti Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana, serta Presiden Soeharto dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sayangnya, lanjut Bamsoet, pola tersebut justru dihapuskan pada saat Indonesia memasuki reformasi. "Akibatnya, kini kita seperti kehilangan arah pembangunan. Karena itu, tidak salah jika kita belajar dari keberhasilan Tiongkok dengan kembali memiliki rencana pembangunan yang terstruktur, sistematis dan masif. Atas dasar itulah MPR RI kini sedang menyiapkan PPHN sebagai bintang/pedoman penunjuk arah pembangunan bangsa," pungkas Bamsoet. ❑

Muktamar Alkhairaat

Fadel: Kami Butuh Guru-Guru Yang Mau Berjuang Demi Bangsa dan Negara

Sejauh ini Alkhairaat sudah ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan. “Kami hadir di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga pendidikan lain, baik milik pemerintah maupun pihak swasta,” kata Fadel Muhammad

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengucap syukur dan memberi apresiasi atas keberhasilan yang diukir oleh Perguruan Alkhairaat. Karena dalam perkembangannya, sudah banyak kemajuan dan prestasi yang diraih. Terbukti, sejak berdiri pada 1930, Perguruan Alkhairaat sudah berada dihampir seluruh wilayah Indonesia Timur.

Alkhairaat memiliki 1.600 cabang lembaga pendidikan, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan. Dengan jumlah lembaga pendidikan sebanyak itu Alkhairaat menjadi salah satu lembaga yang memiliki sekolahan dan pesantren terbanyak di wilayah Indonesia Timur.

“Kita bersyukur, sejauh ini Alkhairaat sudah ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan. Kami hadir di wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh lembaga pendidikan lain, baik milik pemerintah maupun pihak swasta,” kata Fadel Muhammad.

Pernyataan itu disampaikan Fadel Muhammad usai beranjangsana dengan jajaran pengurus Yayasan Alkhairaat Provinsi Sulawesi Utara. Acara tersebut berlangsung di Kota Manado, Ahad malam (10/9/2023). Dalam temu kangen itu, Fadel yang saat ini menjadi salah satu pembina Yayasan Alkhairaat terlihat sangat menikmati pertemuan. Bahkan, mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu juga tak sungkan menanggapi berbagai pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Fadel berharap, kontribusi Alkhairaat dalam dunia pendidikan bisa terus ditingkatkan. Apalagi sekarang, tantangan dunia pendidikan dalam menghasilkan siswa-siswi berprestasi semakin berat. Sementara pengaruh teknologi informasi serta masuknya budaya asing berpengaruh besar terhadap perilaku serta budaya generasi muda.

Alkhairaat yang akhir September 2023, tepatnya 27-30 September, melaksanakan Muktamar di Palu, Sulawesi Tengah, menurut Fadel, salah satu kendala Alkhairaat dalam meningkatkan kualitas pendidikannya adalah keterbatasan jumlah guru, yang siap mengabdi demi bangsa dan negara dalam dunia pendidikan.

Muktamar yang rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini akan membahas masalah-masalah terkini yang dihadapi Alkhairaat, termasuk untuk mendatangkan guru-guru yang mau ditempatkan di kawasan terpencil. “Ini perlu dicarikan jalan keluar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan kita. Ke depan saya berharap, semoga keberadaan Alkhairaat bisa terus

berkontribusi dalam membina generasi muda yang akan datang," tutupnya.

Perguruan Alkhairaat berdiri tahun 1930. Kelahiran organisasi ini dibidani oleh Al'Alimul 'Allamah Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, ulama besar dari Yaman. Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri adalah keturunan Bugis dari pihak Ibu. Sedangkan dari garis keturunan bapaknya, beliau merupakan keturunan Rasulullah SAW. Di wilayah Palu yang menjadi pusat Alkhairaat, Sayyid Idrus dikenal dengan panggilan "Guru Tua. ❑

Bertemu Masyarakat Desa Bantarbarang

Bamsoet Dorong Pengembangan Desa Wisata

Salah satu Desa Wisata yang perlu dikembangkan adalah Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, desa tempat Panglima Besar Jenderal Soedirman, dilahirkan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, untuk lebih menggiatkan sektor pariwisata dalam penguatan ekonomi daerah. Terlebih, potensi wisata di Kabupaten Purbalingga sangat besar. Sehingga, lebih mudah untuk menghadirkan desa wisata yang digagas Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.

"Salah satu desa yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemkab Purbalingga dalam pengembangan desa wisata adalah Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Karena di Desa Bantarbarang ini lah salah satu pahlawan nasional kita, Panglima Besar Jenderal Soedirman, dilahirkan," ujar Bamsoet saat bertemu dengan perwakilan masyarakat Desa Bantarbarang di Purbalingga, Jumat (15/9/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, saat bertemu dengan perwakilan masyarakat Desa Bantarbarang, dirinya menerima aspirasi terkait usulan perbaikan infrastruktur di Desa Bantarbarang. Di Desa Bantarbarang sendiri terdapat rumah tempat Jenderal Soedirman dilahirkan pada 24 Januari 1916. Untuk mengenang jasa Jenderal Soedirman dibuatlah Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman di Desa Bantarbarang,

"Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Purbalingga. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman ini banyak menarik pengunjung yang datang. Hanya saja infrastruktur jalan raya di Desa Bantarbarang, masih kurang bagus. Masyarakat Desa Bantarbarang juga berharap Pemkab Purbalingga lebih mengembangkan Desa Bantarbarang sebagai desa wisata, sehingga bisa memberikan multiplayer effect dalam peningkatan ekonomi masyarakat sekitar," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menuturkan,

Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman dibangun pada tahun 1976. Monumen tersebut diresmikan oleh Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Wapangab), Jenderal Surono Reksodimedjo, pada tanggal 21 Maret 1979.

Monumen berupa duplikat rumah tempat dilahirkannya Jenderal Soedirman dilengkapi dengan pendopo, masjid, dan relief perjuangan Jenderal Soedirman. Dalam rumah joglo berdinding anyaman bambu ini terdapat kamar tempat Jenderal Soedirman dilahirkan. Lengkap dengan ayunan bambu yang digunakan untuk menimang.

"Rumah terdiri dari empat ruangan dengan tiga kamar tidur, di ruang tengah terdapat meja dan kursi. Selain itu juga terdapat diorama mini yang menggambarkan perjalanan hidup Jenderal Soedirman sejak lahir hingga melakukan perang gerilya," pungkas Bamsoet. ❑

Festival Jamu Gendong Nusantara

Bamsoet: Keberadaan Pedagang Jamu Perlu Didukung Agar Tetap Eksis

Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies tumbuhan maupun sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan untuk bahan olahan Jamu.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung terselenggaranya Festival Jamu Gendong Nusantara, pada 3-5 November 2023 di Pahlawan Street Center, Kota Madiun, Jawa Timur. Festival yang diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan Hari Pahlawan dan Hari Keuangan Nasional ini memecahkan rekor MURI dengan menghadirkan seribu pedagang jamu gendong, serta bazaar dari berbagai pelaku UMKM Nusantara.

Usai menerima Panitia Festival Jamu Gendong Nasional yang terdiri dari: Helena Davis, Shita, Farida, Imlahyudin, Djaka Suryadi, dan Adi Sumarna,di Jakarta, Rabu (6/9/23), Bamsoet menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan oleh Koperasi Komindo Sejahtera bekerjasama dengan Pemerintah Kota Madiun dan Paguyuban Rempah Rimpang, serta Dewan UKM DKI Jakarta.

"Jamu merupakan minuman herbal kesehatan khas Indonesia, warisan leluhur yang sangat berharga dan perlu dilestarikan. Keberadaan jamu gendong ternyata sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan kabarnya sudah ada sejak masa kerajaan Hindu-Budha. Keberadaannya telah memegang peranan penting dalam pemeliharaan kesehatan dan kebugaran sekaligus penyangga perekonomian masyarakat nusantara sejak ratusan tahun silam," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, pasca pandemi Covid-19, popularitas jamu diprediksi meningkat. Karena kesadaran masyarakat semakin tergerak untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.

"Di tahun 2019, industri jamu dan obat tradisional mampu tumbuh di atas 6%. Di tahun 2020 dan selanjutnya, pertumbuhannya naik tajam. Pelaku industri jamu juga semakin menjamur. Tercatat sudah

lebih dari 1.200 pelaku industri jamu, sekitar 129 di antaranya masuk kategori industri obat tradisional," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, potensi ekonomi keberlanjutan dari jamu nusantara juga sangat besar. Mengingat Indonesia memiliki lebih dari 30.000 spesies tumbuhan maupun sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan untuk bahan olahan Jamu.

"Karenanya, pemerintah dan masyarakat perlu hadir memberikan dukungan terhadap keberadaan pedagang Jamu agar tetap eksis. Sehingga dari alam Indonesia, dikelola pelaku usaha Indonesia, agar bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan menembus pasar dunia," pungkas Bamsoet. ❑

Pelantikan Pimpinan Muhammadiyah Jakarta Selatan

HNW: Budaya Muhammadiyah Hadirkan Solusi, Pencerahan, dan Memajukan Indonesia

Umat Islam, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, tampil menjadi bagian yang menyelamatkan bangsa, menghadirkan solusi, dan terus membawa harapan yang tak pernah padam

WAKIL Ketua MPR, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, Lc., MA., dikukuhkan sebagai Penasihat Pengurus Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan periode 2022-2027. Acara pengukuhan ini bersamaan dengan Pelantikan Pimpinan Daerah dan Aisiyah Jakarta Selatan periode 2022-2027, di Auditorium Masjid Al Huda Muhammadiyah, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (9/9/2023). Dalam kesempatan itu, HNW—sapaan Hidayang Nur Wahid—juga menyampaikan orasi budaya .

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam orasinya, HNW menyebutkan, pentingnya menjaga dan mengaktualisasikan budaya Muhammadiyah yang sudah mensejarah, antara lain tampil memberi solusi, mengoreksi, menyelamatkan bangsa, dan menghadirkan pencerahan untuk kemajuan umat, bangsa, dan negara. "Itu semua tetap relevan dilakukan dan selalu perlu dilakukan sebagai aktualisasi penyebutan Muhammadiyah bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan dan kesaksian (Darul 'Ahdi wasy Syahadah)," tutur politi PKS ini.

Dengan menyegarkan ungkapan, selain "Jas Merah," HNW juga menegaskan tentang ungkapan 'Jas Hijau' (Jangan Sekali-Sekali Menghilangkan Jasa Para Ulama). Melalui ungkapan ini, menurut HNW, kita mendapatkan makna bagaimana umat Islam, dan Muhammadiyah di dalamnya, memberikan keteladanan dalam perjuangan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

memajukan umat, bangsa, dan negara dalam bingkai Pancasila dan NKRI yang luar biasa.

Jadi, tegas HNW, itulah bagian dari budaya yang perlu untuk kita segarkan. "Umat Islam, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, tampil menjadi bagian yang menyelamatkan bangsa, menghadirkan solusi, dan terus membawa harapan yang tidak pernah padam," papar HNWdalam orasinya usai pelantikan Pengurus Wilayah Muhammadiyah dan Aisiyiah Jakarta Selatan beserta cabang-cabangnya hari itu.

Orasi Budaya dan Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Jakarta Selatan periode 2022-2027 itu dihadiri ooleh Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta Dr. Akhmad Abubakar, Pimpinan Pengurus Wilayah Aisyiyah Jakarta, Pengurus Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, Pimpinan Pengurus Daerah Aisyiyah Jakarta Selatan, dan sutradara film Hanung Bramantyo yang juga menyampai orasi budaya.

Dalam hal koreksi dan menyelamatkan bangsa, HNW menyebut nama tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo. Ketua PB Muhammadiyah saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang juga anggota PPKI, ini menyelamatkan Indonesia ketika ada tuntutan dari Indonesia Timur yang ingin keluar dari Indonesia, karena merasa bukan bagian dari Indonesia dengan adanya kesepakatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo bersama Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Mohammad Hasan, dan KH. Wahid Hasyim menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, saat Mohammad Hatta membacakan kesepakatan dengan tokoh umat Islam, Ki Bagus Hadikusumo tampil memberikan koreksi. Mohammad Hatta menyebutkan: Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Lalu, Ki Bagus Hadikusumo mengoreksi Moh. Hatta dengan mengatakan bahwa kesepakatan dengan tokoh umat Islam adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia. Dan, selamatlah Indonesia.

"Jas Merah (jangan sekali-sekali melupakan sejarah), tapi sejarah umat Islam sering dilupakan, termasuk sejarah Ki. Bagus Hadikusumo yang mengoreksi dengan menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa agar kita bertauhid dengan benar. Karena itu, saya termasuk yang mempopulerkan selain Jas Merah tapi juga Jas Hijau (Jangan Sekali-Sekali Menghilangkan Jasa Para Ulama)," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Sebagaimana Ki. Bagus Hadikusumo yang melakukan koreksi, lanjut HNW, dilanjutkan saat ini dengan perjuangan Prof. Dien Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, untuk melakukan jihad konstitusi meluruskan kiblat bangsa. "Hari-hari ini, menjelang tahun depan Pemilu 2024, banyak hal penting untuk kita koreksi. Sekali lagi bahwa budaya Muhammadiyah yang tampil mengoreksi, menyelamatkan, menghadirkan pencerahan tetap bisa dilakukan dan selalu perlu dilakukan," katanya.

Menurut HNW, dengan semangat budaya itu maka sudah sewajarnya bila Muhammadiyah mencerahkan umat dan bangsa agar tidak memubazirkan kesempatan yang diberikan oleh Konstitusi dengan melanjutkan ajaran KH. Ahmad Dahlan dengan amar ma'ruf dan solusi-solusi atau ijtihad-ijtihad kreatif ajaran beliau.

"Ormas Islam seperti Muhammadiyah juga bisa berkolaborasi dengan partai-partai politik, termasuk partai Islam, agar tidak memubazirkan kesempatan tahun 2024 untuk meluruskan kiblat bangsa agar tidak semakin menyimpang dari tujuan Indonesia Merdeka sebagaimana dulu diperjuangkan oleh Bapak/Ibu Bangsa, termasuk oleh tokoh-tokoh atau Pimpinan Muhammadiyah," pungkasnya. ❑

Pengembangan Wisata Olele

Fadel Apresiasi Kepedulian Pengusaha Muda Terhadap Pengembangan Wisata Olele

Pengusaha muda tergabung dalam organisasi Idepreneurs Club memperbincangkan tentang rencana menambah fasilitas publik di Taman Laut Nasional di Desa Olele dengan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dalam kunjungannya di Gorontalo, awal pekan kedua September 2023.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad bertemu dan berdialog dengan para pengusaha muda yang tergabung dalam organisasi Ide Indonesia Enterpreneurs atau Idepreneurs Club (IC), di Meranti Lounge, Tilongbalila, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Jumat malam (8/9/2023).

Hadir dalam pertemuan itu delegasi IC terdiri dari Founder IC Prianto Indra, Sekretaris Jenderal IC Satya Jaya Sakti, dan Parwis Nasution. Hadir pula istri Fadel Muhammad, Hana Hasanah Shahab, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ishak Ntoma.

Dalam pertemuan dengan Fadel Muhammad itu ada beberapa hal penting yang diperbincangkan. Salah satunya, pihak delegasi IC menyampaikan rencana untuk menambah fasilitas publik, berupa ruang pemandian dan sarana ibadah, Musholla, untuk wisatawan yang berkunjung ke Taman Laut Nasional: Geosite Pantai Olele, di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Usai pertemuan, kepada media massa nasional Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI asal Dapil Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan kekaguman dan apresiasinya kepada para pengusaha muda yang memiliki kepedulian tinggi pada dunia wisata Gorontalo.

"Saya baru pertama kali bertemu anak-anak muda Indonesia luar biasa ini. Begitu mendengar rencana mereka itu, saya sangat gembira. Saya tentu sangat mendukung dan memberi semangat buat mereka. Pemerintah daerah melalui Sekda-nya juga sangat mendukung rencana mereka ini," ujar Fadel Muhammad.

Mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini juga menyampaikan bahwa Idepreneurs Club ini juga memiliki ide bagus dalam jangka panjang, yakni merelokasi rumah-rumah penduduk yang ada dekat-dekat pantai itu agar area wisata di Olele lebih luas.

"Saya rasa ide itu sangat bagus, membuat Olele tampak lapang sehingga bisa menampung banyak wisatawan dan bisa menghadirkan banyak fasilitas wisata yang menarik. Nah, bersama mereka, besok (Sabtu, 9/9-*red*), saya akan mengunjungi Olele untuk melihat dari dekat suasana kawasan wisata kebanggaan rakyat Gorontalo itu," tandasnya.

Dalam kesempatan.yang sama, mewakili idepreneurs Club, Parwis Nasution menceritakan awal mula tercetusnya

rencana mereka itu. “Pada awalnya sekitar sebulan lalu, kami berkunjung ke Olele. Kami melihat sarana ruang ganti untuk wisatawan sangat minim, bahkan tidak ada. Kami sampaikan ke teman-teman di organisasi dan sepakat untuk membantu penyediaan beberapa sarana untuk wisatawan,” ucapnya.

Setelah rencana dimatangkan, delegasi-pun dikirim untuk meminta restu dan izin kepada pemerintah daerah dan tokoh nasional, juga daerah Fadel Muhammad. “Kami bersyukur Bapak Fadel Muhammad dan pemerintah daerah mendukung, serta memberi semangat kepada kami,” pungkasnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Indonesia Enterpreneurs atau Idepre-neurs Club (IC) yang berdiri sejak tahun 2016 yang kini sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia adalah organisasi non-profit yang beranggotakan pengusaha muda dari berbagai bidang, seperti prop-erty, developer, tekstil, garmen, pabrik kimia, agriculture, teknologi dan juga pro-fessional, seperti notaris, pengacara, dokter dan lainnya. ❑

Kunjungan PW IGRA Provinsi DKI Jakarta

HNW Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Raudhatul Athfal

Sebagian besar guru honor yang sudah mengabdi lama, bertahun-tahun atau bahkan sudah puluhan tahun, benar-benar murni hanya mendapatkan honor sehingga sangat minim kesejahteraan.

WAKIL Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., minta pemerintah memerhatikan nasib para guru Raudhatul Athfal (RA)-sekolah setingkat Taman Kanak-Kanak, terutama terkait permasalahan kesejahtera-an dan status kepegawaian mereka.

Hal ini disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat menerima dan berdialog dengan sekitar 16 guru dari Pimpinan Wilayah Ikatan Guru Raudhatul Athfal (PW IGRA) Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Mewakili para guru RA, Ketua Pimpinan Wilayah IGRA DKI Jakarta, Azizah, menyampaikan berbagai keluhan, curhatan, dan aspirasi para guru, terutama terkait permasalahan status kepegawaian dan kesejahteraan. Bahkan, secara bergantian para guru dipersilahkan oleh HNW untuk

langsung menyampaikan aspirasinya.

“Kami datang berdialog dengan anggota Komisi VIII DPR dan Pimpinan MPR Bapak Hidayat, memang sangat ingin didengar dan dibantu permasalahan atau keluh kesah kami para guru RA yang berada di bawah Kementerian Agama ini. Sebab, dari total sekitar 5.018 orang guru RA , hanya 366

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

guru yang sudah PNS, lainnya masih sebagai guru honor. Dan, sebagian besar guru honor yang sudah mengabdi lama itu, benar-benar murni hanya mendapatkan honor sehingga sangat minim kesejahteraan mereka," terangnya.

Azizah berharap agar ada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan atau peningkatan status dari tenaga honor menjadi PPPK atau PNS, terutama yang sudah mengabdi bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Solusi lainnya, untuk mengangkat para honor guru RA ini adalah pemerintah bisa menyediakan akses kepada para guru RA untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang S-1, dan agar program KIP yang diluncurkan pemerintah sebagaimana biasa diberikan kepada murid-murid TK juga agar diberikan kepada murid-murid RA.

"Kami berharap, Bapak HNW mendengarkan aspirasi kami dan menyampaikannya kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti atau dicarikan solusi yang terbaik," tambahnya.

Merespon semua curhatan, aspirasi, keluhan para guru RA, anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa apa yang dikeluhkan para guru RA itu sudah menjadi perhatiannya dan sudah disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan mitra kerja, seperti Kementerian Agama dan Baznas.

"Memang hal tersebut sudah menjadi permasalahan dasar bangsa. Sejak tahun 2016, sebenarnya saya telah perjuangkan masalah-masalah ini di DPR, karena sangat terkait dengan masalah mendasar, yaitu tentang keadilan anggaran. Karena, belum terwujudnya keadilan anggaran, sehingga menimbulkan ketimpangan di mana anggaran untuk pendidikan di bawah Kemenag hanya mendapatkan 10% dari APBN untuk pendidikan di bawah Kemendikbud," ujarnya.

Dikatakan HNW, dirinya tidak terlalu mulus untuk meminta agar anggaran sekolah di bawah Kemenag disamakan atau sama rasa dengan anggaran sekolah umum di bawah Kemendikbud. Sebab, memang secara kuantitas sekolah umum di bawah Kemendikbud lebih banyak dibanding sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag.

"Lalu, yang kita minta adalah keadilan yang proporsional, baik untuk pendidikan umum, termasuk kesejahteraan guru sekolah umum dan pendidikan Agama di bawah Kemenag, serta kesejahteraan guru termasuk Guru RA," ucapnya.

Di sesi akhir, HNW sangat mengapresiasi dan menghargai para guru RA yang datang langsung untuk menyampaikan semua aspirasi dan permasalahannya. "Inilah rumah rakyat Indonesia, dan kami semua adalah wakil kalian semua, tentu kami nyaman mendengarkannya," katanya.

Terkait persoalan guru RA ini, HNW berharap kepada pemerintah pusat dan daerah agar mendengar dan memerhatikan keluhan yang disampaikan para guru RA ini. "Berikanlah keadilan yang proporsional kepada semua, agar tercipta keadilan yang pada ujungnya kesejahteraan untuk semua tanpa kecuali," pungkasnya. ❑

Tasyakuran Ulang Tahun ke-61 Bamsoet

Ingatkan Keberhasilan Bisa Diraih dengan Perjuangan

Punya prinsip, kalau kamu ingin hidup selamanya maka menulislah. “Jadi, itulah yang saya lakukan agar saya tetap hidup,” cerita Bamsoet saat acara Tasyakuran Ulang Tahun ke-61 pada Ahad malam (10/9/2023).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, perjalanan hidup dirinya hingga sampai seperti saat ini tidaklah mudah dan penuh liku. Terlahir dari keluarga tentara dengan ekonomi yang pas-pasan membuat Bamsoet kecil jauh dari hidup mewah. Sejak SD, SMP hingga SMA Bamsoet masuk sekolah negeri karena biayanya yang murah.

“Apa yang saya capai hari ini bukanlah sesuatu yang mudah dan instan. Perjuangan yang saya lalui penuh dengan darah, keringat dan air mata. Sejak SMP sudah ditinggal wafat ayah saya dan bersama ibu sebagai orang tua tunggal berusaha hidup mandiri dengan lebih banyak cerita dukanya ketimbang cerita sukanya,” ujar Bamsoet saat tasyakuran ulangtahun ke-61 dirinya di Jakarta, Ahad malam (10/9/23).

Hadir, antara lain Wakil Ketua MPR Syarif Hasan dan Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPR Lodewijk, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Fraksi PAN MPR Jon Erizal, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Syahroni, Pengacara senior Henry Yosodiningrat, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menlu Pahala Mansury.

Juga tampak hadir, Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani, Ketua BPK Isma Yatun didampingi para wakil ketua BPK Hendra Susanto dan Nyoman Adhi Suryadnyana, Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno, Ketua Umum FKPPI Ponco Sutowo, mantan Kepala BIN A.M. Hendropriyono, mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief, Bambang Trihatmodjo, Setiawan Djodi, Jerry Hermawan Lo, dan para pengurus IMI, KADIN, Hipmi serta komunitas otomotif mobil dan motor.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, lulus SMA

dirinya sebenarnya ingin melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tetapi gagal. Bamsoet kemudian memilih masuk kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jayabaya. Biaya masuk ke Universitas Jayabaya diperoleh dengan terlebih dahulu menjual beberapa petak sawah di kampung.

"Saat kuliah saya kos bersama teman-teman kuliah di Jayabaya, seperti mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Bursah Sarnubi, Eggy Sujana, dan lain-lain. Kamar saya hanya seukuran 2x3 meter. Mandi dengan nimba air dari sumur. Pas akhir bulan, datang tagihan bayar kos, kita suka saling main tunjuk-tunjukan siapa yang harus bayar kos," ujar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menuturkan, ada pengalaman semasa kuliah yang tidak terlupakan. Salah satunya, saat dirinya bersama rekan-rekan makan nasi goreng di suatu malam. Ketika hendak membayar, ternyata tidak ada satupun yang membawa uang. Akhirnya, Bamsoet diam-diam mengambil sepatu kets baru milik MS Kaban untuk membayar nasi goreng yang mereka makan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Saat menjadi jurnalis saya juga pernah menjual berbagai kebutuhan pokok. Seperti sayur, bawang merah, dan telur di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Karena tidak memiliki modal, saya terpaksa menggadaikan barang-barang yang dimiliki. Termasuk jam tangan kesayangan pemberian almarhum ayah saya," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, diusianya yang telah menginjak usia 61, tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap menulis, baik artikel di media massa ataupun menulis buku. Setiap harinya Bamsoet merespon isu-isu aktual yang terjadi di tanah air kemudian dikirim ke media massa. Bamsoet pun hingga kini telah menulis sebanyak 31 judul buku.

Akhir Agustus lalu, Bamsoet mendapatkan dua rekor penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), yakni sebagai 'Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku' serta sebagai 'Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Yang Merespon Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan'.

"Saya mempunyai prinsip 'kalau kamu ingin hidup selamanya maka menulislah'. Jadi itulah yang saya lakukan agar saya tetap hidup. Minimal pikiran-pikiran saya dapat dibaca dapat dipahami dan dapat diketahui oleh generasi penerus yang akan datang," pungkas Bamsoet. ❑

Pemulangan Prasasti Sangguran

Lestari Moerdijat: Perlu Political Will yang Kuat

Pemulangan Prasasti Sangguran ke Indonesia mengingat pentingnya nilai-nilai budaya dan catatan perjalanan sejarah bangsa yang terkandung di dalamnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI mengajak semua pihak, baik yang berada di Inggris maupun di Indonesia, untuk menciptakan sebuah gerakan agar mendorong proses pemulangan Prasasti Sangguran yang saat ini berada di Inggris Raya.

"Saya berharap, pemerintah kedua negara, Indonesia dan Inggris, memiliki political will yang kuat untuk memulangkan Prasasti Sangguran ke Indonesia mengingat pentingnya nilai-nilai budaya dan catatan perjalanan sejarah bangsa yang terkandung di dalamnya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/9).

Pernyataan itu disampaikan Lestari saat menjadi pembicara kunci secara daring pada diskusi bertema: 'Inscriptions on the Move: Prasasti, Repatriation, and Collaboration between Indonesia and

Britain' yang diselenggarakan Advanced Research Centre, University of Glasgow, Scotland, United Kingdom, Senin (18/9).

Menurut Lestari, pada Prasasti Sangguran banyak terkandung catatan penting terkait sistem atau tata kelola pemerintahan yang diterapkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.

Prasasti Sangguran, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, adalah salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Kuno (abad ke-8) yang ditemukan di Ngandat, sekarang menjadi Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Secara umum, ungkap Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II itu, catatan pada prasasti ini menceritakan penetapan Desa Sangguran sebagai daerah perdikan (sima), terkait hak kebebasan tanah tanpa pajak atau daerah merdeka.

Prasasti tersebut, tambah dia, juga memuat berbagai catatan yang mengungkap aspek sejarah dan sosial budaya masyarakat pada masa Mataram Kuno yang telah bergeser ke Jawa bagian timur.

Pada kesempatan itu, Rerie mengungkapkan, kini juga sedang berproses pemulangan Prasasti Pucangan yang saat ini tersimpan di Museum India. Pemerintah Indonesia dan India sudah melakukan sejumlah pembicaraan terkait hal itu.

Rerie berharap, proses pemulangan Prasasti Sangguran atau terkenal dengan sebutan Minto Stone, yang saat ini dimiliki oleh Viscount Timothy Melgund, putra sulung dari Earl of Minto VI dan berada di Skotlandia, Inggris Raya, bisa dimulai dengan menggalang dukungan sejumlah pihak.

Apalagi, tegas Rerie, Undang-Undang No. 11Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengamanatkan pemerintah dan setiap elemen bangsa untuk melestarikan setiap peninggalan sejarah melalui, antara lain merawat setiap ingatan kolektif yang diwarisi leluhur bangsa melalui benda budaya. ❑

Pelantikan dan Rakerda Al Khairiyah Kota Cilegon

Yandri Susanto: Pendidikan Memegang Peran Penting Bagi Kemajuan Bangsa

Al Khairiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus pada dunia pendidikan telah ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, H.Yandri Susanto S.Pt., menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam menentukan maju mundurnya sebuah bangsa. Dengan pendidikan maka kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat ditingkatkan. Karena SDM yang berkualitas merupakan aset utama dalam membangun bangsa dan negara.

Demikian disampaikan Yandri Susanto dalam acara Pelantikan dan Rakerda Al Khairiyah Kota Cilegon Sabtu (9/9/2023). Turut hadir Ketua Umum PB Al Khairiyah KH. Ali Mujahidin, Ketua DPD Al Khairiyah Cilegon Hambasi Ghalib, Ketua Yayasan Bai Mahdi Sholeh Ma'mun Ratu Rachmatuzakiyah, Pelantikan dan Rakerda Al Khairiyah Kota Cilegon Sabtu (9/9/2023) dan Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional Banten Agung Sukmana.

Al Khairiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkhidmat di bidang pendidikan telah ikut andil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, sebelum Indonesia merdeka, pendiri Al Khairiyah K.H. Brigjen Syam'un selain menjadi pejuang dan ulama juga menjadi guru bagi masyarakat Banten.

"Al Khairiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang fokus pada dunia pendidikan telah ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Maka sebagai bagian dari keluarga besar Al Khairiyah saya bangga dengan peran penting yang sudah dilakukan organisasi ini," ujar Wakil Ketua Umum PAN ini.

"Saya berharap, ratusan madrasah yang telah didirikan oleh Al Khairiyah dapat menjadi terdepan dengan menghasilkan lulusan yang dipersiapkan menjadi pemimpin. Karena, pasti ada waktunya bagi generasi muda menjadi pemimpin di masa yang akan datang," lanjut Yandri Susanto

Dalam kesempatan tersebut, Yandri juga mengajak agar semua guru dan tenaga pendidik yang bernaung dalam Al Khairiyah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dalam melaksanakan tugas mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa, para guru dan tenaga pendidik mendapatkan jaminan dan santunan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Saya mengajak bapak dan ibu guru, serta tenaga pendidik yang bernaung dalam Al Khairiyah, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga bapak dan ibu guru yang telah melaksanakan tugas mulia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa mendapatkan jaminan di bidang ketenagakerjaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mendapatkan santunan untuk meringankan beban," tutup Anggota DPR dari Dapil Banten II meliputi kota dan kabupaten serang serta Kota Cilegon. ❑

Pertemuan dengan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa

Yandri Susanto : Pendidikan Diniyah Perlu Dimasukkan dalam RPJPN 2025-2045

Upaya untuk mencapai kemandirian pangan nasional penting dimasukkan ke dalam RPJPN sehingga dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri kita tidak ketergantungan dari impor.

WAKIL Ketua MPR RI, H. Yandri Susanto S.Pt., menyampaikan pentingnya pendidikan diniyah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Pendidikan Diniyah sebagai lembaga pendidikan dalam rangka membangun karakter masyarakat yang menyelenggarakan pengembangan kemampuan dasar pendidikan agama Islam perlu dimasukkan ke dalam RPJPN.

"Pencanangan Wajib Belajar 13 Tahun dengan penambahan 1 tahun pra Sekolah Dasar dalam RPJPN merupakan sebuah ide yang sangat baik. Namun, perlu saya tambahkan pentingnya pendidikan diniyah dimasukkan dalam RPJPN, karena pendidikan diniyah merupakan landasan dasar pembetukan karakter anak," ujar Yandri Susanto saat melakukan pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, di Ruang Rapat Pimpinan MPR lantai 9 Gedung Nusantara III Senayan (12/9/2023).

Pertemuan antara Pimpinan MPR dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhamad, Anggota DPR Darul Siska dan Plt. Sesjen MPR Janedjri M. Gaffar.

Seusai mendengarkan pemaparan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, selain pentingnya pendidikan diniyah, Yandri juga mentitikberatkan pada perlunya kemandirian pangan nasional. Sehingga pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat tidak mengandalkan impor, cukup dengan hasil produksi dalam negeri.

"Upaya untuk mencapai kemandirian pangan nasional penting dimasukkan ke dalam RPJPN sehingga dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri kita tidak ketergantungan dari impor. Dengan mengurangi beban impor maka anggaran yang ada bisa difokuskan pada sektor yang lain, seperti kesehatan dan pendidikan," ujar Wakil Ketua Umum PAN ini.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Kita melihat saat ini banyak sawah yang berubah fungsi, sehingga perlu dikaji lebih mendalam terkait kebutuhan pangan nasional kita saat ini dan di masa yang akan datang," lanjut Anggota DPR Dapil Banten II ini.

Yandri mendukung penuh RPJPN 2025-2045 yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah melalui Kementrian PPN/ Bappenas, sehingga harapannya di tahun 2045 target yang tertuang bisa tercapai dan menciptakan Indonesia yang adil dan makmur di 100 tahun Indonesia merdeka.

"Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sehat, kenyang dan pintar. Sehingga kalau 3 kebutuhan dasar tersebut bisa terpenuhi saya optimistis target yang dicanangkan bisa tercapai di Indonesia Emas 2045," tutup Yandri. ❑

Sikap Politik GM FKPPI

Ahmad Basarah: Politik GM FKPPI Harus Berkiblat pada Politik Kebangsaan

Semua anggota Generasi Muda Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan Putera Puteri TNI Polri (GM FKPPI) punya hak politik yang sama, seperti rakyat Indonesia umumnya.

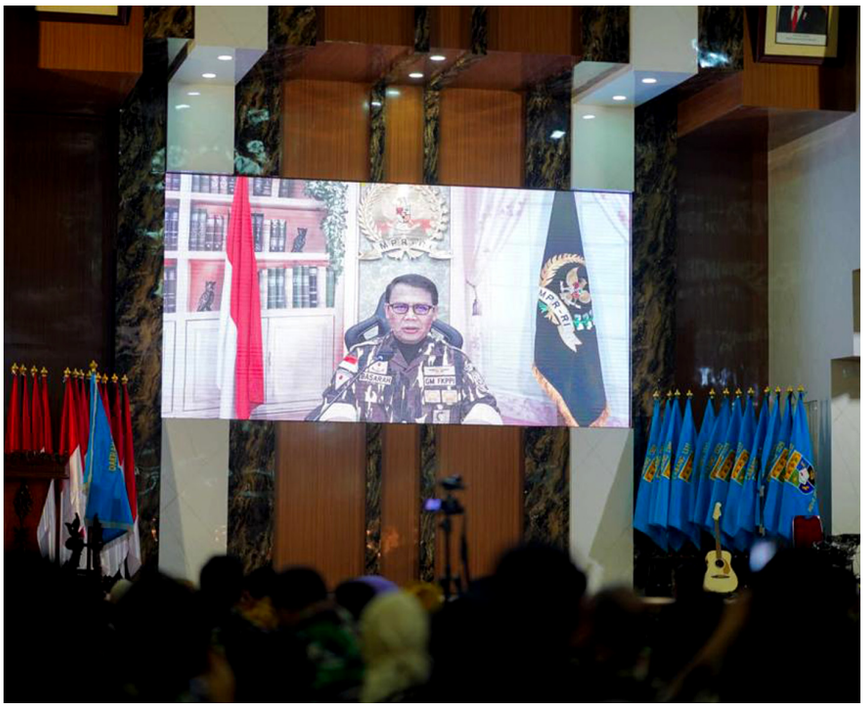

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA Dewan Pertimbangan Pusat (Wantimpus) Generasi Muda Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan dan Putera Puteri TNI Polri (GM FKPPI) yang juga Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, mengeluarkan maklumat bahwa sikap politik GM FKPPI hendaknya berkiblat sepenuhnya pada politik kenegaraan dan politik kebangsaan, bukan politik partisan, apalagi sektarian.

"Semua anggota GM FKPPI yang notabene adalah putera dan puteri purnawirawan dan putera puteri TNI dan Polri punya hak politik yang sama, seperti rakyat Indonesia umumnya. Namun, penting saya tegaskan, politik GM FKPPI secara kelembagaan haruslah sejalan dengan posisi politik TNI dan Polri saat ini, yakni tegak lurus dengan garis politik presiden sebagai panglima tertinggi TNI dan atasan langsung Kapolri yang juga menjalankan politik kenegaraan dan kebangsaan," tegas Ahmad Basarah, dalam maklumatnya yang disampaikan dalam rekaman video, Jumat (15/9).

Maklumat Kebangsaan itu disampaikan Ahmad Basarah dalam peringatan HUT ke-45 GM FKPPI itu di Balai Kartika Kodam V Brawijaya Surabaya , Jawa Timur, Jumat (15/9).

Maklumat itu disampaikan mengingat kini banyak kader GM FKPPI tersebar dan aktif di berbagai partai politik. Dalam suasana suhu politik yang memanas menjelang pemilu dan Pilpres 2024, sangat mungkin sejumlah anak bangsa terjebak dalam politik partisan yang cenderung membelah kesatuan dan persatuan bangsa.

"Dalam kondisi suhu politik yang memanas, semua kader GM FKPPI harus menjaga keteladanan dengan mengedepankan politik kebangsaan yang mempersatukan bangsa, serta menjauhkan diri dan bahkan harus melawan segala upaya politik devide et impera atau politik pecah belah dari berbagai pihak yang ingin merusak keutuhan bangsa," tegas Ahmad Basarah yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, beredar video di media sosial seorang jenderal purnawirawan berpidato di depan sejumlah anggota FKPPI sambil menegaskan hendaknya semua anggota FKPPI harus memilih calon presiden dari unsur TNI. Jika mereka tidak melakukannya, tindakan mereka bisa disebut keterlaluan.

GM FKPPI merupakan organisasi yang terdiri atas generasi muda yang merupakan anak kandung biologis dan ideologis TNI/Polri. Orang-orang tua mereka punya peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan stabilitas negara.

"Kader-kader GMFKPPI memiliki ikatan biologis dan ideologis dengan orang tua kami yang berasal dari TNI Pori, oleh karena itu dengan politik kebangsaan yang kita anut, GM FKPPI akan dapat memainkan peranan penting dalam turut serta secara aktif merawat, menjaga, dan mengawal persaudaraan dan persatuan bangsa," terang Ahmad Basarah.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Malang Raya, Jawa Timur, itu mengingatkan pentingnya menjaga integritas kebangsaan dalam berpolitik, seraya mengajak semua kader GM FKPPI terus berperan aktif dalam menyuksesan agenda demokrasi bangsa pemilu presiden dan legislatif tahun 2024 yang akan datang.

''Kader-kader GM FKPPI yang sekarang banyak tersebar di berbagai partai politik harus menjaga faktor perekat bangsa, bukan malah ikut mendukung apalagi terlibat pihak-pihak yang ingin membelah bangsa dan soliditas GM FKPPI hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya saja ," tegas Ahmad Basarah. ❑

Membahas Tradisi Baru di MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Badan Pengkajian MPR bersama akademisi Universitas Pancasila duduk bareng membahas Sidang Tahunan MPR. Disebutkan, Konvensi Ketatanegaraan dibutuhkan seiring dengan dinamika masyarakat, demokrasi, politik, dan perkembangan ketatanegaraan yang bergerak cepat.

BADAN Pengkajian MPR bekerja sama dengan Universitas Pancasila pada akhir Agustus menggelar focus group discussion (FGD). FGD yang digelar di salah satu hotel di Kota Depok, Jawa Barat, itu dihadiri oleh anggota Badan Pengkajian dan akademisi dari Universitas Pancasila.

Anggota Badan Pengkajian yang hadir adalah Tifatul Sembiring dari Fraksi PKS, Hasan Basri Agus dari Fraksi Partai Golkar, Andi Yuliani Paris dari Fraksi PAN, IGN Kesuma Kelakan dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Yanuar Prihatin dari Fraksi PKB. Sedang dari akademisi Universitas Pancasila, hadir Dr. Asep Bambang Hermanto, S.H.,M.H., dan Dr. Mochammad Isnaeni Ramdhan, S.H., M.H.

FGD yang merupakan salah satu metoda Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kali ini bertema Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR.

Dalam makalahnya, Asep Bambang Hermanto mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya MPR sesuai sistem ketatanegaraan pernah beberapa kali menyelenggarakan persidangan MPR yang nama sidangnya, yaitu Sidang Paripurna, Sidang Istimewa, Sidang Umum dan Sidang Tahunan.

Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR merupakan suatu tradisi baru dan biasanya diselenggarakan pada tanggal 15-16 Agustus jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. “Sidang Tahunan MPR ini digelar dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga Negara, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY, yang mana laporan kinerja tersebut dibacakan oleh masing-masing ketua lembaga negara yang dimulai hari pertama dibacakan oleh ketua MPR, sedangkan hari keduanya pada tanggal 16 Agustus, penyampaian laporan kinerja Presiden kepada publik”, ujarnya.

Lebih lanjut disebut, secara konstitusional mengenai Sidang MPR diatur dalam Pasal 2 (2) UUD, yang menyatakan: “MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota.” Kemudian timbul pertanyaannya: Apakah Sidang Tahunan MPR yang diadakan setiap bulan Agustus merupakan pelaksanaan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 atau konvensi ketatanegaraan?

Asep menuturkan, dalam perkembangannya Sidang Tahunan MPR sudah berjalan begitu baik, telah dimulai semenjak era Reformasi pada 1999 sampai saat ini masih berjalan secara rutin setiap tahunnya, yang mana peristiwa ini disebut Sidang Tahunan MPR secara rutin dilakukan setiap tahunnya sejak 2014 sampai saat ini (tahun 2023), sepertinya peristiwa tersebut sudah menjadi konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan adalah suatu kebiasaan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan negara. Praktik ini sudah dilakukan secara terus-menerus dan menjadi satu tradisi ketatanegaraan Indonesia.

Menurutnya, Sidang Tahunan MPR ini agendanya adalah

menyampaikan laporan kinerja lembaga lembaga-lembaga negara yang dibacakan oleh ketua lembaga Negara. MPR telah menyelenggarakan sidang tahunan ini adalah dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik (masyarakat).

"Sesungguhnya sidang tahunan MPR ini mempunyai dua (2) makna yang sangat penting," papar Asep. Menurut Asep, kedua makna itu adalah: Pertama, Sidang Tahunan MPR digunakan oleh para pelaksana kedaulatan rakyat, yakni lembaga-lembaga Negara (delapan lembaga sebagai main organ) untuk menyampaikan kinerjanya, pelaksanaan kewenangannya dan tugasnya kepada rakyat; Kedua, sidang tahunan MPR ini sebagai bentuk akuntabilitas dan trasparansi kepada publik/rakyat sebagai pemberi mandat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dengan digelarnya sidang tahunan oleh MPR, maka masyarakat/publik mendapatkan informasi tentang perkembangan kinerja lembaga negara selama kurun waktu satu tahun dalam mengemban tugasnya. Hal ini juga sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada publik/masyarakat. "Tentu harapannya adalah adanya feedback (masukan) dari masyarakat sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2) UUD, di mana lembaga-lembaga negara sebagai penyelenggara negara haruslah berjalan dengan baik sesuai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)", ujarnya.

Sidang tahunan MPR yang terus-menerus dilakukan setiap tahun sudah menjadi kesepakatan politik ketatanegaraan. "Sidang Tahunan sudah disepakati secara politik ketatanegaraan dan sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi ketatanegaraan. Penyampaian laporan kinerja lembaga-

lembaga negara pada sidang tahun MPR telah memiliki kekuatan dan melembaga, karena dilaksanakan secara terus-menerus setiap tahunnya, dan disinilah muncul nilai-nilai kebersamaan untuk membangun bangsa dan negara sesuai kesepakatan tersebut. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pacasila yang kita anut," paparnya.

Secara hukum konstitusi mengenal hukum dasar yang tertulis (written constitution) dan hukum dasar tidak tertulis (unwritten constitution). Hukum dasar tidak tertulis atau disebut non-legal constitutive meliputi: (1) peraturan kebiasaan (useges rule), (2) peraturan kesepahaman/kesepakatan (understandings rule), (3) peraturan adat istiadat (customs rule), (4) peraturan konvensi (conventions rule), keempat bentuk hukum itu disebut hukum dasar tidak tertulis. Dari keempat bentukan hukum dasar tidak tertulis, maka Sidang Tahunan MPR masuk dalam kategori peraturan konvensi ketatanegaraan (coventions rule). Jadi, kedudukan peraturan konvensi ketatanegaraan sesungguhnya setingkat dengan hukum dasar tertulis, yaitu konstitusi. Hampir semua negara demokrasi memiliki peraturan konvensi ketatanegaraan untuk melengkapi aturan dasar yang bersifat tertulis dan juga dapat mengisi kekosongan hukum ketatanegaraan.

Konvensi ketatanegaraan dibutuhkan seiring dengan dinamika masyarakat, demokrasi, politik, dan perkembangan ketatanegaraan yang bergerak cepat. Dari praktik ketatanegaraan, sepanjang konvensi masih berada dalam koridor konstitusional, konvensi ketatanegaraan dapat dipertimbangkan menjadi pilihan. Itulah sebabnya para penyelenggaran negara saat itu mempertimbangkan Sidang Tahunan MPR sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan. ❑

Berbagai Sidang dalam Sejarah MPR

Diungkap berbagai sidang dalam sejarah perjalanan MPR. Disebutkan, Sidang Tahunan MPR dengan agenda penyampaian laporan kinerja lembaga negara yang dibacakan oleh ketua-ketua lembaga negara di hadapan anggota MPR, tamu undangan, dan perwakilan masyarakat yang mendapat undangan agar dapat mengevaluasi kinerja.

MOCHAMAD Isnaeni Ramdhan dalam makalahnya mengatakan, hakikat MPR adalah sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang bersumber pada realisasi sila Pancasila, Pancasila tidak mengakomodasi demokrasi versi negara asing, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dirinya menjelaskan pengertian negara. Negara merupakan organisasi kekuasaan (machtsorganisatie) sehingga negara merupakan pusat kekuasaan, negara pula merupakan pusat jabatan-jabatan, karena negara sebagai organisasi jabatan (organisatie van ambten). Dalam Negara terdapat berbagai pusat kekuasaan yang terbagi pada Suprastruktur Politik (*socio-legal sphere*) serta Infrastruktur Politik (*socio-politico sphere*), seperti: partai politik, tokoh politik, kelompok penekan, dan golongan kepentingan, serta alat komunikasi politik.

Pria yang juga menjadi tenaga pengajar di Universitas Jayabaya itu mengungkap fakta sejarah Sidang MPR. Disebut, Era Sukarno dilakukan "Rapat Akbar", Era Soeharto dilakukan secara terbatas. Era Peralihan Presiden Soeharto-BJ Habibie tidak ada

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sidang MPR melantik Presiden, Sidang MPR menolak Pertanggungjawaban Habibie; Era Abdurahman Wachid tidak ada Sidang Tahunan MPR menilai pertanggungjawaban Presiden, Era Megawati juga tidak ada, Era reformasi diselenggarakan Sidang Tahunan.

Anggota Komisi Konstitusi dalam makalahnya menjelaskan mengenai Sidang Pengubahan UUD 1945. Disebutkan, teknik pengubahan UUD 1945 dengan cara amandemen telah disepakati oleh Rapat Panitia Adhoc III Badan Pekerja MPR pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagaimana dinyatakan oleh Amin Aryoso –sebagai Pimpinan Rapat- sebagai berikut: Assalamu'alaikum Wr.Wb., Selamat pagi. Saudara-saudara hari ini kita mulai acara, yaitu rapat kita nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana kita sudah memaklumi maka sepanjang pembicaraan yang sudah kita lakukan sejak awal, kita semua sudah menyepakati bahwa dilakukan

Amendemen terhadap Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 45 dengan pengertian bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak diubah, demikian pula dengan sistem Presidensiil Kabinet atau bentuk negara kesatuan juga tidak menjadi obyek dari Amandemen.

Dirinya mengutip dari Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Buku Kedua Jilid 6 Risalah Rapat Badan Pekerja AdHoc III Sidang Umum MPR RI (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1999), hlm 336-337.

Dalam penutup makalah, dirinya menyebut dasar hukum pengaturan sidang MPR harus dirumuskan dalam Ketetapan MPR bukan PeratutanTata Tertib MPR dan harus dibedakan antara Ketetapan dan Keputusan MPR.

Asep Bambang dalam makalah mengatakan, dengan adanya Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib MPR, Bab VII Persidangan dan Rapat, Bagian Kesatu tentang Persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 menyatakan: (1) "MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara". Kendati demikian, ada beberapa sidang atau rapat yang setiap tahun dilakukan oleh MPR lebih dari satu hari. (2). MPR menyeleggarakan sidang dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR". (3). MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan". (4). MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja". (5). MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kinerja pimpinan MPR".

Lebih lanjut dikatakan, dalam Pasal 63 ayat 4 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 di atas dijelaskan mengenai Sidang Tahunan MPR. Tujuan Sidang Tahunan MPR adalah sebagai forum bagi lembaga-lembaga negara untuk memaparkan laporan kerja masing-masing. "Setidaknya, Sidang Tahunan MPR dilakukan setiap tahun atau pada 15 hingga 16 Agustus, dimulai oleh laporan dari MPR hingga terakhir ditutup oleh laporan dari Presiden", ujarnya.

Selain berisi laporan lembaga-lembaga negara, Sidang Tahunan MPR juga diisi oleh pidato Presiden yang dilakukan pada hari terakhir sidang. Pidato Presiden tersebut disampaikan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Indonesia.

Peraturan Tata Tertib MPR tersebut bukan berarti mereduksi/menghilangkan kekuatan sebuah konvensi ketatanegaraan, karena yang menjadi tolok ukurnya adalah esensi, urgensi dan substansi dari penyelenggaran sidang tahunan itu sendiri sebagai konvensi ketatanegaraan. Sidang Tahunan MPR menempati kedudukan yang tinggi sebagai konvensi ketatanegaraan yang melengkapi norma UUD 1945 dalam praktik kehidupan bernegara, dan bukan hanya acara seremonial belaka. Hal ini juga dapat dilihat sebagai silaturahim permusyawaratan dan kebangsaan yang dihadiri para undangan dari perwakilan negara-negara sahabat, mantan mantan Presiden/Wakil Presiden , serta tokoh-tokoh nasional.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dalam penutup makalah, Asep Bambang menyebut, UUD 1945 secara ekplisit tidak menentukan adanya sidang tahunan. Tetapi di dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 terkandung makna adanya sidang tahunan, sebab pasal 2 ayat (2) merupakan ketentuan pokok mengenai gari-garis besar penyelenggaraan sidang yang dijadikan sebagai landasan pembentukan ketentuan mengenai pelaksanaan sidang dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Dalam praktik ketatanegaraan MPR telah beberapa kali menyeleggarakan sidang tahunan secara rutin, di luar sidang yang diselenggarakan setiap tanggal 15-16 Agustus, Sidang tahunan yang telah terlaksana dengan baik dan secara rutin setiap tahun sampai sekarang .Praktik yang baik ini merupakan suatu konvensi ketatanegaraan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi penyelenggaraan sidang tahunan ke depan, Lahirnya sidang tahunan ini diawali dengan adanya kesepakatan bersama sebagai politik ketatanegaraan yang merupakan tradisi yang baik dalam ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut disampaikan, dalam sidang tahunan ini agendanya adalah menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, oleh karena itu tidak ada ketentuan dalam konstitusi mengatur sidang tahunan tersebut. Sidang Tahunan MPR mempunyai makna yang sangat penting dalam ketatanegaraan, yaitu: Pertama, Sidang Tahunan MPR digunakan oleh para pelaksana kedaulatan rakyat, yakni lembaga-lembaga Negara (ada 8 lembaga Negara utama) untuk menyampaikan kinerja pelaksanaan kewenangannya dan tugasnya kepada rakyat; Kedua, Sidang Tahunan MPR sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada rakyat sebagai pemberi mandat.

"Penyampaian laporan kinerja lembaga Negara yang dibacakan oleh ketua-ketua lembaga negara dibagikan kepada anggota MPR, tamu undangan, dan perwakilan masyarakat yang mendapat undangan tersebut, agar dapat mengevaluasi kinerja tersebut", ujarnya. ❑

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI

Menjaga Hilirisasi SDA sebagai Visi-Misi Negara untuk Pembangunan Berkelanjutan

VISI-misi berbangsa-bernegara yang telah dimeteraikan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 wajib diejawantahkan melalui pembangunan berkelanjutan, pembangunan terencana dan dengan menetapkan target yang realistis. Visi-misi itu adalah juga amanat rakyat berdaulat yang hendaknya dituangkan dalam Pokok-Pokok Halauan Negara (PPHN) agar selalu dipatuhi sekaligus menjadi jaminan konstitusional bagi upaya berkelanjutan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang sudah menetapkan dengan tegas tentang visi-misi negara-bangsa tetap berlaku mutlak karena tidak diamandemen. Intisari dari visi-misi negara adalah merawat kemerdekaan, merawat kedaulatan rakyat, merawat persatuan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Semua orang sadar sepenuhnya bahwa mewujudkan visi-misi negara-bangsa itu tidak bisa instan, melainkan harus dengan kerja keras melalui proses pembangunan yang berkelanjutan. Realisasi pembangunan harus berpijak pada perencanaan yang futuristik, karena dari visi-misi negara pun mewajibkan setiap generasi untuk memperkirakan dan mengantisipasi perubahan di masa depan.

Jadi, jelas bahwa mewujudkan visi-misi negara tidak bisa eksperimental atau spekulatif. Kerja mewujudkan visi-misi itu tetap harus berpijak pada hasil adaptasi perubahan zaman, karena baik kebutuhan negara maupun kebutuhan rakyat akan selalu berubah sejalan perkembangan zaman. Karenanya, visi-misi negara pun harus futuristik.

Contoh paling nyata saat ini adalah perlunya percepatan pembangunan bagi tersedianya infrastruktur Tekonologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Lebih dari satu-dua dekade lalu, urgensi TIK mungkin tak pernah masuk dalam hitungan. Namun kini, urgensi percepatan menyediakan infrastruktur TIK tak terelakkan karena perubahan menuntut digitalisasi pada berbagai aspek kehidupan.

Lalu, oleh karena perkembangan siber (komputer dan informasi) ikut menghadirkan beragam ekses pada aspek ketahanan nasional, muncul kebutuhan berupa matra angkatan keempat, yakni angkatan siber. Masifnya serangan siber dan potensi perang siber membangun kesadaran bahwa urgensi kehadiran matra angkatan siber tidaklah mengada-ada.

Dengan memaknai hakekat Pembukaan UUD 1945 itu, setiap administrasi pemerintahan yang dipimpin presiden dan wakilnya diwajibkan untuk mewujudkan visi-misi itu dari waktu ke waktu. Perencanaan dan program pembangunan yang disusun dan ditawarkan harus berpijak pada visi-misi negara-bangsa. Kemakmuran serta kesejahteraan rakyat akan diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor melalui program berkelanjutan.

Dengan tetap berpijak pada Pembukaan UUD 1945, visi-misi negara harus selalu mengalami penyesuaian seturut perubahan zaman. Penyesuaian itu kemudian dituangkan dalam Pokok-Pokok Halauan Negara (PPHN) yang dirumuskan oleh MPR RI. Dengan begitu, PPHN

adalah amanat rakyat yang di dalamnya terkandung ketetapan atau perintah konstitusional untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

PPHN hendaknya dipahami sebagai dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya, amanat rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, berwenang merancang dan menetapkan garis besar tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini menjadi rujukan bagi presiden dan lembaga negara dalam menyusun berbagai program pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.

Setiap presiden boleh saja menawarkan ide atau gagasan baru, namun pijakannya tetaplah PPHN. Sebab, PPHN itu adalah amanat dari rakyat yang berdaulat, karena PPHN dirancang dan disepakati oleh semua elemen rakyat di MPR.Sudah barang tentu bahwa muatan PPHN itu sendiri diinspirasi oleh proses adaptasi perubahan zaman dengan ragam tantangannya.

Semua elemen bangsa telah diingatkan perihal ragam tantangan riel yang mengemuka akibat perubahan zaman. Ragam tantangan itu harus ditanggapi dengan proyeksi, perencanaan, dan kerja yang berfokus serta berkelanjutan. Tentu saja menjadi sangat relevan jika semua itu dikaitkan dengan tekad mewujudkan profil Indonesia Emas 2045, saat negara-bangsa memperingati satu abad usia proklamasi Kemerdekaan.

Di antara beragam tantangan itu, negara harus lebih peduli pada sektor ketahanan dan kemandiran di sektor pangan. Patut ditetapkan dalam PPHN karena perubahan pola iklim dengan segala eksesnya berpotensi melemahkan ketahanan pangan. Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah percepatan tersedianya energi baru terbarukan (EBT) untuk mengakhiri penggunaan energi fosil yang polutif.

Pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM), Indonesia harus segera menghadirkan SDM bertalenta digital dalam jumlah yang tidak sedikit. SDM bertalenta digital sangat dibutuhkan pada semua sektor, termasuk harus menjangkau digitalisasi di pedesaan. Digitalisasi di seluruh pelosok tanah air akan terwujud jika dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur TIK. Program penyediaan EBT maupun SDM bertalenta digital harus butuh konsistensi, sehingga layak pula ditetapkan dalam PPHN.

Sedangkan pada aspek pembangunan ekonomi dan Industri, negara-bangsa didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi dengan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Sudah begitu banyak kalkulasi yang menjelaskan SDA milik Indonesia begitu berharga karena dibutuhkan pasar dan komunitas internasional, kini dan di masa depan. Kalkulasi itulah yang menghadirkan momentum bagi Indonesia untuk melaksanakan program hilirisasi SDA.

Dan, jika hilirisasi potensi SDA dilaksanakan dengan konsisten, transformasi ekonomi Indonesia akan mengalami perepatan. Indonesia tidak lagi menjual bahan mentah, melainkan negara yang menjadikan investasi, industri serta produktivitas sebagai basis kekuatan ekonomi. Hilirisasi SDA akan menumbuhkembangkan ragam sub-sektor industri di dalam negeri. Sektor industri Indonesia terdorong melakukan pendalaman agar mampu mengolah ragam SDA itu menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar global.

Karena itu, momentum percepatan transformasi ekonomi dengan hilirisasi SDA jangan disia-siakan lagi. Kekayaan SDA Indonesia berlimpah. Dari emas, tembaga, bauksit, nikel, timah, batu bara hingga kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, teh dan rempah-rempah lainnya. Harus tumbuh keberanian dan kemauan mengelola dan mengolah SDA dengan penuh kebijaksanaan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Agar konsistensi hilirisasi SDA itu terjaga, agenda yang strategis ini layak ditetapkan dalam PPHN. Kebutuhan akan PPHN sejatinya adalah keniscayaan. Sebab PPHN menjadi jaminan konstitusional bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. ❑

Bamsoet Luncurkan Dua Buku:

PPHN Menuju Indonesia Emas 2045 dan News Maker-Satu Dasawarsa The Politician Senayan

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, meluncurkan dua buku sekaligus pada tanggal 10 September 2023 di Komplek SCBD Jakarta. Kedua buku yang dirilis bertepatan dengan ulangtahun ke-61 Bamsoet itu berjudul: 'PPHN Menuju Indonesia Emas 2045' dan 'News Maker' - Satu Dasawarsa The Politician Senayan'.

"Peluncuran buku 'PPHN Menuju Indonesia Emas 2045' dan 'News Maker' - Satu Dasawarsa The Politician Senayan' juga diikuti diskusi serta bedah buku dengan beberapa narasumber dari politisi dan influencer. Di antaranya, Menkopolhukam RI Mahfud, MD., Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, Rektor IPB Arief Satria, Kelirulogi/ Pendiri MURI Jaya Suprana, dan wartawan senior Wina Armada. Adapula influencer Deddy Corbuzier serta Baim Wong," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (8/9/23).

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, buku berjudul 'Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045' merupakan buku karyanya yang ke-31, dengan tema utama tentang urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bamsoet sendiri sebelumnya telah menulis tiga buku dengan tema PPHN, yaitu: 'Cegah Negara Tanpa Arah' (2021), 'Negara Butuh Haluan' (2021), dan buku 'PPHN Tanpa Amendemen' (2023).

"Buku 'Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045' kembali mengingatkan semua kalangan tentang urgensi haluan negara. Arah dan masa depan kehidupan berbangsa bernegara perlu dirumuskan dan disepakati oleh semua elemen bangsa. Dari rumusan program-program pembangunan dan kesepakatan tentang target-target pembangunan nasional itu akan lahir haluan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam bentuk PPHN," urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, ini menerangkan, untuk buku 'News Maker - Satu Dasawarsa The Politician Senayan' merupakan buku ke-3 yang ditulis rekan-rekan Bamsoet. Dua buku sebelumnya yang ditulis rekan-rekan Bamsoet adalah: 'Dari Wartawan ke Senayan' (2018) dan '60 Tahun Meniti Buih di Antara Karang' (2022).

Buku 'News Maker - Satu Dasawarsa The Politician Senayan' memuat rangkaian pernyataan publik Bamsoet sejak tahun 2006/ 2007. Sejak masih menjabat Komite Tetap bidang Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia yang kemudian berlanjut ketika terpilih sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009, menjadi Ketua Komisi III DPR RI, Ketua DPR RI, hingga saat ini menjabat sebagai Ketua MPR RI.

"Selain kumpulan pernyataan publik, di dalam buku 'Bambang Soesatyo 'News Maker —Satu Dasawarsa The Politician Senayan' juga dicantumkan beberapa tulisan atau opini saya terbaru yang sudah dipublikasi sejumlah media di dalam negeri. Ungkapan 'News Maker' untuk judul buku ini diambil dari penghargaan PWI News Maker Award yang dianugerahkan kepada saya pada tahun 2010," pungkas Bamsoet. ❑

Catatan
Nyleneh di Galeri MURI

Untuk menghargai prestasi yang unik, menarik, nyleneh, tidak biasa, bahkan 'gila', Jaya Suprana mendirikan MURI. Berdiri di masa Presiden Soeharto, aktivitas ini mendapat perhatian serius dari orang-orang dekat Istana. Dari waktu ke waktu semakin banyak orang, komunitas masyarakat, hingga pegawai pemerintahan, TNI, Polri, dan swasta, yang mendapat piagam dan medali dari MURI. Ketua MPR juga raih rekor MURI.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

RABU, 30 Agustus 2023, merupakan hari yang membahagiakan bagi Ketua MPR RI, Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. Pada hari itu dirinya menerima dua piagam dan satu medali dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan itu langsung diberikan oleh Pendiri MURI, Jaya Suprana, di Teater OSO, Galeri MURI, Kelapa Gading, Jakarta.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mendapat dua piagam, yaitu: Pertama, tercatat sebagai Ketua MPR yang paling banyak menulis buku. Kedua, sebagai sosok politisi yang setiap hari responsif menyikapi berbagai macam persoalan.

Saat memberi sambutan dalam prosesi pemberian penghargaan, politisi Partai Golkar itu menyampaikan apresiasi kepada MURI yang selalu memerhatikan berbagai capaian prestasi yang luar biasa dari anak bangsa sehingga masyarakat tahu. "Kita lihat tadi di film yang diputar serta yang ada di museum ini banyak capaian anak bangsa yang berhasil memecahkan rekor dunia, seperti membentangkan bendera terpanjang dan menari massal yang diikuti oleh ribuan penari," ujarnya. "Semua itu dilakukan dengan kerja keras dan kekompakan satu tim, sehingga tercapailah rekor dunia," tambahnya.

Mereka yang mendapat penghargaan dari MURI oleh Bamsoet disebut sebagai orang-orang yang berpikir dan bertindak 'out of the box'. Peristiwa besar dan unik tersebut, menurut Bamsoet, akan berlalu begitu saja bila tidak ada yang memerhatikan, menghargai, bahkan tidak akan menjadi kenangan apapun.

Terkait penghargaan yang diberikan padanya, Bamsoet mengakui, Jaya Suprana memerhatikan secara diam-diam atas apa yang selama ini dilakukan. Bamsoet mengakui, saat ini dia telah menulis buku sebanyak 31 judul. "Doakan akan terus lahir lagi pikiran-pikiran saya dalam bentuk buku di masa yang akan datang", ujar Ketua DPR ke-20 itu.

Diungkap oleh pria yang juga menjadi Ketua Umum IMI itu, kadang-kadang dirinya gemas pada sesuatu tetapi untuk menyampaikan tidak mungkin karena waktu yang sangat terbatas. Meski ada jumpa pers, seminar, namun hal-hal yang demikian hanya didengar orang selintas. Untuk itu, menurutnya, perlu dibukukan ide dan gagasan yang ada karena dirinya yakin dan percaya kalau kita ingin tetap/ ingin terus dilihat hidup maka menulislah. "Pikiran-pikiran kita itulah yang membuat hidup kita abadi," ujarnya.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sedang responsifnya dirinya menyikapi berbagai persoalan yang ada, hal demikian dikatakan dilakukan sejak dirinya menjadi wartawan. Diungkap setiap hari ia menulis rilis dan rilis itu disebarkan kepada para wartawan. "Mungkin setiap hari ada yang bosan, tetapi saya tidak peduli yang penting saya kirim," ujarnya sambil tertawa. "Dibaca atau tidak, dimuat atau tidak, pokoknya saya sampaikan kepada public," tambahnya.

Raihan prestasi yang dicatat oleh Bamseot tersebut membuat dirinya selanjutnya menghiasi Galeri MURI. Bila berkunjung di galeri yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, RT.18/ RW.8, West Kelapa Gading, Kelapa Gading, North Jakarta City, Jakarta 14240, itu kita bisa menyaksikan berbagai rekor yang berhasil dipecahkan atau dibuat oleh seseorang, komunitas, kelompok masyarakat, dan berbagai institusi pemerintahan atau swasta. Beragam capaian rekor yang ada dipajang di lemari-lemari yang ada di galeri museum.

Keragaman tersebut diungkap oleh Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Dr. H.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam laman *muri.org*. Dikatakan SBY, catatan rekor MURI menunjukkan semaraknya keragaman budaya dan berbagai potensi alam Indonesia, sekaligus gelora semangat anak bangsa dalam mengukir karsa dan karya prestasi terunggul di bidang keahlian masing-masing. Kemampuan bagian dari benteng nasionalisme kita dalam berkompetisi di era globalisasi masa kini.

Menurut catatan yang ada, MURI didirikan pada tanggal 27 Januari 1990 di kawasan perindustrian Jamu Jago, Srondol, Semarang Selatan, Jawa Tengah. MURI berdiri diprakarsai oleh Jaya Suprana. Di *muri.org*, disebutkan Jaya Suprana lahir di Denpasar pada 27 Januari 1949, tumbuh dan besar di Semarang, serta mengenyam pendidikan menengah dan perguruan tinggi di Jerman. Sebagai sosok berkepribadian unik, jenius, kreatif dan multitalenta, Jaya Suprana dikenal sebagai pengusaha, pianis, komponis, budayawan, penulis, presenter tv, kartunis, kelirumolog, humorolog, dan pemerhati masalah sosial. Jaya Suprana juga memiliki hubungan yang baik dengan berbagai tokoh politik, kesenian, dan keagamaan.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Alasan dirinya memprakarsai berdirinya MURI adalah demi menegakkan pilar-pilar kebanggaan nasional bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mampu dan mau menghargai karsa dan karya bukan bangsa asing, namun bangsa Indonesia. Dalam *Kompas.com, 18/08/2022, Pentingnya Rekor MURI bagi Masyarakat Indonesia,* diceritakan Jaya Suprana merasa sakit hati karena ditolak saat ia membawa batik ke kancah dunia. Dari penolakan tersebut, ia mendirikan MURI untuk mengapresiasi budaya dan warisan intelektual lokal.

Pendirian MURI bagi pemerintahan Orde Baru dianggap bukan main-main, buktinya saat peresmian, para menteri dan orang yang dekat dengan Presiden Soeharto hadir. Saat itu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Soepardjo Roestam dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Soedomo, Gubernur Jawa Tengah Ismail, dan Ibnu Sutowo hadir bahkan meresmikan MURI.

Dari sekian rekor yang tercatat, MURI pertama kali memberi penghargaan kepada pejalan kaki termuda, yakni Vinas V. Lindri Saputri. Di usianya yang baru berumur 6 tahun, Vinas berjalan kaki sejauh Semarang-Jakarta selama 26 hari. Rekor itu tercatat

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pada 14 Juli 1990.

Dari waktu ke waktu semakin banyak rekor yang tercatat. Jenis rekor yang ada pun beragam. Siapa saja yang mendapat pun 'merata'. Orang-orang yang di pelosok atau daerah-daerah yang jauh dari Jakarta juga semakin banyak yang mendapat piagam dan medali dari MURI.

Semakin banyaknya rekor tersebut membuat MURI menerbitkan buku yang memuat rekor dari tahun 1990 – 2008. MURI yang awal berdiri berakronim Museum Rekor Indonesia juga mencatat rekor skala dunia dan berganti nama menjadi Museum Rekor-Dunia Indonesia.

Dalam *Kompas.com, 18/08/2022*, Jaya Suprana mengungkapkan bahwa rekor-rekor yang dicatat kebanyakan sifatnya kuantitas, bukan kualitas. Akan tetapi, rekor-rekor tersebut menjadi pemantik atas kesadaran masyarakat terkait budaya dan warisan intelektualnya. Terlebih, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan warisan intelektual.

Semakin banyaknya minat masyarakat mendapat piagam dari MURI dan ingin mengetahui koleksi yang ada, membuat Jaya Suprana membangun galeri dan museum MURI di Magelang, Malang, dan Jakarta pada 14 Agustus 2005 di Kawasan Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, diresmikan Galeri Muri. Pada tahun 2013. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani, meresmikan Galeri MURI Jakarta yang berlokasi di Mall of Indonesia. Pada tahun 2019, bertempat di Jatim Park 3, Batu, Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meresmikan Galeri MURI.

Dalam catatan di *Kompas.com, 18/08/2022, Pentingnya Rekor MURI bagi Masyarakat Indonesia*, ditulis, respons positif tersebut layak didapat MURI karena mampu mewadahi dan memfasilitasi keanekaragaman budaya, karya, warisan intelektual, dan prestasi masyarakat. Ini dikarenakan MURI tidak melihat lapisan, kalangan, dan asal daerah untuk mengapresiasi. Bahkan, MURI terus memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk terus berprestasi seluas-luasnya. Hal ini adalah prinsip yang dipegang Jaya Suprana sebagai pendiri agar MURI mampu mewujudkan kebinnekaan Indonesia. Dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia dapat berprestasi dan bangga karena diapresiasi.

Dalam *muri.org*, disebut MURI yang didirikan pada tahun 1990 atas prakarsa Jaya Suprana dan dukungan kelompok perusahaan Jamu Jago secara sangat sederhana dan tanpa target yang muluk-muluk ternyata berhasil dikembangkan oleh Aylawati Sarwono dengan dukungan laskar pejuang yang terdiri dari para tatalaksanawan profesional yang tergabung di Institut Prestasi Nusantara hingga menjadi lembaga yang menyatupadu pada kehidupan masyarakat Indonesia yang bangga atas prestasi superlatif karsa dan karya peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Bila kita ingin mengetahui rekor apa saja yang tercatat di MURI, kitab bisa menjelajah di *muri.org*. Di sana kita bisa mencari rekor-rekor yang ada sesuai dengan katagori yang

kita cari, apakah katagori ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan olahraga, ekonomi dan industri, kemanusiaan dan lingkungan hidup, seni dan budaya, perintis dan penemuan, serta ketatanegaraan.

Di laman tersebut tidak hanya menyediakan pernak-pernik MURI, namun juga menyediakan *form* bagi siapa saja yang aktivitasnya ingin tercatat di MURI. Jadi, silahkan siapa saja ingin kegiatan yang dilakukan, baik perseorangan maupun ramai-ramai, yang sifatnya unik, menarik, dan tidak biasa: dicatat sejarah, bisa menghubungi museum ini. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Berlomba Meraih Rekor MURI

Berbagai pemerintah daerah, institusi pendidikan dan lainnya, melakukan aktivitas massal yang menghebohkan. Aktivitas itu dilakukan selain untuk mengungkit kreatifitas, juga untuk melestarikan budaya asli masyarakat. Kegiatan mereka tercatat di MURI.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Penghafal Juz 30 Terbanyak

Sebanyak 7.260 orang yang terdiri pelajar, guru, dan Kafilah MTQ, memenuhi Masjid Al Mukarram, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Oktober 2019. Mereka pada hari itu, sebelum dilakukan prosesi pembukaan MTQ tingkat kabupaten, melafalkan lantunan ayat-ayat suci Alqur'an.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah H. Masrawan, Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kapuas H. Ahmad Bahruni, hadir dalam acara itu.

Dari kegiatan tersebut, membaca massal Alquran membuat MURI memberi penghargaan dengan katagori Penghafal Juz 30 Terbanyak. Dalam laman *kemenag.go.id*, Ben Ibrahim mengatakan pemecahan rekor MURI ini sekaligus sebagai awal dimulainya program Tuntas Baca Tulis Alqur'an (TBTQ) di Kabupaten Kapuas.

Sedang menurut Ahmad Bahruni, partisipasi itu bukan hanya untuk memecahan rekor nasional namun merupakan bentuk dukungan jajaran Kemenag Kapuas untuk meningkatkan kualitas baca tulis Alqur'an di Kapuas. Dikatakan, membaca Alqur'an adalah ibadah dan akan membawa berkah. Ribuan pelajar dan guru madrasah ikut dalam kegiatan ini agar kehidupan kita semakin berkah dan bermanfaat.

Dikatakan, Sekretaris LPTQ Kapuas H. Suwarno Muriyat, pemecahan rekor MURI adalah bentuk apresiasi kemampuan pelajar dalam baca tulis Alqur'an. Kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah dan Kementerian Agama. "Ini titik awal pelaksanaan program tuntas baca tulis Alqur'an di Kabupaten Kapuas", ujarnya seperti termuat dalam *kemenag.go.id*. *

Maba UB Bikin Esai Terbanyak

Menjadi tradisi di Univeristas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, bagi mahasiswa baru (maba) tahun 2023, wajib mengikuti Rangkaian Jelajah Almamater (RAJA Brawijaya). Dalam kegiatan tersebut digelar Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKK-MB) dan Open

House Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Wakil Rektor III Dr. Setiawan Noerdajasakti dalam sambutan mengatakan, tujuan kegiatan open house adalah untuk memperkenalkan kepada mahasiswa baru dengan berbagai UKM yang ada di UB. Saat ini ada sebanyak 53 UKM di UB. Mahasiswa diharapkan bergabung pada UKM yang sesuai dengan minat dan bakat yang akan dikembangkan.

Saat *open house*, yang diikuti 15,488 maba, mereka menampilkan berbagai atraksi kegiatan, di antaranya atraksi *paper mob* dan pemecahan rekor MURI untuk pengumpulan esai secara serempak dengan tema *lima domain Indeks Pengembangan Pemuda* (IPP). Lebih lanjut dalam laman *prasetya.ub.ac.id*, diceritakan, sebanyak 15.488 ribu maba membuat esai.

Setelah melalui serangkaian penilaian, tim Juri Rekor MURI menetapkan, 15.488 ribu maba UB memecahkan rekor membuatan esai terbanyak secara serempak. Sebanyak 17 atraksi *paper mob* mewarnai pelaksanaan *open house* dan pemecahan rekor MURI tersebut. *

Purbalingga Panen Rekor MURI

Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, panen rekor MURI. Beberapa waktu yang lalu, di kabupaten itu, MURI mencatat ada 2 rekor baru terciptakan dan 1 rekor memecahkan rekor yang telah ada. Dalam *ppid.purbalinggakab.go.id*, disebut, untuk

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

2 rekor MURI baru, *pertama* pemecahan rekor untuk pasangan bupati dan wakil bupati yang memiliki tanggal dan bulan lahir yang sama, yakni tanggal 11 April. *Kedua* rekor perayaan ulang tahun bersama tanggal lahir dengan jumlah terbanyak, yakni 3.202 orang. Sedang 1 rekor Muri terpecahkan untuk pagelaran wayang dengan kelir terpanjang.

Manager eksekutif Muri, Sri Widayati, dalam laman milik pemerintah daerah itu mengatakan, untuk rekor yang pertama kondisi tersebut memang belum tercatat di MURI untuk pasangan pimpinan daerah untuk hari ulang tahun yang sama dan pada hari itu merupakan yang pertama tercatat di MURI dan tercatat sebagai rekor ke 7381.

Pada perayaan ulang tahun yang dilakukan pasangan bupati dan wakil bupati ternyata tidak hanya dilakukan berdua, namun mengajak masyarakat yang mempunyai tanggal lahir yang sama, yakni tanggal 11 April. Setelah data yang terhimpun ada sebanyak 3.202 yang hari ini bersama-sama berulang tahun dengan bupati dan wakil bupati.

Sedang rekor MURI yang mencatat pagelaran wayang dengan kelir terpanjang, yakni 56,5 meter. Rekor itu sekaligus menumbangkan rekor sebelumnya yang dipegang Bupati Wonogiri, Begug Purnomosidi, dengan panjang 51 meter. *

Surabaya Pecahkan Rekor Tari Remo Terbanyak

Kota Surabaya, Jawa Timur, bertambah lagi prestasinya, di akhir tahun 2022, kota yang dijuluki Kota Pahlawan itu mendapat penghargaan dari MURI. MURI memberi penghargaan kepada Surabaya, sebab di sana digelar Tari Remo Massal. Tari itu diikuti oleh 65.946 peserta yang terdiri dari pelajar.

Dalam *surabaya.go.id*. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, tari Remo ini digelar secara massal untuk melestarikan budaya asli Surabaya yang di dalamnya mempunyai makna kepahlawanan. Dengan menari Remo massal, secara tidak langsung jiwa kepahlawanan itu akan tertanam di dalam diri para pelajar Kota Pahlawan.

Lebih lanjut disampaikan, rekor MURI yang

diraih, tidak hanya dipersembahkan untuk Pemkot Surabaya akan tetapi untuk seluruh warga yang sudah mau menjaga kekompakan dan budaya di dalam dirinya. Dengan filosofi tari Remo, karakter kita pasti akan terbentuk. Tari massal itu digelar di 10 ikon bersejarah dan 2 jembatan di Surabaya. *

Tradisi Mangenta Pecahkan MURI

Dalam *mediacenter.palangkaraya.go.id*, 22 Mei 2022, diberitakan pemecahan rekor MURI terhadap tradisi Mangenta, menurut Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan warisan budaya nenek moyang, untuk generasi yang akan datang. Ke depan, Pemerintah Kalimantan Tengah akan terus berupaya berinovasi memperkenalkan tradisi dan kebudayaan lokal lainnya kepada masyarakat di Indonesia maupun mancanegara.

Pemecahan rekor MURI itu saat digelar Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) dengan kategori peserta terbanyak. Sugianto Sabran menyebutkan, Mangenta merupakan tradisi memasak khas suku Dayak sebagai ungkapan syukur pada saat musim panen tiba yang perlu dilestarikan.

Di laman itu diungkap, dengan dilaksanakannya FBIM, diharapkan mampu menggugah masyarakat bisa lebih mengenal kuliner khas daerah Kalimantan Tengah, yang selanjutnya ada upaya untuk pengembangannya menjadi aneka varian makanan khas Bumi Tambun Bungai, agar lebih menarik dan diminati oleh masyarakat.

Senior Manager MURI, Awan Rahargo mengatakan, pencatatan rekor MURI Festival Mangenta dengan kategori terbanyak ini merupakan salah satu wujud pelestarian budaya nenek moyang yang harus dilakukan, agar tidak hilang dan tetap dapat diketahui oleh masyarakat, terutama generasi muda yang akan datang. Hal demikian disampaikan dalam laman di atas. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Inspirasi dari The Guinness Book of Records

Bermula dari debat soal burung apa yang paling cepat terbangnya, lahirlah buku dan museum The Guinness Book of Records. Buku yang disusun oleh si kembar McWhirters itu mampu menjadi buku popular dan terlaris sejak edisi pertama. Agar keuntungan lebih melimpah, Perusahaan Bir Guinness tidak hanya mencetak buku, namun juga menciptakan waralaba museum. Pada masa booming buku dan serial televisi Record Breakers, Jaya Suprana tinggal di Jerman. Aktivitas yang mencatat berbagai macam rekor 'ter' itulah yang menginspirasi dirinya.

PERBURUAN yang dilakukan oleh Hugh Beaver dan kawan-kawannya di Muara Sungai Slaney, County Wexford, Irlandia, 10 November 1951, itu pecah konsentrasinya. Mereka tidak fokus lagi membidik satwa yang ada, namun malah berdebat soal burung apa yang paling cepat terbangnya. Mereka mendebatkan apakah spesies pluvialis apricaria atau familia Tetraonidae.

Selepas berburu, menjelang tidur, Managing Director Guinness itu kecewa dengan buku rujukan tentang burung-burung yang ada, sebab tidak mengungkap burung apa yang paling cepatnya terbangnya. "Kalau saja ada pihak yang mau menerbitkan buku yang menjadi rujukan itu, saya kira buku tersebut bisa menjadi popular," ujarnya seperti termuat dalam *Wikipedia*.

Untuk menjawab rasa penasaran, Beaver memerintahkan salah satu bawahannya yang ada di perusahaan bir itu, yakni Christopher Chataway, untuk membuat klasifikasi apa-apa yang serba cepat, hebat, dan kuat, pokoknya yang 'ter' dalam suatu buku. Buku yang ada akan berisi catatan berbagai rekor dunia.

Rupanya, Chataway tidak bisa sendiri menyusun buku rekor dunia. Dirinya mengajak kawannya yang disebut satu almamater dan kembar, yakni Norris dan Ross McWhirter, untuk menyusun buku itu. Ajakan Chataway pada si kembar itu sangat tepat sebab mereka adalah agensi fakta di London. Ada yang menyebut mereka adalah wartawan.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

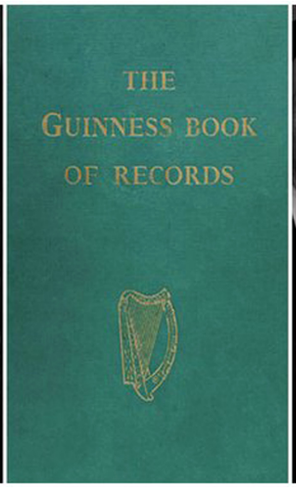

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Apa yang diinginkan oleh Beaver untuk membuat buku yang mencatat rekor dunia akhirnya rampung. Buku pesanannya diberi judul *The Guinness Book of Records* dan pada Agustus 1954/1955, buku yang ada dicetak sebanyak seribu eksemplar. Di *Wikipedia* disebut buku setebal 198 halaman itu mendapat respon yang antusias dari masyarakat hingga menduduki buku yang berada di urutan pertama yang paling banyak dibaca. Di catatan disebut *The Guinness Book of Records* diterbitkan Guinness.

Sukses buku edisi pertama membuat mereka membikin kantor sendiri yang beralamat di 107 Fleet Street. Selanjutnya setiap tahun buku serupa dicetak dan dijual. Buku terbitan kedua disebut terjual hingga 70 ribu eksemplar.

Setiap edisi, mereka menorehkan catatan rekor dunia yang baru dan agar buku yang dicetak laris maka buku tersebut diluncurkan pada bulan-bulan menjelang Natal. Buku tersebut tidak hanya memberi keuntungan bagi Guinness, namun juga melambungkan nama McWhirters bersaudara. Mereka tidak menyangka buku itu menjadi buku terlaris dan menjadi satu merek paling dikenal dan terpercaya di dunia.

McWhirters bersaudara disebut memiliki daya ingat yang luar biasa. Kisah hidupnya pernah diangkat dalam serial televisi yang berjudul: *Record Breakers*. Dalam tayangan itu, anak-anak dipersilahkan menanyakan berbagai jenis rekor dunia kepada Ross dan Norris. Sebab memiliki daya ingat yang luar biasa maka setiap pertanyaan bisa dijawab dengan benar.

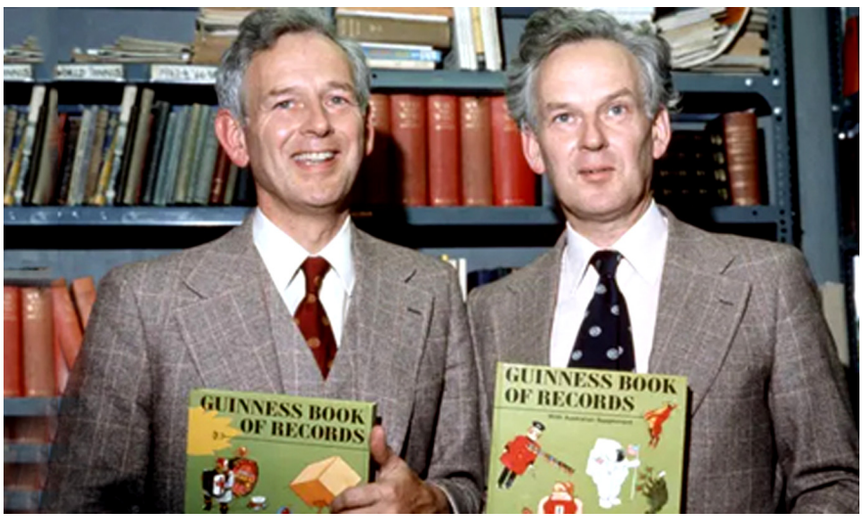

Sayang dalam perjalanan hidupnya, salah satu dari mereka, yakni Ross, tewas dibunuh Tentara Republik Irlandia. Meski tanpa Ross, Norris melanjutkan tayangan serupa di televisi dengan nama program *Norris on the Spot*.

Dalam *Wikipedia* diungkap, isi *Guinness Book of Records* banyak berfokus pada prestasi yang bisa dicapai manusia, seperti rekor angkat berat, rekor melempar telur paling jauh, hingga jumlah *hot dog* yang bisa dimakan dalam 10 menit. Buku itu juga mencatat tentang orang tertinggi, tumor terberat, tanaman paling beracun, sungai paling pendek, serial televisi paling bertahan lama, wiraniaga paling berhasil di dunia, hingga judul dan nama lagu terpanjang.

Seiring perjalanan waktu, ada perubahan manajemen dalam usaha buku rekor dunia. Pada tahun 1995, Norris tidak lagi menduduki sebagai konsultan. Perubahan manajemen juga terjadi pada bentuk buku, di mana buku yang ada berubah format dari buku kurang ilustrasi menjadi buku yang penuh foto dan ilustrasi warna-warni.

Meski mengalami banyak perubahan, namun disebut perubahan yang ada tidak membawa pengaruh pada kesuksesan buku *Guinness World Records*. Buku rekor dunia itu di *Wikipedia* disebut sebagai buku berhak cipta yang paling laris di dunia dan prestasi itu dicatat sebagai entri tersendiri pada salah satu halamannya.

Agar keuntungan yang didapat tidak hanya dari buku maka Guinness menjual sistem waralaba untuk pendirian museum kecil yang memamerkan rekor dunia yang dicatat dalam buku rekor Guinness. Waralaba yang ditawarkan rupanya juga mendapat respon yang tinggi, buktinya banyak Museum Guinness yang tersebar di berbagai kota dunia seperti di Tokyo, Surfers Paradise, Kopenhagen, San Francisco, San Antonio, Niagara Falls, Hollywood, Atlantic City, Myrtle Beach, South Carolina, Gatlinburg, Tennessee. ❑

AWG*/dari berbagai sumber*

Agung Syahril
Ketua IKN Youth Forum

IKN Semoga Berdampak Baik

TERLEPAS dari pro dan kontra, pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) sudah ditetapkan sesuai UU Nomer 3 Tahun 2022. Dan, IKN berada di Kalimantan Timur (Kaltim).

Harapan kami, pemuda se-Kalimantan Timur, sebenarnya ingin terlibat banyak dalam pembangunan IKN. Jangan sampai kita kalah saing dengan pemuda dari luar Kalimantan, seperti Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Intinya, kami pemuda Kaltim ingin terlibat atau berperan banyak dalam pembangunan IKN. Begitu pula pasca IKN terbangun dan berjalan, para pemuda Kaltim juga ingin berkiprah.

Dipilihnya Kaltim sebagai lokasi IKN merupakan kepercayaan pemerintah pusat kepada rakyat Kalimantan, sehingga apa yang kami harapkan tadi, diharapkan didengarkan dan diakomodir, bukan hanya demi IKN tapi secara luas untuk Indonesia.

Kami semua berharap , IKN akan berdampak baik buat seluruh rakyat Indonesia. ❑

DER

Suji Kartono
Ketua Aliansi Buruh Jakarta

Berharap Pemilu 2024 Kondisi Buruh Jadi Lebih Baik

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

PERHELATAN Pemilu 2024 untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin nasional tentu saja semua berharap akan berdampak baik. Begitu juga dengan kami, para buruh Indonesia, yang ikut memberikan suara, kami berharap nasib kami akan lebih diperhatikan.

Bentuk perhatiannya itu, antara lain dari pembuatan UU tentang Buruh. Kami berharap, UU itu nantinya akan memberi kebaikan kepada buruh dan pengusaha, sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan atau merasa tidak diperhatikan, bahkan ditindas.

Pemilu 2024 adalah harapan para buruh, karena kami sudah capek dengan berbagai demo, berbagai tuntutan untuk perbaikan nasib para buruh. Untuk itu, ke depan kepada pimpinan nasional dan wakil rakyat yang baru, kami berharap nasib kami diperjuangkan. Itu saja. ❑

DER

Damianus Nadu

Benteng Terakhir Hutan Adat *Pikul Pangajid*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KEBERANIAN bukan satu-satunya yang harus dimiliki oleh seseorang agar sukses mengejar mimpi. Tetapi, perjuangan mengejar cita-cita juga butuh perhitungan yang tepat. Begitulah sebagian rahasia sukses seorang Damianus Nadu (63) mempertahankan Hutan Adat Pikul Pangajid di Dusun Melayang, Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Pikul Pangajid adalah hutan adat seluas 100 hektar. Hitan ini menyimpan kekayaan hayati berlimpah. Di sana terdapat 99 jenis pohon yang sebagian di antaranya hampir punah. Seperti, bengkirai (*Shorea leavis*) dan gaharu (*Aquilaria malaccensis*).

Di dalam Pikul Pangajid terdapat banyak pohon tengkawang yang buahnya bisa diolah menjadi lemak nabati, bumbu masak, rempah, dan kosmetik, sementara bunganya bisa diolah menjadi butter nabati. Selain itu, ada berbagai jenis tanaman obat yang biasa digunakan dalam pengobatan tradisional Dayak. Nadu, yang juga seorang tabib Dayak, sering mengambil tanaman obat di hutan itu.

Di dekat Hutan Pikul teredapat air terjun, dan hutan adat itulah yang selama ini menjadi penyangga sumber air. Jika keberadaan hutan terusik niscaya keberadaan air terjun pun akan punah.

Kisah heroisme Nadu mempertahankan hutan adat Pikul terjadi sejak pertengahan tahun 80-an. Saat itu sebuah perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) tengah mencari kawasan yang bisa dijarah secara sewenang-wenang, sehingga aneka pohon bisa diambil kayunya. Pria kelahiran Bengkayang, 6 Oktober 1959, itu tahu persis praktik tersebut, karena pernah mengoperasikan mesin pemotong kayu perusahaan pemegang HPH.

Melihat kenyataan itu, Nadu merasa gusar karena keselamatan hutan adat Pikul terancam. Karena potensi ancaman tersebut, tahun 1988, Nadu keluar dari perusahaan HPH agar bisa konsentrasi berjuang mempertahankan hutan adat, meski saat itu gaji yang diterima terbilang sangat besar, tapi Nadu tidak mau berkompromi.

Tahun 1992 perjuangan ayah empat anak hasil pernikahannya dengan Rosalina Tupap relatif tertolong, karena ia terpilih menjadi Kepala Dusun Melayang. Jabatan tersebut

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

dia gunakan untuk misi penyelamatan hutan. Risiko itu ia ambil meskipun harus menghadapi orang-orang kuat di belakang para pembalak kayu.

Salah satu tantangan yang harus dihadapinya terjadi pada tahun 1996. Saat itu terdapat sebuah perusahaan yang berupaya membuka lahan untuk perkebunan sawit. Merasa ada firasat buruk di belakang rencana tersebut, Nadu tidak tinggal diam. Pada acara sosialisasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan dan tokoh masyarakat, Nadu menegaskan sikap kerasnya. Tak akan melepas hutan adat dijarah siapapun.

Karena sikap kerasnya itu, jumlah musuh Nadu menjadi semakin banyak. Satu kali, tepat waktu subuh, rumah Nadu kedatangan tamu tak diundang. Mereka adalah oknum aparatur militer bersenjata lengkap yang akan menangkapnya. Melihat kejadian tersebut, seluruh anggota keluarganya menangis, tetapi tidak dengan Nadu. Ia tidak merengek seperti anak kecil. Nadu tetap tenang, dan sekali lagi menyatakan sikap tegasnya.

"Jika bapak-bapak tetap memaksa mau mengambil sisa hutan kami, mandau dan lantak akan kami angkat," kata Nadu mengulang kisah yang ditemuinya ketika itu.

Iming-iming Gaji Besar

Sikap tegas dan keras yang ditunjukkan Nadu tidak pernah luntur. Tekadnya mempertahankan hutan adat sudah bulat. Meski, ia banyak diberi iming-iming agar mau diajak berkompromi. Salah satunya, datang dari Perusahaan Pemegang HPH yang dulu pernah mempekerjakan Nadu. Dengan iming-iming bakal memberi upah yang lebih besar, mereka meminta Nadu kembali bekerja. Namun, godaan itupun tak mempan. Nadu bertahan dengan sikapnya, akan terus menjaga hutan adat.

Semakin lama, perusahaan yang berusaha menyerobot hutan adat Pikul semakin banyak. Nadu pun segera mengambil langkah strategis menyelamatkan hutan. Ia pergi menemui Bupati Bengkayang, Jacobus Luna, untuk membicarakan isu tersebut. Bupati memberi saran agar hutan itu dijadikan hutan adat agar terlindungi.

Anjuran tersebut segera diiyakan oleh masyarakat. Tahun 2002 Bupati Bengkayang mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan Hutan Adat Pengajit (nama lain Hutan Adat Pikul). Sejak itu pembalakan liar berhenti. Pada saat bersamaan, warga juga mulai sadar pentingnya menjaga hutan.

Tahun 2017 Nadu ke Jakarta didampingi Lembaga Intan (Institut Riset dan Pengembangan Hasil Hutan) untuk mengurus SK Hutan Adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setahun kemudian, keluarlah SK Hutan Adat yang diberi nama Hutan Adat Pikul dari KLHK. SK itu diterima di Istana Negara.

Untuk memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, Nadu menggalakkan pemanfaatan buah tengkawang. Mereka lantas mendirikan Koperasi Tengkawang Layar. Koperasi itulah yang selanjutnya mengolah bunga Tengkawang menjadi butter nabati.

Selain produk turunan pohon Tengkawang, hutan adat juga menghasilkan aneka buah. Saat musim buah tiba, warga bisa mengambil buah hutan yang telah jatuh untuk dikonsumsi. Yang penting pohonnya tidak ditebang dan dipanjat.

Perjuangan Nadu mempertahankan Hutan Adat dirasakan benar manfaatnya oleh masyarakat. Selain memberi penghasilan tambahan pada warga, hutan itu juga menjadi wahana penelitian dan pendidikan. Berkat dedikasinya menyelamatkan hutan, ia diberi sejumlah penghargaan, salah satunya Kalpataru Tahun 2021 Kategori Perintis Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ❑

MBO

Ramai-Ramai Menolak Usulan BNPT

Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar rumah ibadah dikontrol pemerintah menimbulkan reaksi dari berbagai fraksi di parlemen. Para politisi menolak usulan itu dengan segudang alasan. Berikut pendapat para politisi dari lintas partai.

Achmad Baidowi Anggota MPR Fraksi PPP

Umat Beragama Akan Terkekang

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan rumah ibadah dikontrol dan diawasi oleh pemerintah. Usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar rumah ibadah dikontrol pemerintah tidak lagi relevan saat ini. Untuk itu, usulan yang demikian tidak perlu direspons dengan membuat kebijakan, apalagi usulan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 secara tegas sudah menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ungkapan demikian disampaikan kepada wartawan dan termuat di *tribunnews.com*, 6/9/2023. Usulan mengawasi dan mengontrol tempat ibadah seluruh Indonesia bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar membuat keputusan untuk mengontrol dan mengawasi tempat ibadah.

Usulan BNPT juga cenderung akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, apalagi kini memasuki tahun pemilu. Usulan untuk mengawasi dan mengontrol tempat ibadah seluruh Indonesia juga rentan melanggar HAM. Usulan ini akan rentan melanggar HAM, karena negara akan cenderung ikut campur kebebasan individu untuk menjalankan ibadah.

Agama apapun akan menolak usulan ini. Tidak hanya agama Islam tetapi juga Katolik, Protestan, Hindu, Budha ataupun Konghucu yang akan merasa terkekang dengan usulan ini. Apalagi berdasarkan data di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri penduduk Indonesia dengan jumlah 273 juta jiwa rata-rata seluruhnya beragama, hanya 0,03% yang aliran kepercayaan. Usulan untuk mengawasi dan mengontrol tempat ibadah ini justru menyakiti hati masyarakat Indonesia, karena mayoritas umat beragam kena imbasnya. ❑

AWG

Ace Hasan Syadzily Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Upaya yang Berlebihan

SAYA menolak gagasan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengusulkan semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah. Usulan itu bakal menyalahi semangat kebebasan beragama yang selama ini sudah dijamin konstitusi. Sudah kayak zaman penjajahan saja, rumah ibadah dikontrol semuanya oleh pemerintah. Saya kira berlebihan jika tempat ibadah dikontrol pemerintah atau aparatur pemerintah. Saya menentang keras kontrol negara terhadap semua rumah ibadah di Indonesia. Ungkapan demikian termuat dalam *CNNIndonesia.com,* Selasa (5/9/2023).

Lebih lanjut dikatakan, kontrol yang terlalu kuat dari negara atas kehidupan beragama berpotensi menjadi paksaan dan terjadi upaya untuk melakukan intervensi terhadap ranah pribadi dalam beragama. Dirinya meminta agar pemerintah tidak membandingkan Indonesia dengan negara Timur Tengah.

Pria yang akrab dipanggil Ace itu mendorong upaya lain, seperti mengedepankan partisipasi masyarakat serta peran-peran tokoh agama dan organisasi keagamaan yang selama ini dikenal memiliki pandangan moderat dan toleran dalam melakukan pembinaannya.

Yang terpenting bagi lembaga seperti BNPT adalah mendeteksi potensi pemahaman agama menghalalkan kekerasan dan bertindak merugikan orang lain serta ketertiban sosial. Apapun agamanya, kalau pemahaman keagamaan berpotensi menimbulkan tindakan terorisme, sebaiknya ada tindakan pencegahan melalui mekanisme dialog dan pembinaan. ❑

AWG

Aboe Bakar al Habsyi Anggota MPR Fraksi PKS

Menyinggung Kalangan Umat Beragama

DALAM rilis yang beredar 7/9/2023, Aboe Bakar Alhabsy menyatakan, usulan BNPT agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme, adalah pemikiran yang sesat. Dikatakan, usulan itu dengan tujuan agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme seolah menuduh bahwa tempat ibadah adalah sarang terorisme. Pasti ini akan menyinggung kalangan umat beragama.

Menurutnya, jika ada oknum yang memang terlibat, kita tidak boleh menggeneralisir kepada siapapun. Misalkan saja, kemarin ada tiga anggota polisi, satu dari Polda Metro Jaya dan dua polisi dari Polda lainnya ditangkap lantaran diduga terlibat jaringan teroris di Bekasi. Apakah kemudian BNPT akan mengawasi semua kantor Polisi yang ada di Indonesia.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Lebih lanjut dikatakan, kalau pemikiran pakai pukul rata, logika kita akan rusak. Oleh karenanya, atas persoalan terorisme harus dikelola secara proporsional dan profesional. Dirinya berharap, BNPT segera mengklarifikasi atau meluruskan usulan tersebut. Jangan sampai hal ini membuat kegaduhan publik. ❑

AWG

World Coconut Day 2023

Fadel Muhammad: Membuat Komoditi Pertanian Gorontalo Mendunia

Dengan terselenggaranya even Hari Kelapa Sedunia membuat komoditas kelapa Gorontalo mendunia. Selain kelapa Gorontalo dikenal di dunia, perhelatan akbar itu juga akan menarik investasi masuk ke Gorontalo.

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa masyarakat Gorontalo mesti bersyukur dengan terselenggaranya sebuah even besar skala dunia, yakni World Coconut Day 2023, yang digelar di Kabupaten Gorontalo dari tanggal 21 hingga 25 September 2023.

"Saya datang memenuhi undangan dari Bupati. Saya melihat even tersebut mendatangkan sekitar 20 negara, berasal dari Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Masyarakat Gorontalo harus bangga bahwa daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah even yang sangat penting itu," ujar Fadel Muhammad dalam acara Silaturahmi Bersama Rakyat, di desa Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat (22/9/2023).

Hadir dalam acara dialog tersebut, para tokoh masyarakat dan mantan Wakil Bupati Gorontalo, Herman Walangadi, sesepuh desa dan masyarakat sekitar.

Selanjutnya, mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini menyatakan, akibat dari terselenggaranya even Hari Kelapa Sedunia tersebut, membuat komoditas kelapa Gorontalo mendunia. "Selain dikenalnya kelapa Gorontalo di dunia, perhelatan akbar itu akan menarik investasi masuk ke Gorontalo. Saya mendengar Pemkab menargetkan sekitar Rp 1 Triliun investasi yang masuk. Hal ini tentu saja akan berdampak baik untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Anggota DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo ini mengatakan bahwa semua itu adalah hasil upaya dan kerja keras Bupati Kabupaten Gorontalo dan jajarannya, yang berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti International Coconut Community (ICC) dan beberapa Kementerian.

"Itulah jika pemimpin bekerja untuk rakyat dan daerahnya. Maka semua yang dikerjakannya hanya untuk masyarakat. Untuk itu, saya berpesan mumpung makin mendekat ke tahun Politik 2024, saya berpesan agar Bapak dan Ibu sekalian bijak dalam menentukan pilihan. Pilihlah calon pemimpin yang betul-betul sudah terbukti bekerja untuk rakyatnya," tandas Fadel Muhammad. ❑

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Peresmian Pasar Modern Limboto

Fadel Muhammad Berharap Perekonomian Rakyat Berjalan Lancar

Pasar ini awalnya adalah Shopping Centre yang kemudian terbakar habis. Pemerintah daerah terus berupaya membangun kembali pusat perbelanjaan ini hingga akhirnya menjadi sebuah pasar untuk rakyat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, dan Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo meresmikan Pasar Modern Limboto (Pasmolim).

Turut hadir dalam acara yang digelar di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Sabtu (23/9/2023), ini antara lain, Ibu Hana Hasanah Shahab, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta seluruh pedagang dan masyarakat sekitar.

Setelah mendampingi Menteri PPN RI menandatangani prasasti peresmian pasar, bersama Menteri PPN RI, PJ Gubernur Gorontalo dan Bupati Gorontalo, Fadel Muhammad, berkeliling meninjau kondisi dan kelayakan pasar. Mulai dari kios-kios, tangga berjalan, sampai fasilitas lift semua ditinjau langsung.

Usai acara peresmian, kepada media massa, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI Dapil Gorontalo ini menyampaikan bahwa peresmian pasar ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat melakukan proses jual beli.

Selanjutnya Fadel Muhammad mengungkapkan, pasar ini awalnya adalah Shoping Centre yang kemudian terbakar habis. Pemerintah daerah terus berupaya keras untuk membangun kembali pusat perbelanjaan ini agar menjadi sebuah pasar untuk rakyat.

Salah satunya dengan membuat proposal pembangunan pasar ke pemerintah pusat, yang kemudian disetujui, digelontorkan anggaran, hingga pembangunan pun dilaksanaka. Pembangunan masih akan terus dilaksanakan hingga sempurna.

"Tadi saya ikut meninjau langsung kelayakan pasar. Dan, saya melihat sudah sangat bagus dan modern. Ada yang unik, dari penjelasan Pak Bupati, komplek pasar ini menerapkan hemat energi dengan memaksimalkan cahaya matahari masuk. Pasar ini juga memiliki dua pintu keluar masuk depan dan belakang. Sehingga, mempermudah pembeli. Pasar ini juga bersebelahan dengan terminal angkutan publik," jelasnya.

Fadel Muhammad berharap, dengan adanya pasar ini perekonomian rakyat berjalan lancar dan kehidupan masyarakat berangsur baik setelah sekian lama terkena dampak Pandemi Covid-19, yang sangat memukul ekonomi rakyat .

"Untuk para pedagang dan masyarakat, saya berpesan agar menjaga dan merawat pasar ini dengan baik, sehingga akan memberikan manfaat terus dalam jangka panjang," pungkasnya. ❑

Pencanangan Taman Kelapa Dunia

Fadel Muhammad: Potensial Menarik Investasi dan Jadi Destinasi Wisata

Taman Kelapa Dunia akan menjadi ikon baru di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Keberadaannya diharapkan menunjang produktivitas kelapa lokal sekaligus bisa menjadi destinasi wisata baru.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BUPATI Gorontalo, Nelson Pomalingo, dan Executive Director Internasional Coconut Community (ICC), Jelfina C. Alouw, Ahad (24/9), menandatangani prasasti Monumen Kelapa menandai pencanangan secara resmi Taman Kepala Dunia. Acara yang berlangsung di Desa Huyula, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, ini dihadiri Wakil Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad. Dan, acara ini juga merupakan salah satu rangkaian agenda utama World Coconut Day (WCD) 2023 yang digelar 21-25 September 2023.

Pada kesempatan itu, Fadel dalam kedudukannya sebagai Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI Dapil Provinsi Gorontalo, didampingi istrinya Ibu Hana Hasanah Shahab,

bersama Bupati Gorontalo dan Executive Director ICC, meninjau tempat persemaian bibit kelapa dan turut menanam bibit kelapa genjah sebagai simbol peresmian Taman Kelapa Dunia. Acara disaksikan seluruh peserta WCD 2023 dari 20 negara dan ratusan petani, serta warga masyarakat sekitar.

Kepada para wartawan, di sela-sela acara, Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa sebagai Pimpinan MPR, dirinya sangat menyambut baik kegiatan WCD 2023. Apalagi, efeknya untuk meningkatkan produktivitas pertanian daerah.

"Dulu, semasa saya menjabat Gubernur Gorontalo, saya mencanangkan jagung sebagai komoditas unggulan Gorontalo dan itu berhasil. Sekarang, Pak Bupati Nelson mengangkat kelapa sebagai komoditas unggulannya, itu sangat baik," ujar Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini.

Fadel Muhammad menyatakan, produksi kelapa Gorontalo memang sangat besar. Namun, belum terkelola dengan baik. Dengan adanya gerakan dari Bupati ini, Fadel mengharapkan, produksi kelapa meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas.

Terkait Taman Kelapa Dunia, menurut Fadel, akan menjadi ikon baru di Kabupaten Gorontalo. Keberadaannya diharapkan menunjang produktivitas kelapa lokal sekaligus bisa menjadi destinasi wisata baru yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara di masa depan, jika dikemas dan dikelola dengan baik serta profesional," ujarnya.

Di sesi akhir, Fadel Muhammad, Bupati Nelson Pomalingo, beserta seluruh peserta WCD 2023, serta para tamu undangan dan masyarakat menyaksikan Lomba Panjat Kelapa Nusantara.

Sebelumnya, mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini diajak berkeliling mengunjungi beberapa sentra Industri Kecil

Menengah (IKM). Antara lain, IKM Pulubala Kelapa Terpadu, di Kelurahan Pululaba, Kecamatan Kota Tengah, Kabupaten Gorontalo.

Di lokasi tersebut, Fadel Muhammad menyaksikan proses pengelolaan, mulai dari kelapa bulat sampai menjadi berbagai macam produksi seperti minyak VCO, minyak kelapa, sampai minyak goreng. Bahkan, di salah satu pabrik IKM, batok kelapa dijadikan arang briket untuk keperluan daerah, nasional, dan ekspor ke berbagai negara seperti Arab Saudi.

"IKM ini mengakomodir hasil banyak petani kelapa di sekitar. Sekitar 5 ribu butir kelapa setiap hari didapat dari petani kelapa, untuk dijadikan berbagai produk turunan dari kelapa," tandasnya. ❑

Mudzakarah Hukum Nasional dan Hukum Islam

Yandri Susanto: MUI dan Ormas Islam Harus Sosialisasikan SEMA No. 2 Tahun 2023

Umat Islam harus hati-hati, karena poros anti kebenaran akan ada hingga sampai kiamat nanti. Menghadapi masalah keumatan, menurut Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, umat Islam tidak boleh lemah, loyo, bahkan jangan sampai bisa dipecahbelahkan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PERWAKILAN dari berbagai ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah, ICMI, serta dari berbagai pondok pesantren, Rabu (13/09/2023), memenuhi Aula Buya Hamka, di Lt.4 Kantor MUI, Jl. Proklamasi, Jakarta. Mereka hadir di sana, hari itu, adalah dalam rangka mengikuti 'Mudzkarah Hukum Nasional dan Hukum Islam.'

Mudzkarah yang bertema: 'Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Pasca Surat Edaran (SEMA) No. 2 Tahun 2023 itu dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI H. Yandri Susanto, S.Pt., dan Wakil Menteri Agama Saiful Dasuki sebagai keynote speech. Selain itu, hadir pula Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Dr. KH Asrorun Niam Sholeh MA., Pakar Hukum Keluarga UI Neng Jubaedah SH., MH, Ph.D., dan Wasekjen Hukum dan HAM Dr. H. Ikhsan Abdullah SH., MH.

Acara Mudzakarah yang dimulai pukul 08.00 WIB itu diawali dengan kata sambutan Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto. "Terima kasih kepada MUI yang sudah menginisiasi mudzakarah," ujar Yandri Susanto dalam sambutannya. Menurut Yandri, pertemuan ini sangat strategis, dan mudzakarah seperti ini harus dilakukan pada setiap ada peristiwa yang perlu direspon secara akurat dan masif. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), itu menyebut isu nikah beda agama termasuk isu penting dibahas di forum ini.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Isu ini ini tidak efektif kalau dibahas di masing-masing ormas. Perlu MUI yang memayungi," tuturnya.

Menurut pria asal Bengkulu itu, persoalan nikah beda agama adalah persoalan serius. Dia mengungkapkan, arus globalisasi dan media sosial yang deras membuat seolah-olah yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Menghadapi yang demikian, menurut Yandri Susanto, terkadang umat Islam tidak mempunyai nafas untuk melawan itu semua.

"Malah kadang-kadang kita terkagum-kagum dengan ketidakbenaran itu," paparnya. Untuk itu, kata Yandri, umat Islam harus hati-hati, karena poros anti kebenaran akan ada hingga sampai kiamat nanti. Menghadapi masalah keumatan, menurut anggota DPR dari Dapil II Banten itu, umat Islam tidak boleh lemah, loyo, bahkan jangan sampai bisa dipecahbelahkan.

Terkait tema mudzakarah (nikah beda agama), lanjut Yandri, pernikahan beda agama itu bukanlah pernikahan. Di mempertanyakan prosesi pernikahan orang Islam dan non-Islam mengenai ijab qabul, mahar, dan agama apa yang mau dijadikan proses pernikahannya. "Maka, menurut saya, nikah beda agama itu jelas bukan pernikahan," tegasnya.

Yandri menegaskan bahwa pernikahan beda agama merupakan perzinahan sepanjang masa. Dia mengakui, memang ada perbedaan pandangan dalam soal nikah beda agama. "Namun, bila tidak punya literasi yang kuat pasti akan ikut arus," ujarnya.

Lebih lanjut, Yandri menyebutkan, ketika ada Pengadilan Negeri di Jakarta mengesahkan nikah beda agama maka yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri itu adalah suatu ketidakbenaran. Oleh karena itu, "Hal demikian tidak boleh didiamkan, harus di-stop," ujarnya.

Yandri menyatakan senang ketika pada 11 Juli 2023 mendatangi dan mendiskusikan masalah itu di Mahkamah Agung, dia mendapat informasi bahwa MUI dan ormas Islam sudah mendatangi MA. "Saya senang hal demikian sudah direspon oleh MUI dan ormas Islam," paparnya.

Yandri Susanto berharap agar MA cepat bersikap terhadap masalah nikah beda agama. Ia ingin aspirasi MUI dan ormas Islam itu segera diputuskan. "Akhirnya tanggal 17 juli 2023 keluar SEMA No. 2 Tahun 2023, yang isinya senafas dengan keinginan MUI dan ormas Islam," tuturnya.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 itu dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1). Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, itu sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2). Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Yandri Susanto berharap, dalam mudzakarah ada langkah taktis dan strategis mengenai apa yang harus dilakukan, sebab ada pihak-pihak yang ingin mencabut SEMA. Diingatkan agar langkah yang diambil oleh MUI dan ormas Islam tetap secara prosedural. "Saya berharap MUI dan ormas Islam terdepan untuk melakukan sosialisasi SEMA," tegasnya.

Selain itu, menurut Yandri, MUI perlu mengeluarkan surat edaran agar materi yang ada di SEMA dijadikan materi bagi juru dakwah, dai, ustad, dan ustazah, ketika berkhotbah. Dengan demikian isi dari SEMA sampai ke masyarakat di pelosok-pelosok.

Mantan Ketua BM PAN itu mengakui, ada kontradiktif hukum positif di Indonesia. UU No.1 Tahun 1974 sudah jelas mengatakan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan menurut agama masing-masing, namun di UU No. 23 Tahun 2006 ada celah bahwa boleh orang mengajukan untuk dicatat bahwa mereka telah menikah. Menurut Yandri Susanto, mencatat yang dimaksud sama halnya dengan mengesahkan. Untuk itu, dia mendorong agar UU. No 23 Tahun 2006 perlu di-judicial review di MK. "Bila terkabul maka SEMA akan semakin kuat," tegasnya. ❑

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Bamsoet Ajak Terus Kukuhkan Ideologi Pancasila

Pancasila tak boleh dijadikan komoditas politik bagi sebagian kelompok. Pancasila merupakan milik bangsa, bukan milik segelintir orang.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, membacakan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Upacara dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara, sementara Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pembaca teks Pancasila.

"Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang selalu diperingati setiap 1 Oktober, sesuai Keputusan Presiden Nomor 153/Tahun 1967, tidak boleh sekadar menjadi upacara yang berlalu hanya dalam waktu beberapa jam saja. Melainkan harus menjadi pembangkit semangat untuk semakin meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara," ujar Bamsoet usai membacakan naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, pada upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Ahad (1/10/2023).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, lahirnya momentum Hari Kesaktian Pancasila tidak lepas dari tragedi G30S/PKI. Enam jenderal dan satu perwira dibunuh secara keji dan dibuang ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Lubang Buaya. Antara lain Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R Soeprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean.

"Gerakan tersebut pada akhirnya berhasil diredam. Tragedi G30S/PKI tidak berhasil mengganti Pancasila dengan marxisme, leninisme, maupun Maoisme. Pancasila tetap teguh, tidak hanya sebagai ideologi bangsa melainkan juga sebagai sumber kekuatan moril dan spiritual bangsa. Pancasila membuktikan keberadaannya sebagai ideologi yang menyatukan. Sehingga kemudian setiap 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menerangkan, sebagai tindak lanjut, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang, serta pelarangan penyebaran paham komunisme/marxisme-leninisme. Hingga kini TAP MPRS tersebut masih berlaku, dan menjadi pegangan kuat bagi bangsa Indonesia dalam melindungi jati dirinya.

Di sisi lain, Pancasila tak boleh dijadikan komoditas politik bagi sebagian kelompok. Pancasila merupakan milik bangsa, bukan milik segelintir orang. Menganggap diri paling Pancasilais, sementara yang lainnya tidak, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan serta tidak sesuai dengan semangat Pancasila.

"Jangan menjadi pengkhianat bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai alat provokasi pemecah belah bangsa. Tidak perlu merasa paling benar sendiri, paling Pancasila sendiri. Karena nilai-nilai Pancasila bukan untuk dikatakan atau didiskusikan, melainkan untuk diamalkan," pungkas Bamsoet. ❑

Dialog Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota MPR Ajak Mahasiswa Tampil Jadi Pemimpin Nasional

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ANGGOTA MPR RI Fraksi PKB, Siti Mukaromah, S.Ag., M.AP., mengajak mahasiswa sebagai generasi muda Indonesia berani tampil menjadi pemimpin nasional. Keberanian ini sangat penting, sebab bangsa sebesar Indonesia sangat membutuhkan sosok leader yang mampu menjawab tantangan global di masa depan.

"Ini saya katakana, sebab kita berada di momen penting akan menghadapi tahun politik 2024. Tentunya, ajakan saya itu tidak sekarang ini. Ajakan itu untuk memecut semangat mahasiswa agar mulai dari sekarang mempersiapkan diri dengan belajar dan belajar dengan giat," katanya saat berdialog dengan para mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Kegiatan yang digelar atas inisiasi Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI ini, dilaksanakan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023). Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Dekan FH. Kom Unika, Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH.

Untuk saat ini, lanjut Siti Mukaromah, mahasiswa mesti menikmati proses belajar di bangku perkuliahan, sampai saatnya nanti tampil ke panggung pimpinan nasional. Namun, bukan sekedar menikmati. Proses ke arah itu harus dilalui dengan berbagai kegiatan yang berkualitas. Salah satunya, berkunjung dan berdialog di MPR RI ini.

"Sebab, pengetahuan yang kalian dapatkan di MPR RI akan menambah wawasan lebih luas lagi, terutama soal ketatanegaraan. Pengetahuan ini akan sangat berguna ketika melakukan edukasi soal sistem negara dan perpolitikan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Edukasi yang kalian berikan akan lebih tepat, sebab kalian dapatkan langsung di lembaga parlemen," terangnya.

Selanjutnya, politisi perempuan PKB ini memberikan pemaparan seputar tugas MPR RI. MPR RI, jelasnya, adalah lembaga negara setara dengan lembaga-lembaga negara lain, seperti DPR, DPD, dan Presiden. Keanggotaan MPR yang berjumlah 711 anggota terdiri dari dua unsur, yakni 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD RI.

"Komposisi Pimpinan MPR pun mencerminkan kesetaraan dan keadilan, yakni berjumlah 10 orang terdiri dari: Sembilan orang mewakili seluruh fraksi yang ada di DPR plus 1 (satu) orang

perwakilan DPD," tuturnya.

"Dengan komposisi keanggotan dan pimpinan sebesar itu, MPR RI diamanahi Undang-Undang untuk melaksanakan kewenangan dan tugasnya yang sangat luar biasa penting untuk bangsa dan negara. Antara lain, melantik Presiden dan Wapres terpilih, memberhentikan Presiden sesuai aturan yang berlaku, mengubah dan menetapkan UUD serta melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR," terangnya.

Di sesi akhir, Siti Mukaromah membuka kesempatan tanya jawab. Beberapa mahasiswa pun langsung mengambil peluang untuk bertanya mengenai beberapa hal. Seperti soal implementasi UUD sampai bagaimana mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. ❑

Diskusi Publik Akademik Fraksi Gerindra MPR

Bahas Tentang Mengembalikan MPR Sebagai Lembaga Tertinggi Negara

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FRAKSI Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) MPR RI kembali mengadakan Diskusi Publik Akademik di Bogor (6/9/2023). Tema yang diusung kali ini adalah: 'Mengembalikan MPR RI sebagai Lembaga Tertinggi Negara: Kemajuan atau Kemunduran dalam Demokrasi?'. Tema tersebut dipilih karena telah lama menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat.

Diskusi Publik Akademik ini dihadiri oleh beberapa anggota MPR/DPR RI, antara lain: Sekretaris F-Gerindra MPR Elnino Mohi, Sodik Mudjahid, Katherine Oendoen, dan Bahtra Banong. Selain itu, terdapat beberapa pakar, seperti Fuad Bawazier dan Martin Hutabarat.

Terkait menata kembali MPR RI, sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo telah menyatakan bahwa 'setelah 25 tahun memasuki era reformasi, saatnya merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara'. Hal itu disampaikan Pimpinan MPR, yang akrab disapa Bamsoet itu, saat menyampaikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023, di Kompleks MPR/DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Salah satu pakar, Fuad Bawazier, mengungkapkan bahwa hal yang terpenting dalam penyelenggaraan negara adalah kesepakatan dan semangat. Jika semua hal tersebut disepakati, bukan tidak mungkin mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dapat diwujudkan. Seperti halnya pada masa Orde Baru, hal tersebut dapat terwujud karena memang semangat dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan pada saat itu menginginkan adanya lembaga tertinggi yang dapat mengambil keputusan sepihak disaat negara berada dalam keadaan mendesak ataupun berbahaya.

Pada saat itu, MPR merupakan pengejawantahan dari kekuasaan rakyat. Saat masa Reformasi, euforia demokrasi sangatlah menggebu secara nasional. Akhirnya, semangat yang ada sebelumnya pun berubah. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan semua setara sebagai lembaga negara.

"Tentu saja, tidak serta-merta mengembalikan segala macam hak dan kewenangannya seperti pada saat Orde Baru. Ada yang harus disesuaikan dengan dinamika masyarakat saat ini," ujar Fuad Bawazier.

Sementara itu, menurut Elnino Mohi, penguatan kembali MPR pertama kali disuarakan oleh DPD. Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal tersebut disuarakan karena ada ketimpangan wewenang antara DPR dengan DPD. Elnino berpendapat bahwa hal tersebut menimbulkan perdebatan, dan tentunya mayoritas dari anggota DPR akan menolak

(penyetaraan wewenang DPR dengan DPD), karena nantinya dapat meningkatkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan dan pembuatan undang-undang.

Akhirnya, usulan yang relatif disetujui adalah penguatan MPR dibandingkan dengan menyetarakan DPR dengan DPD secara langsung. Kemudian, Elnino menekankan bahwa mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi merupakan cara untuk efisiensi waktu dalam pengambilan suatu keputusan.

Dengan demikian, anggota DPR dan DPD yang tergabung dalam MPR dapat turut serta dalam pengambilan keputusan. MPR kembali dapat membuat ketetapan dalam bentuk TAP MPR-RI yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan undang-undang, selain dari UUD NRI Tahun 1945.

Martin Hutabarat juga memberikan pendapatnya mengenai isu ini. "Kita harus memperjelas maksud dari mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negara seperti apa dan bagaimana yang diinginkan saat ini. Lembaga tertinggi negara yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 atau yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945," ujarnya.

Tentu, menurut Martin, semua harus mengevaluasi isu ini, menyerap aspirasi rakyat, dan kemudian membuat kajiannya untuk dapat mengetahui untung dan ruginya jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi.

Di kesempatan yang sama, Sodik Mudjahid menjelaskan bahwa euforia demokrasi di Indonesia berlangsung sangat masif dan cepat pasca reformasi. Menurutnya, demokrasi di Indonesia sudah cenderung mengarah ke demokrasi liberal. "Seharusnya, kita tetap berpegang pada Pancasila, dari mulai ekonomi dan juga politiknya yang berlandaskan pada musyawarah. Pada intinya, kita harus mengevaluasi sistem yang ada saat ini," katanya.

Pada akhirnya, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara merupakan suatu hal yang mungkin saja dapat diwujudkan. Namun, hal tersebut tidaklah mudah. Sebab, tentu akan menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga, perlu kiranya wacana ini harus disertai dengan kajian akademis yang matang.

Yang perlu diperhatikan adalah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi tidak serta-merta berbentuk seperti masa lalu. Diperlukan berbagai penyesuaian dengan dinamika masyarakat saat ini. Semangat dan kesepakatan penyelenggaraan negara oleh pemerintah dan seluruh aspek bangsa adalah kunci.

Tentu semua tidak ingin tercatat sebagai negara yang mengalami kemunduran dalam aspek demokrasi, tetapi kita semua tidak boleh juga terlalu terlena dengan euforia kebebasan yang membuat Indonesia 'terjerumus' ke dalam demokrasi liberal. Indonesia memiliki Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang dapat dijadikan basis dalam setiap aspek kehidupan. Hal itulah yang patut disadari dan dihidupkan ke setiap generasi bangsa. ❑

Dialog Kebangsaan HUT ke-45 FKPPI

Bamsoet Dorong MPR Kembali Menjadi Lembaga Tertinggi Negara

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengungkapkan, dalam Sarasehan Kebangsaan 'Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila' yang digagas Pusat Studi Pancasila (PSP) di UGM, mengemuka pandangan bahwa UUD 1945, yang mengalami empat kali amandemen, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan ayat. Bahkan di kesempatan lain, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof. Kaelan mengungkapkan, ada sekitar 97% pasal yang diubah dalam amandemen tersebut.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Empat kali amandemen juga menutup 'pintu darurat' dalam konstitusi. Akibatnya, jika ada kedaruratan konstitusi, bangsa Indonesia tidak bisa melakukan apapun. Misalnya, tidak ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu. Seperti presiden dan wakil presiden, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan karena gempa bumi megathrust, perang, kerusuhan massal, maupun karena pandemi.

"Idealnya memang MPR RI dikembalikan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

menjadi lembaga tertinggi negara, sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Sebelum amandemen keempat konstitusi, MPR RI bisa mengeluarkan Ketetapan (TAP) yang menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan kedaruratan negara. Seperti pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan Kahar Fiskal dalam skala besar," ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-45 FKPPI, di Lagoon Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9/23).

Dialog Kebangsaan 'Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila' Turut menghadirkan narasumber, antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Dewan Pakar FKPPI Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Mahkamah Agung RI ke-11 Prof. Bagir Manan, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Sri Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Prof. Bambang Wibawarta, peneliti utama politik BRIN Prof. Siti Zuhro, Cendekiawan Yudi Latif, serta Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, begitupun dengan pemilihan langsung yang dihasilkan melalui empat kali amandemen konstitusi. Ternyata juga menyisakan berbagai persoalan moral hazard, seperti money politic, atau yang dikenal dengan demokrasi NPWP (Nomor Piro Wani Piro). Menyebabkan para Caleg yang maju dalam Pileg membutuhkan dana kampanye tak sedikit, sehingga seringkali terikat pada sponsor dan kekuatan oligarki.

Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Pada saat menjabat Ketua DPR RI tahun 2018, Bamsoet telah menawarkan jalan tengah menggunakan sistem Pemilu campuran terbuka dan tertutup, untuk mewujudkan Pemilu demokratis sesuai semangat Pancasila, yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat Caleg dekat dengan rakyat.

"Sebagaimana dilakukan di Jerman, rakyat tetap bisa memilih wakilnya secara langsung, serta partai politik yang memenangkan pemilihan juga bisa menempatkan pilihannya di parlemen. Sehingga tokoh-tokoh seperti ilmuwan hingga budayawan tidak perlu ikut pemilihan, cukup diajukan oleh partai yang memenangkan pemilihan," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, tantangan kebangsaan lainnya yakni terkait kontinuitas pembangunan. Empat kali amandemen telah menghilangkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Akibatnya, kini pola pembangunan terkesan sporadis. Tidak ada kesinambungan dari satu periode pemerintahan ke penggantinya, serta tidak ada keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah, maupun antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Di sinilah pentingnya kehadiran sebuah peta jalan pembangunan yang dirumuskan dalam produk hukum yang kokoh di atas Undang-Undang. Sehingga tidak mudah ditorpedo oleh Perppu atau diganggu gugat melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Peta jalan inilah yang saat ini sedang diupayakan oleh MPR, dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"PPHN sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional yang tidak tersandera oleh periodisasi pemerintahan, Mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan uang rakyat yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Unperba

Bamsoet Ingatkan Ancaman Degradasi Moralitas Bangsa

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Pendiri Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) Bambang Soesatyo menuturkan, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan adalah pembangunan karakter bangsa yang selama ini menjadi istilah yang begitu mudah diucapkan, namun sulit untuk diwujudkan. Tantangan tersebut menjadi semakin terasa nyata manakala lompatan kemajuan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi telah menghadirkan nilai-nilai modernitas zaman. Sehingga, membuat gagasanpembangunan karakter bangsa menjadi tidak menarik, bahkan hanya untuk sekedar dibicarakan saja.

"Generasi muda bangsa begitu terikat dengan gadget dan smartphone sehingga cenderung anti sosial dan abai terhadap realitas sosial di sekitarnya. Budaya asing dianggap lebih modern, sehingga budaya sendiri cenderung dilupakan. Yang lebih membahayakan, nilai-nilai asing yang tidak selaras dengan karakter dan jati diri bangsa, begitu mudahnya masuk tanpa filter melalui dunia maya. Seperti budaya kekerasan, aksi radikalisme, hingga perilaku yang merendahkan nilai-nilai moralitas," ujar Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam Wisuda Sarjana Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) di Purbalingga, Kamis (14/9/23).

Purbalingga merupakan daerah pemilihan Bamsoet. Selain mendirikan kampus Unperba di Purbalingga, Bamsoet juga mendirikan PT. BAMS, pabrik pengolahan hasil pertanian di Banjarnegara yang menyiapkan berbagai cemilan ekspor serta ransum untuk TNI/Poli dan Hotel bintang tiga MEXOLIE di Kebumen.

Hadir dalam acara wisuda perdana itu, antara lain Ketua Yayasan Perguruan Karya Bhakti Wisnu Bargowo, Pengawas Yayasan Karya Bhakti Sarjono, Rektor Unperba Eming Sudiyana. serta civitas akademika Unperba. Turut hadir pula Wakil Bupati Purbalingga Sudono dan Wakil Ketua DPRD Purbalingga yang juga Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga, Ketua DPD Partai Golkar Banjarnegara Agus Junaedi dan Ketua DPD Partai Golkar Kebumen, Halimah.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini memaparkan, di tengah kegelisahan tersebut, muncul pula kasus sindikat rumah produksi film porno di Jakarta Selatan, yang mampu memproduksi 120 judul film hanya dalam kurun waktu satu tahun. Pemberitaan ini seakan-akan mengonfirmasi data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, dari 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, mayoritas merupakan kasus kekerasan seksual.

"Ini adalah sinyal keras bahwa saat ini moralitas bangsa sedang mengalami degradasi. Fenomena di atas tidak hanya membuat kita mengelus dada, tetapi memberi

tamparan keras pada muka kita yang selama ini mengklaim sebagai bangsa yang menghormati adat budaya, memuliakan kearifan lokal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan agama," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti yang mengelola Unperba dan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum Unpad ini menambahkan, degradasi moralitas bangsa adalah salah satu indikator nyata bahwa pembangunan pada sektor pendidikan masih belum berdayaguna secara optimal. Konstitusi tegas mengamanatkan pada Pasal 31 ayat 3, bahwa sistem pendidikan nasional yang dianut adalah sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.

Tidak hanya itu, saat ini juga dirasakan mulai memudarnya identitas dan jati diri ke-Indonesiaan, khususnya di kalangan generasi muda bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal seperti adab sopan santun dalam sikap dan perilaku, mulai tergerus dan terpinggirkan oleh gaya hidup hedonis, individualis, egois dan pragmatis.

"Karena itu, kesadaran untuk membangun wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi sangat penting. Karena wawasan kebangsaan generasi muda akan menjadi faktor kunci yang akan menentukan seperti apa wajah Indonesia di masa depan," pungkas Bamsoet. ❑

Sosialisasi Bersama GMNI Kota Gorontalo

Fadel Muhammad: Membangun Bangsa Harus Berpedoman pada Empat Pilar

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir H. Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa sebagai negara besar, Indonesia memiliki Empat Pilar MPR, yakni: nilai-nilai luhur bangsa dan peraturan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Termasuk dalam Empat Pilar MPR itu adalah, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai luhur dan peraturan tersebut bukan hanya ditujukan sebagai pedoman untuk memunculkan karakter dan jati diri bangsa, tapi juga pedoman dalam membangun bangsa.

"Ketika penguasa berpedoman pada Empat Pilar MPR dalam menjalankan pemerintahannya maka semua kebijakan yang keluar juga akan sesuai dan seiring sejalan dengan Empat Pilar," ujar Fadel Muhammad, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan GMNI Kota Gorontalo, di Komplek Kantor Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, Gorontalo, Kamis

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

(7/9/2023).

Secara gamblang, Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI dari dapil Provinsi Gorontalo ini memberi penjelasan bahwa menjalankan Pancasila saja sebagai satu bagian dari Empat Pilar MPR secara konsisten maka membangun bangsa akan terasa lebih ringan.

Sebab, menurut Fadel, dalam Pancasila ada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu memperlakukan manusia secara beradab, tidak memandang perbedaan suku, agama dan ras, penuh keadilan, dan dalam mengambil keputusan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Itu baru menjalankan Pancasila. Jika ketiga pilar lainnya diimplementasikan maka akan lebih sempurna lagi hasilnya," jelas mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Begitu pentingnya Empat Pilar bagi pembangunan karakter anak bangsa dan bagi terlaksananya pembangunan nasional, lanjut Fadel Muhammad, membuat negara melalui Undang-Undang memberikan amanah kepada MPR untuk melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan berbagai metode kepada seluruh elemen masyarakat.

"Itulah sebabnya Sosialisasi Empat Pilar ini menjadi salah satu tugas MPR, selain beberapa tugas dan kewenangan MPR lainnya yang luar biasa, antara lain melantik Presiden dan Wapres RI serta mengubah dan menetapkan konstitusi atau UUD," tandasnya.

Berbicara tentang pelaksanaan pembangunan nasional saat ini, Fadel Muhammad mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhasil menaikkan perekonomian nasional secara signifikan.

"Kami sebagai perwakilan rakyat berupaya terus menjadi penyeimbang dan pengingat pemerintah agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai koridor Empat Pilar, demi kepentingan bangsa dan negara, serta kesejahteraan rakyat," katanya.

Satu lagi, kepada masyarakat, Fadel Muhammad menyampaikan bahwa untuk memastikan pembangunan nasional ke depan lebih terarah, terfokus dan berkesinambungan, bersama berbagai elemen bangsa, seperti para akademisi perguruan tinggi, tokoh nasional, para pakar ketatanegaraan, MPR saat ini sedang menggodok dan mengkaji munculnya haluan negara atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Munculnya PPHN akan menjadi panduan dan pedoman yang mempermudah pemerintah dalam pembangunan nasional. Sekali lagi, dengan PPHN, negara akan memastikan pembangunan nasional akan berdampak baik buat seluruh rakyat tanpa kecuali," tandasnya.

Kegiatan sosialisasi berlangsung lancar. Hadir dalam acara tersebut, istri Fadel Muhammad Ibu Hana Hasanah Shahab, Lurah Pilolodaa Warni Panu, Ketua GMNI M. Zulkifli Usman, dan seluruh anggota GMNI Kota Gorontalo serta masyarakat sekitar sebagai peserta. ❑

Sosialisasi Empat Pilar MPR Ikatan Pesantren Indonesia

Sjarifuddin Hasan: Taat UUD Adalah Ikut Memilih dalam Pemilu

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

RATUSAN santri, kiai, nyai, dan pengelola pesantren yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Oktober 2023, memenuhi salah satu aula Pondok Pesantren Al Hikmah, Bojongkerta, Kota Bogor. Kehadiran mereka selepas solat Asar di pesantren kilat tersebut untuk mengikuti Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau dikenal dengan istilah Empat Pilar MPR.

Hadir dalam sosialisasi, Wakil Ketua MPR Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA.; Ketua Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) DPC Kota Bogor, Syamsudin SPd.I.; Sekretaris IPI DPC Kota Bogor,Muhammad Abdur Rahman S.Sos.

Di hadapan para peserta yang datang dari enam kecamatan di kota yang dijuluki Kota Hujan itu, Sjarifuddin Hasan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta. “Silaturahim ini bukanlah pertemuan yang pertama dan terakhir,” ujar Politisi Partai Demokrat itu. Dikatakan pertemuan itu merupakan pertemuan pertama dan akan terus berlanjut.

Pria asal Sulawesi itu menuturkan, dengan silaturahim, kita jalin hubungan dengan semuanya. Semakin banyak silaturahim membuat umur kita akan dipanjangkan oleh Allah, diberi kesehatan, dan dilimpahkan rezeki. “Sehingga saya senang bersilaturahim”, ujarnya.

Menteri Koperasi dan UMKM di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu lebih lanjut mengatakan, pun demikian kalau melakukan Sosialisasi Empat Pilar. “Tidak cukup satu kali,” paparnya. Dia menyebut, tugas MPR ini harus dilakukan terus-menerus. “Setiap warga negara mesti melaksanakan Empat Pilar MPR”, tegasnya.

Diungkap, dalam salah satu pilar yakni di UUD, dikatakan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. “Jadi bila ada yang menginginkan pemilu ditunda, dipercepat, atau yang lainnya, maka hal demikian adalah bentuk pelanggaran UUD,” tegasnya.

Menurut Syarief Hasan, sebagai warga negara harus taat konstitusi. “Presiden, pemerintah, dan rakyat harus patuh pada konstitusi”, tegasnya.

Pada 14 Februari 2024, pemerintah telah menetapkan akan diadalan pemilu, ada pemilu presiden, legislatif, dan pemilihan anggota DPD. Dari pemilu yang ada, rakyat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa pemimpin yang dianggap bisa memimpin Indonesia ke depan.

“Sebagai ketaatan pada UUD maka semua harus mengikuti dan berkontribusi pada pelaksanaan pemilu”, tegas pria yang juga menjadi Guru Besar Universitas Negeri Makassar itu. ❑

Kerjasama Perpustakaan MPR-Uninus

Siti Fauziah: Kita Bangkitkan Literasi di Masyarakat

SEKITAR 50 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM), Universitas Islam Nusantara (Uninus), pada Sabtu, 9 September 2023, memenuhi Aula Gedung Pascasarjana Uninus, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari itu, mereka mengikuti dua acara yang digelar oleh Perpustakaan MPR dan Uninus. Yaitu: Penandatanganan MoU dan MoA antara Perpustakaan MPR dan Uninus; dan Seminar Perpustakaan bertema: 'Perspektif dan Kenyataan Profesi Pustakawan.'

Dalam kegiatan itu hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM.; Wakil Rekor I Uninus, Prof. Dr. Endang Komara M.Si.; Dekan FIKOM Uninus Drs. Undang Sudarsana M., M.Pd.; Kepala Program Studi Ilmu Perpustakaan Rosiana Nurwa Indah, S.Hum., MA.; Pustakawan Madya MPR, Yusniar, SH., dan Pustakawan Muda MPR Satrya Yudha H, SE.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Setjen MPR, Siti Fauziah, mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Uninus ini adalah dalam rangka menjalin kerja sama antara MPR dan Uninus, dan juga seminar. "Kerjasama yang dijalin ini tidak hanya penting bagi MPR, namun juga penting buat Uninus," ujar Siti Fauziah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pada kesempatan itu, Siti Fauziah menjelaskan bahwa MPR sudah lama memiliki perpustakaan, koleksi yang dimiliki tidak hanya buku cetak, namun juga buku digital. "Ribuan judul buku ada di Perpustakaan MPR," tuturnya. Bahkan, menurut Siti Fauziah, Perpustakaan MPR memiliki kelebihan tersendiri dibanding perpustakaan yang lain, di mana di dalamanya ada koleksi buku yang tidak diperjualbelikan, dan buku itu hanya ada di Perpustakaan MPR.

Dia lalu menyebut buku Risalah Amandemen UUD Tahun 1945 dari amandemen pertama hingga keempat adalah salah satu buku yang tidak diperjualbelikan, dan hanya ada di Perpustakaan MPR. "Buku ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang menekuni studi tentang ketatanegaraan," tuturnya.

Untuk itu, Siti Fauziah mengundang civitas akademika Uninus untuk berkunjungan ke Perpustakaan MPR. "Bila ada yang ingin berkunjung ke Perpustakaan MPR, kami persilahkan. Kami terima secara terbuka, baik yang datang perorangan maupun kelompok," ujarnya. Apalagi, lanjut Siti Fauziah, Perpustakaan MPR sekarang bukan perpustakaan yang biasa lagi, sebab Perpustakaan MPR juga sudah dikelola oleh pustakawan madya dan muda.

Dirinya berharap, kerja sama yang terjalin antara Perpustakaan MPR dan Uninus tidak hanya tertulis di atas kertas, namun hendaknya juga terwujud dalam berbagai kegiatan. "Suatu kebanggaan bisa menjalin kerjasama dengan Uninus," paparnya seraya berharap, jalinan kegiatan tidak berhenti pada hari itu, namun hendaknya berkelanjutan di hari-hari berikutnya.

Masukan dari Uninus

Sementara dalam kegiatan Seminar, Siti Fauziah minta kepada civitas akademika Uninus agar aktif memberi masukan. "Kita berbagi informasi. Silahkan memberi masukan, karena pendapat atau masukan itu perlu bagi kami," tuturnya. Mengingat, kehadiran Perpustakaan MPR, menurut Siti Fauziah, adalah juga sebagai upaya meningkatkan literasi membaca di tengah masyarakat. Tingkat literasi di masyarakat diakui belum menggembirakan. "Dengan kegiatan seperti ini kita bisa bangkitkan kembali literasi di masyarakat. Kita bangkitkan gairah membaca," katanya.

Juga selaku pembicara dalam seminar itu, Wakil Rektor I Uninus, Endang Komara, mengungkapkan, dari 78 negara yang diukur tingkat literasinya, Indonesia berada di peringkat 72. "Berarti urutan ke-enam dari belakang," ungkapnya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita belum memiliki kebiasaan membaca.

Endang Komara memaparkan hasil pengamatannya ketika kerap melakukan kunjungan ke negara-negara maju, di mana di sana, tingkat literasi masyarakatnya sangat tinggi. "Di kereta maupun di bis, mereka menggunakan waktu yang ada untuk membaca," ungkapnya.

Untuk itu, dirinya berharap, kegiatan yang digelar ini dapat bermanfaat, terutama untuk mengembangkan dan meningkatkan Prodi Ilmu Perpustakaan Uninus. "Sehingga bisa sejajar dengan perguruan tinggi yang lain," harapnya.

Dalam seminar itu, juga ikut menyampaikan materi adalah Yusniar, Satrya Yudha, dan Rosiana Nurwa Indah. Dimoderatori oleh Pustakawan Muda MPR, Titin Hartini, S.Sos., mereka menyampaikan materi tetang pustakawan, perpustakaan, dan tantangannya. ❑

Pengambilan Sumpah/Janji di Lingkungan Setjen MPR RI

Dua Deputi Baru, Pejabat Tinggi Pratama, hingga PPPK Dilantik

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PELAKSANA Tugas Sekretaris Jenderal (Plt. Sesjen) MPR Dr. Janedjri M. Gaffar. M.Si., melantik dan mengambil sumpah/janji dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1b), yakni, Siti Fauziah, SE., MM., sebagai Deputi Bidang Administrasi; dan Hentoro Cahyono, SH., MH., sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi.

Dalam kesempatan yang sama, Janedjri juga melantik dan mengambil sumpah/janji tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa) dan 38 pejabat Eselon III dan IV untuk mengisi posisi bidang administrator, pengawas dan jabatan fungsional, serta melantik beberapa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kegiatan yang digelar di Ruang Pustaka-loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023), ini dihadiri beberapa tamu kehormatan, antara lain, Sekretaris Jenderal DPD RI Dr. Rahman Hadi, M.Si.; Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), Heru Setiawan, SE., M.Si., tamu undangan, serta seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR RI.

Dalam sambutannya usai upacara pelantikan, mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkapkan bahwa alih tugas, mutasi, dan promosi pegawai dan pejabat di lingkungan instansi pemerintahan adalah sebuah keniscayaan seiring kebutuhan organisasi untuk maju dan berkembang.

Selain untuk menjawab kebutuhan organisasi, alih tugas, mutasi, dan promosi juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Antara lain, kompetensi pegawai, persyaratan jabatan, serta pengembangan karier pegawai. Muara dan orientasi yang dituju jelas, yaitu peningkatan kinerja, profesionalisme, dan produktifitas pegawai.

Karena itulah, lanjutnya, mekanisme alih tugas, mutasi dan promosi pegawai dan pejabat di lingkungan Setjen MPR RI ini dilakukan dengan pendekatan yang objektif dan komprehensif. Antara lain, melalui pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dari kalangan birokrasi pemerintahan, akademisi, dan profesional yang kredibel, terdiri dari 7 orang, yakni: Pertama, mantan Wakil Menteri PAN dan RB, Prof. Dr. Eko Prasodjo (Ketua).

Kedua, anggota MPR RI periode 1999-2003 dan mantan Hakim Konstitusi Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MH., (Anggota). Ketiga, kandidat Doktor dan Sekjen MK Heru

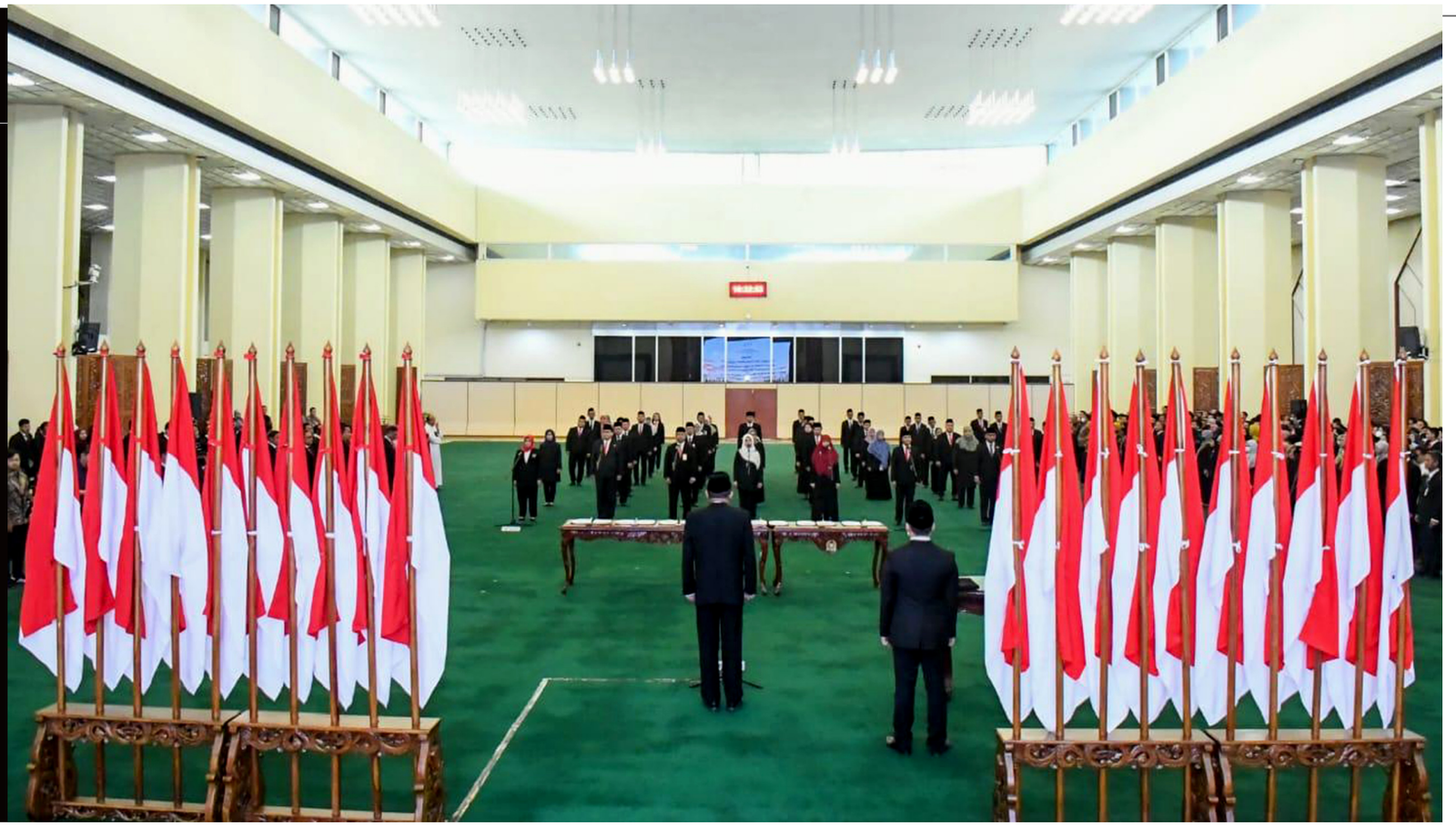

Setiawan, SE., M.Si., (Anggota). Keempat, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, SH., MPM., (Anggota). Kelima, Kepala Badan Keahlian DPR Dr. Inosentius Samsul, SH., M.Hum., (Anggota). Keenam, Guru Besar Hukum Tata Negara Wakil Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Muchamad Ali Syafa'at, SH., MH., (Anggota). Dan, ketujuh, Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Dekan Fakultas Hukum Universias Jember Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, SH., MH., (Anggota).

"Merekalah yang melakukan tugas untuk melakukan seleksi dalam rangka alih tugas, mutasi dan promosi. Di samping itu, juga dilakukan assessment oleh konsultan di bidang psikologi dan manajemen SDM, yang dikolaborasikan dengan hasil 'Computer Assisted Test (CAT)' yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tidak itu saja, agar lebih objektif, penilaian kinerja internal juga menjadi salah satu dasar pertimbangan," jelas Janedjri.

Lebih jauh, pria kelahiran Yogyakarta, di bulan Oktober 1963, ini mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah/janji ini cukup spesial, sebab sebagian jabatan penting dan strategis yang diisi tersebut sudah cukup lama kosong.

Karena itu, dengan telah diisinya jabatan yang kosong tersebut diharapkan roda organisasi Setjen MPR RI bisa kembali bekerja secara optimal, dalam memberikan dukungan keahlian dan dukungan adminsitrasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, Pimpinan MPR, alat kelengkapan MPR, dan tentunya segenap anggota MPR.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan selamat dan selamat bekerja kepada saudara-saudara yang baru dilantik dan mengucapkan sumpah/janji untuk melaksanakan tugas pada jabatan yang baru. Perlu saya ingatkan bahwa jabatan adalah sebuah kepercayaan sekaligus amanah. Adapun sumpah/janji yang saudara-saudara ucapkan, adalah pernyataan kesanggupan sekaligus ikrar pribadi saudara-saudara sekalian kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya.

Janedjri berharap, para pejabat yang baru dilantik bisa menjawab kepercayaan, bisa menjalankan amanah serta bisa menunaikan sumpah dan janji tersebut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

"Saya percaya ikrar sumpah dan janji yang diucapkan itu, bukan hanya sekedar kata-kata indah tanpa makna. Melainkan sumpah janji yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam dan menjadi komitmen yang akan dilaksanakan dalam menjalankan tugas," tambahnya.

Sebagai pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjutnya, segala tindakan, keputusan, sikap dan perilaku akan dilihat sebagai refleksi tindakan, keputusan, sikap dan perilaku negara. "Kehadiran dan kinerja kita adalah kehadiran dan kinerja negara di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, tindakan , keputusan, sikap dan perilaku kita harus selalu berpedoman pada norma hukum dan norma sosial di sekitar kita," tegasnya.

Orientasi semua dalam menjalan tugas adalah, untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi, tempat tugas ada di lembaga MPR RI yang merupakan rumah kebangsaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kepentingan pribadi dan kelompok harus dikesampingkan ketika berbenturan dengan kepentingan negara atau kepentingan publik.

"Pada saat yang sama, sebagai pejabat kita harus menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan jabatan. Saya sangat tegaskan jangan pernah mengambil keputusan atas dasar kepentingan dan keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok. Karena hal itu bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan merugikan institusi MPR di mana kita bekerja dan tentu merugikan kepentingan negara," pungkasnya. ❑

Menyapa Sahabat Kebangsaan di Unri

Siti Fauziah: Mengenal Budaya Asing Perlu, Menjaga Budaya Sendiri Sangat Penting

DEPUTI Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, SE., MM., meminta generasi muda turut menjaga serta memelihara budaya lokal agar selalu lestari. Jangan sampai asyik dengan seni budaya asing membuat lupa terhadap karya seni budaya sendiri. Karena seni budaya merupakan salah satu kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia yang harus dijaga dan pertahankan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Siti Fauziah saat membuka Forum Komunikasi Publik (FKP), Sarasehan Kehumasan MPR RI, Menyapa Sahabat Kebangsaan, dengan tema: 'Pentingnya Pelayanan Publik di Era Millenial.' Acara tersebut berlangsung di Aula Microteaching FKIP Universitas Riau, Selasa (3/10/2023).

Hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unri ini, antara lain: Wakil Dekan II Unri Mahmud Alpusari M.Pd.; Kabag Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI Indro Gutomo SH., MH., serta dosen Unri Dr. Sri Erlinda S.IP., M.Si.

Lebih lanjut, Siti Fauziah menekankan, mengenal dan mencintai budaya asing adalah sesuatu yang normal. Pengenalan terhadap karya seni budaya asing juga perlu untuk menambah wawasan. Hanya saja, kata Bu Titi, begitu Siti Fauziah biasa disapa, kesukaan terhadap seni budaya asing tidak harus dengan melupakan seni budaya sendiri.

Menurut Bu Titi, mengenal budaya asing perlu, apalagi jika ingin hidup dalam pergaulan internasional. Tetapi mencintai, menjaga, dan melestarikan nilai budaya sendiri harus terus ditumbuhkembangkan, agar budaya kita juga berkembang, tidak kalah dari budaya asing. Untuk itu, kita harus terus menjaga serta mempertahankan pantun, tarian, serta lagu lagu daerah. Jadi," bukan hanya mengenal kesenian asing, tapi juga tetap menguasai budaya lokal," katanya.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Biro Humas MPR RI ini menjelaskan bahwa acara sarasehan Menyapa Sahabat Kebangsaan ini sesuai dengan visi: "MPR Menjadi Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat." Karena itu, katanya, MPR ingin menjadi sahabat bagi seluruh generasi muda. Dan, pada saatnya, para pemuda bisa menyampaikan aspirasinya, baik secara online maupun offline. Dan, "MPR siap menampung curahan hati masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa. Apalagi yang sifatnya membangun, agar ke depan MPR bisa memperbaiki diri," tambah Siti Fauziah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Siti Fauziah tak lupa mengingatkan, di era millenial ini lalu lintas informasi dunia berada di telapak tangan. Dengan memiliki handphone, generasi muda bisa mencari informasi dengan sangat mudah. Dan, itu berlaku bagi semua pemuda, dari desa hingga kota. Karena itu, seluruh pemuda dan mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan dunia global. Bukan malah menjadi beban bagi masyarakat.

Khusus untuk para mahasiswa, Bu Titi menyarankan agar terus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan. "Bukan hanya persaingan dengan sesama bangsa Indonesia, tetapi juga dengan dunia internasional," pungkasnya. ❑

Sarasehan Kehumasan MPR RI

Indro Gutomo: Saran dan Masukan Sebagai Kontrol Sosial terhadap Pelayanan Publik di MPR RI

DI HADAPAN lebih dari 200 mahasiswa FKIP Universitas Riau (Unri), Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal MPR RI, Indro Gutomo, SH., MH., mengajak generasi muda bersikap kritis terhadap layanan publik yang disampaikan lembaga negara, tak terkecuali MPR. Indro Gutomo juga berharap, generasi milenial mau memberi saran yang membangun bagi perbaikan konten website,layanan media sosial, maupun layanan informasi di MPR.

Bagi MPR, menurut Indro, saran dan masukan dari mahasiswa berguna untuk membangun dan memperbaiki layanan publik agar semakin baik. Saran dan masukan dari mahasiswa juga berfungsi sebagai kontrol sosial, sarana instropeksi dan perbaikan untuk kemajuan yang lebih baik lagi, sesuai tugas dan fungsi MPR. Karena keterlibatan masyarakat, merupakan amanat dari pelayanan publik.

"Layanan publik merupakan salah satu fasilitas umum yang dijamin oleh negara sesuai amanat Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi, regulasi menyangkut layanan publik, khususnya keterbukaan informasi publik, itu sangat jelas, dan harus dilaksanakan dengan baik," ungkap Indro Gutomo.

Pernyataan itu disampaikan Indro Gutomo saat menjadi narasumber Forum Komunikasi Publik (FKP), Sarasehan Kehumasan MPR RI, Menyapa Sahabat Kebangsaan dengan tema: 'Pentingnya Pelayanan Publik di Era Millenial.' Acara tersebut berlangsung di Aula Microteaching FKIP Universitas Riau, Selasa (3/10/2023). Forum Komunikasi Publik tersebut terselenggara berkat kerjasama MPR dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unri. Ikut hadir pada acara tersebut Deputi Bidang Administrasi Sekjen MPR Siti Fauziah SE., MM., Wakil Dekan II Unri Mahmud Alpusari M.Pd.

Gutomo menjelaskan bahwa ada dua bidang layanan publik di MPR RI, khusunya di Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, yakni: Bidang Edukasi Ketatanegaraan melalui layanan penerimaan delegasi masyarakat, serta Bidang Layanan Informasi.

Pada kesempatan itu, Gutomo mengundang mahasiswa Unri untuk datang ke gedung MPR di Senayan Jakarta. Karena dengan datang ke gedung parlemen banyak pelajaran bisa dipetik. Bukan hanya sejarah tetapi juga wisata pendidikan, khususnya edukasi ketatanegaraan. Jika saat ini kesempatan itu belum datang, Indro menegaskan kunjungan bisa dilakukan secara online, dengan membuka situs MPR maupun medsos MPR.

Gutomo menceritakan tentang kunjungannya ke MPR pada tahun 1996. "Ternyata kunjungan saya itu menjadi langkah awal setelah saya lulus kuliah, dan akhirnya saya kerja di MPR". kenang Gutomo.

Selain Indro Gutomo, terdapat tiga narsum yang turut menyampaikan pemikirannya pada sarasehan tersebut. Yaitu, Kasubag Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Yenita Revi, SE., Kasubag pemberitaan MPR Euis Karmila, S.Ip., serta Dosen Unri Dr. Sri Erlinda S.IP., M.Si.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dosen Unri Dr. Sri Erlinda, S.Ip., M.Si., mengingatkan mahasiswa bahwa demi perbaikian pelayanan publik di negara kita ini maka kita harus melek terhadap era digital. Apalagi saat ini, banyak sektor yang dilakukan serba online. Kemampuan mengadopsi kemajuan di era digital, menurut Sri Erlinda, harus dilakukan sedini mungkin, karena tahun 2045 mahasiswa akan menghadapi era emas bonus demografi.

"Bonus demografi akan menjadi kekuatan dan keuntungan, jika bisa dikelola dengan baik. Tetapi sebaliknya, bonus demografi akan menjadi bencana jika usia produktif yang ada tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi semua orang dituntut berjuang agar jadi individu yang tangguh," kata Dr. Sri Erlinda. ❑

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Hj. Intan Fauzi, SH, LL.M., Anggota MPR Fraksi PAN

Pemerintah Atur Social Commerce untuk Lindungi UMKM

PEMERINTAH melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika secara resmi menutup TikTok Shop sejak pukul 17.00 WIB, Kamis sore, 4 Oktober 2023. Sebagai bentuk penutupan TikTok Shop, sekarang tidak ada lagi keranjang kuning dalam aplikasi Tiktok. Sejak resmi ditutup, keranjang kuning sebagai tempat belanja online aplikasi dari Cina ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk transaksi. Tiktok hanya boleh sebagai tempat promosi barang atau produk tetapi dilarang untuk transaksi jual beli.

Larangan TikTok untuk berjualan atau melakukan transaksi perdagangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan Permendag yang ditandatangani Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, pada 26 September 2023 ini merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Dalam aturan itu, pemerintah melarang media sosial (seperti Tiktok) menjalani aktivitas jual beli selayaknya e-commerce.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan, Menkominfo, dan Menteri UKM dan Koperasi menilai, social commerce telah mengancam pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya, aplikasi social commerce, seperti TikTok Shop, menawarkan barang (yang kebanyakan impor) dengan harga miring sehingga pelaku UMKM lokal sulit bersaing. TikTok Shop membuat banyak UMKM berguguran.

Namun, penutupan TikTok Shop ini mengundang perhatian luas dan menimbulkan pro kontra. Apalagi sekitar 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta creator affiliate menggantungkan nasibnya pada platform social commerce tersebut. Penutupan ini juga merupakan pukulan berat bagi mereka mulai dari public figur hingga masyarakat biasa yang berjualan di TikTok Shop.

Menanggapi persoalan tersebut, berikut penuturan Anggota MPR dari Fraksi PAN, ***Hj. Intan Fauzi, SH.,*** *LL.M., yang juga anggota Komisi VI DPR RI yang antara lain membidangi masalah perdagangan. Petikannya.*

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akhirnya menutup TikTok Shop sesuai aturan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 yang merupakan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Apa tanggapan Ibu?

Pemerintah memang telah melakukan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Kenapa? Sebab, akhir-akhir ini UMKM resah karena barang-barang yang dijual, khususnya di TikTok Shop, itu bisa dijual lebih murah, pelaku usahanya juga banyak sekali. Pemerintah kemudian merespon dengan merevisi Permendag tersebut. (Proses revisi

Permendag) Ini sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu, karena kami di Komisi VI, yang salah satu mitranya adalah Kementerian Perdagangan, sudah bertanya ke Menteri Perdagangan dan sudah direspon langsung sekitar awal Agustus. Jadi, proses revisi Permendag itu sudah berjalan lama dan telah dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Apa yang melatarbelakangi pemerintah melakukan revisi atas Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tersebut?

Pada waktu lalu kita mengenal perdagangan melalui transaksi jual beli offline. Yaitu, ada pedagang, ada barang, ada pembeli, ada pembayaran, selesai. Kalaupun saat itu sudah ada barang impor, tetapi barang itu masuk melalui pelabuhan dan jelas ada aturannya. Kemudian terus berkembang marketplace, seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan sebagainya. Mereka adalah marketplace. Artinya, mereka adalah juga pasar secara online. Di situ memang terjadi transaksi perdagangan.

Tapi kemudian berkembang lagi. Ada startup-startup misalnya matahari.co, dan lain-lain. Itu yang disebut retail online. Jadi ada kategori menurut definisi, definisi dari e-commerce itu ada marketplace, retail online. Sekarang berkembang lagi begitu cepat. Media sosial lalu dimanfaatkan untuk perdagangan kemudian menjadi social commerce. Tiktok adalah platform media sosial, yang kemudian melakukan transaksi perdagangan (jual beli) sehingga menjadi social commerce. Perdagangan tetapi memakai platform media sosial.

Inilah yang kemudian menjadi masalah. Sebab, barang atau produk yang dijual di platform media sosial itu adalah barang-barang yang notabene dari luar (impor) dan kita tidak akan bisa komplain. UMKM pun belum tentu bisa kompetitif dari segi harga. Social commerce inilah yang harus diatur kemudian menjadi latarbelakang revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Sebuah peraturan, meskipun itu peraturan menteri, harus berkoordinasi atau perlu harmonisasi agar jangan sampai aturan Permendag menabrak peraturan yang lain.

Saya ingat betul dalam rapat Komisi IV bersama mitra kami Menteri Perdagangan, awal Agustus lalu Mendag sudah menyampaikan rencana revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 itu. Jadi, bukan sekarang ini saja, tetapi prosesnya sudah dimulai awal Agustus lalu. Permendag itu sudah ditandatangani menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Apa yang diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 sebagai revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020?

Apa yang diatur dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 adalah: Pertama, definisi dari marketplace harus jelas. Karena di sana pemainnya ada yang memang bergerak dalam e-commerce marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, lalu ada startup-startup retail online, dan ada social commerce seperti TikTok Shop. TikTok Shop adalah platform media sosial yang kemudian melakukan transaksi perdagangan. Semua ini harus diatur lagi.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Kenapa barang yang dijual di TikTok Shop bisa lebih murah? Karena barang yang masuk (ke Indonesia) tidak membayar pajak, mereka tidak punya izin usaha. Nah, inilah yang diatur dalam revisi Permendag tersebut bahwa pelaku usaha luar negeri harus mempunyai izin usaha, sehingga otomatis membayar pajak ke negara.

Jadi, semua pelaku usaha, seperti perdagangan offline sudah jelas soal perizinan dan sebagainya. Ini juga berlaku untuk perdagangan online. Pelaku usaha dari luar negeri (seperti TikTok Shop) harus memiliki izin usaha. Sejalan dengan izin usaha juga terkait dengan izin-izin lainnya, membayar pajak dan sebagainya. Kemudian, pada produk-produk tertentu harus memiliki atau mengikuti SNI (Standar Nasional Indonesia), sertifikat halal, dan mengikuti ketentuan sesuai aturan. Jadi, ketentuan dan aturan berlaku baik pelaku usaha offline maupun online sehingga semuanya bersaing secara sehat.

Bagaimana UMKM kita dapat bersaing di era digitalisasi seperti sekarang ini?

Kita harapkan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 menjadi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ini menjadi perlindungan bagi UMKM kita. Bicara tentang UMKM, memang kita harus mendorong UMKM untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. Setiap kementerian mempunyai anggaran untuk pelatihan-pelatihan bagi UMKM dalam pemasaran digital. Semuanya sedang bergerak ke arah digital. Kenapa? Di satu sisi, perdagangan secara online menyerap pasar yang lebih luas. Di sisi lain, perdagangan offline membutuhkan tempat, ruko, dan itu memerlukan biaya tinggi. Karena itu, UMKM memang didorong ke arah online.

Saya sering melakukan sosialisasi pemasaran digital. Mayoritas, terutama UMKM-UMKM di kota-kota besar, biasanya memang sudah terjun ke perdagangan yang dilakukan secara online. Dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ini maka selain menjadi perlindungan bagi UMKM juga mendorong UMKM memasarkan produknya secara offline dan online. Pemasaran secara online tidak bisa dihindari di tengah perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini. ❑

Perankan Laksamana Malahayati

KISAH Laksamana Malahayati, seorang perempuan pejuang berasal dari Kesultanan Aceh, ditampilkan dalam Pagelaran Seni Teatrikal Jalasena Laksamana Malahayati di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzukui, Jakarta, 8-9 September 2013.

Adalah artis cantik **Marcella Zalianty** yang memerankan tokoh Laksamana Malahayati dalam Pagelaran Seni Teatrikal diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Ke-78 TNI. Artis kelahiran Jakarta, 1980, ini mengaku, diajak berkolaborasi oleh TNI AL.

"Woww…. terima kasih TNI AL, ini memang impian saya lama banget, mengangkat tokoh inspiratif ini. Sebelumnya, saya sudah mengangkatnya dalam bentuk komik," kata istri Ananda Mikola ini dalam konperensi pers di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Dalm sesi latihan, Marcela sempat terkena sabetan kecil pedang betulan, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dan, dalam pagelaran ini, dia tampil gemilang. Suara dan gesturnya di panggung terlihat sangat lantang dan tegar menjiwai sosok pemberani Malahayati. ❑

DER

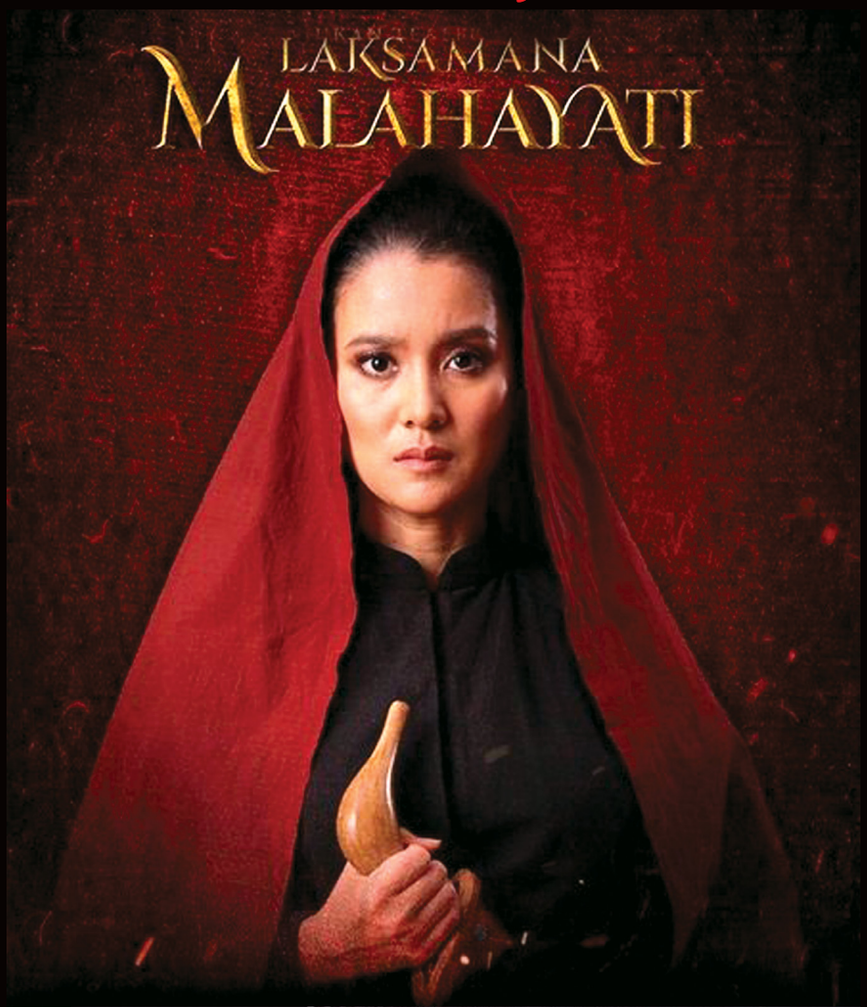

Marcella Zalianty

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI

ADA wajah baru di jajaran pimpinan Kesekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI. Dia adalah **Hentoro Cahyono, SH., MH**. Bersama para pimpinan dan pejabat lainnya, dia dilantik oleh Plt. Sesejen MPR RI, Dr. Janedjri M. Gaffar, M.Si., sebagai Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI.

Pasca dilantiknya pada 27 September 2023, mantan Kajari Bandar Lampung ini langsung melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh staf, juga para Kepala Biro dan juga anggota MPR dan Pimpinan MPR. “Secepatnya, langsung melakukan kerja-kerja,” kata pria kelahiran Banda Aceh ini, saat ditemui di Jakarta.

“Intinya, saya berharap, sinergitas dan kerjasama yang solid dan baik dari semua elemen di Kesetjenan MPR RI, agar kita semua bisa melaksanakan tugas yang diamanahkan, sehingga MPR ke depan jauh lebih baik dan berdampak baik untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya. ❑

DER

Hentoro Cahyono

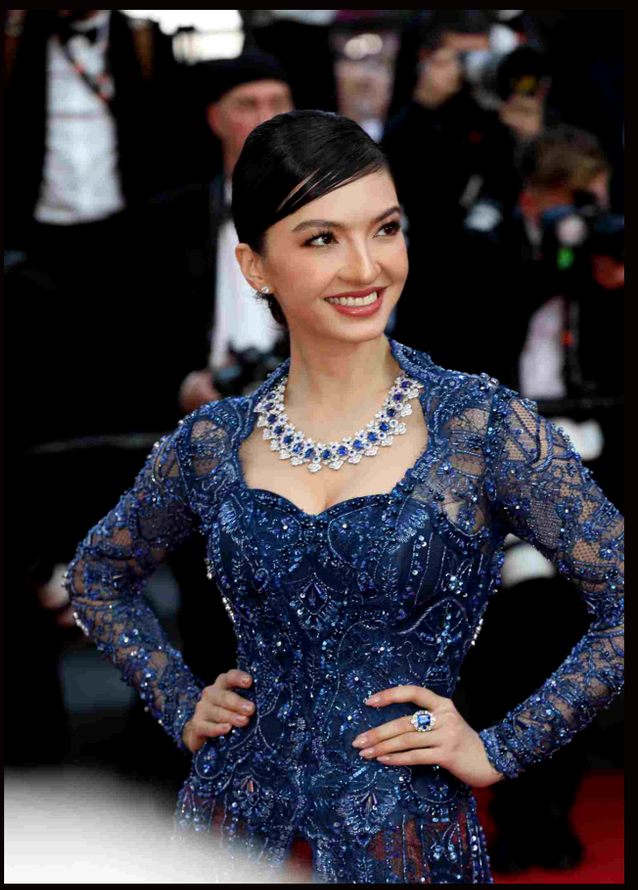

Raline Shah

Sedih Perang Terbuka Palestina - Israel

AKTRIS, model, dan penyanyi, Raline Rahmat Shah yang popular dipanggil **Raline Shah** mengaku sangat khawatir dengan perang, antara Palestina dan Israel yang terjadi beberapa waktu ini. Perempuan kelahiran Jakarta, Maret 1985, ini mengungkapkan kesedihannya saat membaca berita, banyak orang tak bersalah jadi korban dalam perang tersebut. “Ini soal kemanusiaan, lihatlah para korban itu,” tuturnya.

Dalam konflik Palestina-Israel, Raline mengaku, memang mendukung kedamaian untuk rakyat Palestina. “Meski Pro Palestina bukan berarti kita antisemitisme. Sama halnya juga sebagai masyarakat Indonesia, bukan berarti kita membenarkan tindakan terorisme,” begitu bunyi pernyataan tegas Raline yang diunggahnya Rabu (11/10). ❑

DER

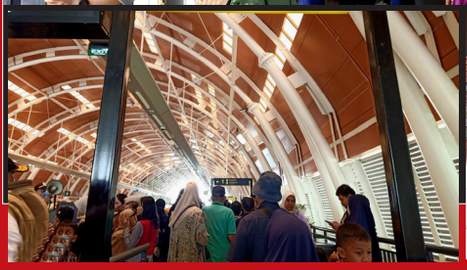

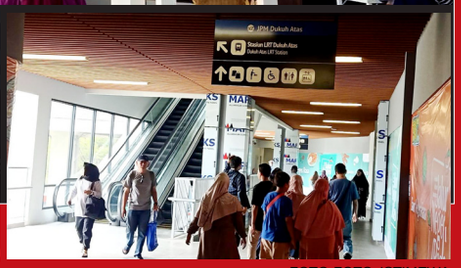

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Stasiun LRT Dukuh Atas

Cermin Masa Depan Perkereta Apian Indonesia

PADA perayaan ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang lalu masyarakat Jakarta mendapat kado istimewa, berupa dua jenis layanan kereta api. Masing-masing, Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek. Kedua moda transportasi ini melengkapi fasilitas trasnportasi umum yang sebelumnya sudah ada di Jakarta, seperti MRT, Commuter Line, serta Transjakarta.

Dibanding Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek lebih dahulu dioperasikan, yaitu pada 28 Agustus 2023. Moda transportasi ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Salah satunya terlihat pada stasiun tempat pemberhentian di Dukuh Atas, yang dikenal Stasiun LRT Dukuh Atas (SDA).

Meski belum sepenuhnya paripurna, struktur bangunan Stasiun LRT Dukuh Atas terlihat sangat besar dan mewah. Bangunan tiga lantai yang terletak di Jl. Setia Budi Tengah, Setiabudi, Jakarta Selatan, itu berdiri kokoh. Stasiun ini melintang di atas aliran Sungai Ciliwung, yang airnya nyaris tak pernah kering.

Stasiun LRT Dukuh Atas merupakan stasiun awal dari layanan LRT Jabodebek. Dari atas SDA terlihat jelas aliran air di Ciliwung menuju ke laut. Tak jauh dari sana terdapat Pintu Air Manggarai, yang salah satu fungsinya adalah menahan sampah agar tidak ikut aliran Sungai Ciliwung ke laut.

Majalah *Majelis* beberapa waktu lalu mencoba melihat dari dekat stasiun ini merasakan sensasi yang ditawarkan SDA. Posisinya yang berada di kawasan terbuka hijau membuat jarak pandang ke seluruh kawasan terlihat dengan jelas. Memang ada beberapa pohon tinggi yang menghalangi pandangan, tapi jumlahnya terbatas.

Karena itu, praktis, dari atas SDA inilah masyarakat bisa melihat sebagian wajah Jakarta yang selama ini tak ternah terekspose. Yaitu, wajah Jakarta saat dilihat dari ketinggian Stasiun LRT Dukuh Atas. Apalagi, dari kawasan tersebut, bukan saja kecantikan Jakarta yang bisa dilihat, tetapi

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

juga sudut-sudut Jakarta yang bopeng dan perlu perbaikan tampak dengan jelasnya.

Sebagai stasiun yang terintegrasi dengan moda trasnportasi lain, SDA dilengkapi dengan jalan khusus, berupa Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Serambi Temu Dukuh Atas. Jembatan di Stasiun LRT Dukuh Atas ini terintegrasi dengan Stasiun MRT Dukuh Atas dan Stasiun KRL Sudirman.

Menyusuri jalan khusus ke stasiun Sudirman atau sebaliknya, melalui Jembatan Penyeberangan Multiguna, itu terasa seperti melintasi jalan-jalan di luar negeri. Tidak ada penghalang, sehingga prakstis pengguna transfortasi kereta bisa menikmati suasana jalan tersebut dengan leluasa. Terkecuali pada jam sibuk. Karena pada jam-jam sibuk, berangkat atau pulang kerja, pengguna LRT tergolong cukup banyak. Sementara beberapa bagian jalan khusus itu terlihat sempit dan perlu diperluas.

Tempat Parkir

Berbeda dengan stasiun lain di Jakarta, SDA masih mengakomodir pedagang UMKM untuk membuka usahanya di tempat tersebut. Mereka bisa berjualan di puluhan tenan yang terdapat lantai dua stasiun ini. Beberapa pedagang terlihat menjual berbagai makanan dan minuman. Mulai dari kerak telur, siomay, tahu tek-tek, hingga gorengan. Ada juga beberapa penjual es dan minimarket yang menyediakan berbagai minuman dan kue-kue kering.

Praktis, penumpang tidak perlu merasa khawatir kelaparan atau kehausan, sekalipun mereka tidak membawa bekal dari rumah. Karena, tenan makanan itu menyediakan untuk pengganjal perut sebelum sampai ke tempat yang dituju. Di sini juga disediakan fasilitas tempat duduk bagi mereka yang hendak menikmati makanan yang dibeli. Atau sekedar duduk menghabiskan waktu.

Selain tenan pendagang UMKM, lantai dua SDA juga terdapat berbagai fasilitas umum yang bisa dipakai calon penumpang. Misalnya, tempat salat, charging station untuk alat elektronik, dan ruang menyusui. Di lantai ini juga ada beberapa ruang untuk internal pegawai LRT Jabodebek. Salah satunya, adalah ruang keamanan.

Sayangnya, Stasiun LRT Dukud Atas ini belum dilengkapi dengan fasilitas kantong-kantong parkir. Sehingga untuk menggunakan moda transportasi ini setiap penumpang sebaiknya menggunakan sarana transportasi umum agar tidak dibuat repot dengan urusan parkir.

Sebagai salah satu stasiun masa depan, SDA menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan pergerakan calon penumpang, dari dan kesetiap lantai, dengan fasilitas yang memadai. Baik tangga, escalator maupun lift. Selain itu, stasiun ini juga memberikan kemudahan kepada para penumpang untuk memperoleh informasi keberangkatan, baik waktu keberangkatan maupun rute stasiun melalui papan informasi. Tidak hanya itu, di SDA juga terdapat fasilitas loket pengisian kartu uang elektronik untuk memudahkan penumpang melakukan *top up* ticket elektroniknya.

Melihat antusiasme masyarakat mencoba fasilitas LRT, bukan tidak mungkin ke depan kereta api ini bisa menjadi sarana transportasi yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Terlebih saat ini kemacetan di Jakarta masuk kategori yang mengkhawatirkan. Jika tidak disegerakan pemakaian trasnportasi massal bukan mustahil kemacetan di Jakarta akan semakin menjadi. ❑

MBO

Peringatan HUT ke-78 TNI

Penghargaan Dharma Pertahanan Utama untuk Pimpinan MPR RI

Penghargaan Dharma Pertahanan Utama diberikan kepada para tokoh yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar serta Kepala Badan Bela Negara/Wakil Ketua Umum FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri) Bambang Soesatyo menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelumnya, Bamsoet menerima penghargaan Brevet Baret Ungu Korps Marinir Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Wing Penerbang Kelas 1 Pesawat Tempur Warga Kehormatan TNI-AU, serta Brevet Hiu Kencana Satuan Kapal Selam Warga Kehormatan TNI-AL.

Selain Bamsoet, penghargaan serupa juga diberikan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta kepada para pimpinan MPR RI lainnya, yakni: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Yandri Susanto, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Penghargaan diberikan bersamaan dengan rangkaian kegiatan Parade Senja dan Gala Dinner dalam rangka memperingati HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kementerian Pertahanan, dihadiri Presiden Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara.

Sebagaimana ditekankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, peng-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

hargaan Dharma Pertahanan Utama diberikan kepada para tokoh yang berjasa dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui bidang pertahanan.

"Sebuah kehormatan mendapatkan penghargaan ini. Menjadi cambuk bagi saya pribadi untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa dan negara. Baik melalui jabatan publik yang kini sedang saya jalankan sebagai Ketua MPR RI, maupun sebagai anak bangsa pada umumnya," ujar Bamsoet usai menerima penghargaan Dharma Pertahanan Utama dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di Kementerian Pertahanan, Senin (9/10/23).

Turut hadir antara lain, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman, serta KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, bagi pimpinan MPR RI, penghargaan tersebut menjadi wujud apresiasi dari Kementerian Pertahanan terhadap berbagai kinerja MPR RI dalam mendukung pertahanan kedaulatan bangsa. Salah satunya yang dijalankan MPR RI melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk menguatkan karakter kebangsaan, serta mempertahankan ideologi Pancasila.

"Untuk urusan ideologi, tidak boleh ada keragu-raguan. Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot, dan semangat nasionalisme yang teguh. Bersama MPR RI, Kementerian Pertahanan sebagai kementerian teknis yang merancang pertahanan, serta TNI sebagai pengguna kekuatan pertahanan, adalah bagian dari benteng perisai yang berada di garda terdepan dalam mempertahankan, menjaga dan melindungi NKRI serta ideologi Pancasila," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR RI juga konsisten mendukung peningkatan Alutsista pertahanan dan keamanan nasional. Sehingga Indonesia bisa selalu siap sedia menghadapi berbagai potensi yang dapat membahayakan kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Mengingat tantangan yang dihadapi bangsa dan negara ke depannya semakin kompleks. Khususnya dalam menghadapi potensi Perang Generasi Kelima (G-V) berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital yang dikenal juga dengan Cyber Warfare.

"Jika tidak waspada dan tidak segera membentuk 'Angkatan Siber' dalam mengantisipasi, dampak yang dihasilkan dari Perang G-V bisa lebih dahsyat dibandingkan empat perang lainnya. Dengan kekuatan siber yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainny, seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, bandar udara hingga operasional Alutsista militer. Melalui serangan siber, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan," pungkas Bamsoet. ❑

Dr. H. Bambang Soesatyo, SE., SH., MBA.
Ketua MPR RI

Eskalasi Ketahanan Nasional Dengan Angkatan Siber Adalah Keniscayaan

ESKALASI ketahanan nasional dengan membentuk dan menghadirkan angkatan siber adalah keniscayaan. Serangan siber nyaris sudah menjadi rutinitas, bahkan perang siber sudah menjadi kenyataan. Angkatan siber nyata-nyata menjadi kebutuhan negara-bangsa karena ancaman siber semakin besar dan terus berevolusi.

Sudah begitu banyak contoh kasus tentang serangan siber yang menyasar dan membidik sistem teknologi operasional (sistem terkomputerisasi) dalam lebih dari dua dekade terakhir ini. Selama rentang waktu itu pula, masyarakat di berbagai belahan dunia mendapat pembelajaran bahwa serangan siber terus berevolusi. Dari evolusi serangan itu, dunia mengenal beragam jenis malware atau perangkat lunak rancangan penjahat siber yang digunakan untuk mencuri data penting atau sekadar menimbulkan kerusakan pada sistem operasional.

Kejahatan siber pun sudah menjadi modus, karena sistem dan jaringan operational bergantung pada internet. Dari pengalaman buruk banyak institusi, publik pun sudah mendapatkan penjelasan bahwa serangan siber berpotensi menimbulkan skala kerusakan yang luas. Dia bisa merusak produktivitas, menimbulkan kerusakan fisik hingga mengacaukan sistem keamanan. Dari rangkaian pengalaman buruk itulah persoalan atau agenda ketahanan dan keamanan siber menjadi isu yang terus mengemuka hingga hari-hari ini. Ketahanan dan keamanan siber tidak hanya kebutuhan negara dan institusi bisnis, melainkan juga menjadi kebutuhan personal.

Serangan siber di Indonesia sudah seringkali terjadi. Salah satu contoh kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah serangan siber yang membidik sistem perbankan di dalam negeri. Misalnya, Bank Indonesia (BI), per Januari 2022, menjadi target serangan ransomware Conti ke dalam jaringan bank sentral itu. Serangan itu fokus pada kantor BI di Bengkulu dan menyebabkan terjadinya kebocoran data.

Pada pekan kedua Mei 2023, giliran Bank Syariah Indonesia (BSI) yang jadi target serangan, yang menyebabkan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan mobile banking lumpuh. Grup hacker Ransomware Lockbit mengaku telah mencuri 1,5 Terabyte (TB) data pribadi nasabah dari server BSI. Pelaku serangan berupaya memeras, dengan ancaman akan membocorkan database BSI bila permintaan tebusan tidak dipenuhi. Tahun 2021, juga diberitakan bahwa Bank Jatim dan BRI Life diretas dan data pribadi nasabah diduga bocor di internet. Juga pada awal tahun 2022, sistem teknologi operasional pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pernah mengalami serangan ransomware.

Contoh kasus yang sedikit lebih ekstrim dapat dilihat pada konflik Rusia versus Ukraina. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa konflik kedua negara juga ditandai dengan perang dunia maya yang berhasil menimbulkan gangguan dan kekacauan. Sebagaimana dilaporkan CyberPeace Institute dan Check Point Software Technologies, gelombang serangan siber yang dilakukan komunitas relawan dari kedua negara terbilang masif. Bahkan otoritas Ukraina mengklaim tak kurang dari 400.000 peretas multinasional dengan

sukarela membantu Ukraina. Ada serangan yang membidik fasilitas militer dan pemerintah Ukraina. Sebaliknya, ada juga serangan siber yang menyasar sejumlah fasilitas milik negara di Rusia.

Bahwa ancaman siber itu nyata semua orang sudah tahu. Serangan oleh penjahat siber bisa menimbulkan gangguan dan kerusakan skala terkecil hingga berskala besar. Persoalannya kemudian adalah seberapa cepat otoritas negara mau menanggapi ancaman itu? Pengalaman Rusia dan Ukraina menerima serangan siber berskala masif bisa saja dianggap wajar karena kedua negara sedang terlibat perang. Namun, sudah menjadi pengalaman bersama bahwa serangan siber bisa terjadi kapan saja, setiap hari, tanpa harus menunggu terjadinya konflik atau perang.

Serangan siber terhadap sistem perbankan Indonesia, utamanya kantor Bank Indonesia di Bengkulu, misalnya, terjadi ketika negara dalam keadaan baik-baik saja dengan stabilitas nasional yang terjaga. Namun, pengalaman akan serangan siber terhadap kantor Bank Indonesia di Bengkulu memberi pelajaran kepada semua elemen masyarakat bahwa penjahat siber tak segan-segan membidik infrastruktur kritis — yakni infrastruktur vital bagi layanan publik yang jika tidak berfungsi karena alasan rusak, akan menimbulkan kelumpuhan, kekacauan dan kerusakan berskala besar, termasuk bisa melumpuhkan aktivitas perekonomian. Kalau sistem kelistrikan sebuah rumah sakit rusak seketika, misalnya, akan ada risiko kematian pasien karena alat bantu tidak bisa berfungsi akibat listrik padam.

Selama berlangsungnya konflik dengan Rusia, Ukraina harus bekerja ekstra keras mengamankan infrastruktur energinya dari gempuran militer Rusia. Namun, ada contoh kasus yang dikemukakan otoritas Departemen Keamanan Siber Ukraina yang patut digaribawahi oleh semua pemangku kepentingan sektor keamanan nasional. Dalam sebuah insiden di dekat Kyiv (ibukota Ukraina), terjadi juga serangan siber terhadap pembangkit listrik. Ini bukti lain bahwa infrastruktur kritis pun rentan dari serangan siber jika tidak didukung dengan sistem pengamanan maksimal.

Dalam konteks ketahanan nasional, potensi ancaman berupa serangan siber itu tentu saja harus ditanggapi dengan program dan aksi nyata. Bersyukur bahwa negara telah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas melaksanakan keamanan siber dengan efektif dan efisien. BSSN pun ditugaskan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasi semua unsur yang terkait dengan keamanan siiber.

Menyadari bahwa potensi ancaman serangan siber terus berevolusi, aspek ketahanan nasional harus terus diperkuat. Idealnya, proses penguatan itu diupayakan melalui program pendidikan yang menghasilkan talenta digital dalam jumlah yang banyak. Sektor pendidikan nasional diharapkan lebih pro aktif menanggapi kebutuhan negara akan talenta digital.

Upaya lain yang juga sangat relevan adalah segera membentuk satuan atau angkatan siber sebagai matra baru yang bersinergi dengan TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Setelah mendapatkan pendidikan khusus, komunitas talenta digital diberi penugasan untuk mendukung dan memperkuat TNI-Polri dalam mengantisipasi dan mencegah serangan siber.

Tak terlelakan bahwa matra atau angkatan siber menjadi unsur penting bagi aspek pertahanan negara di era modern sekarang ini. Matra siber berperan signifikan, bahkan sangat penting, dalam mendeteksi, mencegah, serta merespons serangan, utamanya serangan siber terhadap infrastruktur kritis, sistem pemerintahan dan keamanan nasional. Ingat bahwa ada belasan sektor infrastruktur kritis sebagai bagian dari ekosistem yang kompleks dan saling berkait satu sama lainnya.

Dengan memahami ragam potensi ancaman di era digitalisasi sekarang ini, aktivitas negara memperbanyak talenta digital adalah keniscayaan. Dan, sudah barang tentu bahwa mengeskalasi aspek ketahanan nasional dengan menghadirkan angkatan siber pun menjadi sebuah keniscayaan pula. ❑

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Prolog

Tahun 2023 Kemerdekaan Indonesia mencapai usia 78 tahun. Pada perayaan kemerdekaan tahun ini, sebuah tema ditetapkan, yakni: 'Terus Melaju Untuk Indonesia Maju.' Kata laju memiliki ragam arti, yakni kecepatan gerak, aliran, endapan, transisi kecepatan, perkembangan, dan penyebaran. Kecepatan untuk memajukan Indonesia. Tetapi, jika dilekatkan dengan kehidupan manusia, usia 78 tahun identik dengan kematangan berpikir yang terlihat melalui sikap bijak dalam bertindak. Proses penuaan yang dialami sejak usia 60 tahun ditampilkan dengan gerakan yang melambat karena cenderung dianggap sebagai penasihat dan pengamat, usia tepat untuk menikmati kehidupan dengan bahagia karena telah melewati fase produktif. Dalam lingkup organisasi, usia sesudah 70 tahun adalah usia emas untuk merealisasikan cita-cita yang berdampak pada kesejahteraan semua.

Kemerdekaan memang melampaui angka dan tafsirannya, karena gagasan melaju dalam tema perayaan menggambarkan semangat untuk terus berkembang, melanjutkan estafet pembangunan, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melaju untuk Indonesia Maju merupakan seruan bagi seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Mungkin, setiap perayaan akan menghadirkan ragam pemikiran dan refleksi untuk kemajuan bangsa dan negara, tetapi apakah terdapat sebuah kesadaran berbangsa dan bernegara? Apa arti kesadaran berbangsa dan bernegara? Bukankah setiap perayaan kemerdekaan sejatinya menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa untuk berkontribusi dalam keberlanjutan pembangunan? Mengapa atribut adil, makmur dan sejahtera sebagai pesan konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, masih harus terus diingatkan dalam momentum perayaan kemerdekaan Indonesia? Keseluruhan pertanyaan ini tidak serta-merta membutuhkan jawaban, karena merupakan refleksi untuk menjangkau kedalaman diri.

Pada Mulanya Adalah "Kesadaran"

Kita boleh menyepakati bahwa segala sesuatu berawal dari kesadaran *(consciousness)*. Kesadaran dimaksud lekat dengan pengetahuan, pemahaman keseluruhan atribut diri. Kesadaran yang demikian melampaui kepekaan *(awareness)* karena mengandung kemampuan sensivitas tanggapan berbasis kognisi dan emosi. Periode sebelum, selama, dan sesudah kemerdekaan memiliki dinamika khusus yang menampilkan kesadaran dan dapat disebut sebagai kesadaran menuju pengakuan, kesadaran untuk peneguhan dan kesadaran mencapai pematangan.

Pertama, kesadaran menuju pengakuan. Sebelum kemerdekaan terdapat rangkaian pengakuan dan penerimaan akan keberagaman menuju satu-kesatuan suku bangsa yang tercermin dalam proses lahirnya pergerakan nasional sampai Sumpah Pemuda. Kesadaran para pemuda akan keterhubungan antarsuku bangsa bermuara pada pengakuan dan sumpah satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Uniknya, setiap kelompok pemuda dengan kompleksitas atribut pembeda, menyatu dalam satu payung organisasi pendidikan dengan nama *kesadaran yang sangat baik*, diterjemahkan dari nama Boedi Oetomo, bersumber dari bahasa Sanksekerta Budhi Uttama.

Kedua, kesadaran untuk peneguhan tercermin dalam dinamika lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan, dengan berbagai tahapan mulai dari dialektika pemikiran tentang basis ideologi, perumusan konstitusi sampai pemilu pertama, proses demokrasi pembentukan organ pemerintahan yang dibutuhkan demi meneguhkan independensi. Meskipun terdapat berbagai perbedaan pendapat, benih persatuan yang telah ditumbuhkan sejak Sumpah Pemuda kemudian menguat pada periode kemerdekaan untuk melahirkan satu bentuk negara kesatuan dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Rote dengan nama agung, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, perjalanan bangsa ditempa dalam ragam sejarah penting sampai memasuki abad XXI.

Ketiga, kesadaran mencapai pematangan mesti menjadi topik dalam periode perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi. Kesadaran pada periode ini mesti mengatasi setiap slogan kesejahteraan yang kerap digaungkan. Kesejahteraan, adil dan makmur, serta keempat tujuan bernegara yang tertulis dalam konstitusi bukan lagi kata benda yang selalu disebut, tetapi kata kerja yang harus diwujudkan melalui setiap pelayanan publik. Perwujudan cita-cita ini mesti berpijak pada kekuatan intensi *(the power of intention)* setiap anak bangsa, terutama semua yang telah bersedia, mau dan mampu menjadi pelayan masyarakat dalam elemen pemerintahan (eksekutif), parlemen (legislatif) dan organ hukum (yudikatif).

Kesadaran Berbangsa

Nama Indonesia memang baru secara definitif dikenal pada akhir abad XIX karena baru pertama kali dibuat pada 1850 oleh G.S.W Earl dalam *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia.* Meskipun demikian, James Logan adalah orang pertama yang memakai kata "Indonesia" untuk mendeskripsikan lingkup geografis daerah kepulauan Hindia. Logan kemudian menggunakan kata "Indonesian" maupun "Indonesians" untuk menyebut penduduk yang mendiami hamparan kepulauan tersebut (Elson, 2008). Sejak saat itu, nama Indonesia melekat dalam sejarah perkembangan bangsa dan terutama kesadaran diri setiap anak bangsa.

Oleh:
Dr. Lestari Moerdijat, S.S, MM
Wakil Ketua MPR RI

Abad XX memiliki satu periode penting yang kerap terlewatkan, yakni kesadaran akan identitas dan kebangsaan. Tevzadze menyelisik periode tersebut dalam penelitiannya tentang *National identity and national consciousness, History of European Ideas* tahun 1994. Kesadaran kebangsaan bersumber dari karakteristik pembentuk suatu bangsa atau Negara, yakni batas wilayah, suku bangsa, bahasa, adat istiadat, sejarah, dan agama. Kesadaran kebangsaan merupakan rangsangan yang mendorong aktivitas internal dan eksternal suatu bangsa. Kesadaran demikian memungkinkan penyatuan wilayah, asal-usul, tradisi, bahasa dan kesadaran diri *(selfconsciousness).* Dapat dikatakan bahwa perpaduan kesadaran akan identitas memungkinkan tercapainya kesepahaman akan tujuan yang sama *(common objectives)* dalam dinamikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kesadaran diri sebagai bagian dari satu bangsa berdaulat, tujuan yang sama lebur dalam kepentingan parsial dan kelompok. Tanpa kesadaran kebangsaan, suatu negara mungkin hanya menjadi komunitas imajiner yang mudah terdistorsi dalam laju sejarah dengan ragam kebaruan.

Kesadaran berbangsa memungkinkan penguatan visi ketahanan adaptif, harmoni dalam keragaman, edukasi publik, kemampuan dinamis dalam globalisasi, inovasi dan transformasi, pertahanan dan keamanan serta penguatan identitas nasional. Penguatan visi berbangsa berbasis kesadaran memungkinkan setiap anak bangsa memupuk kanal gotong-royong untuk memajukan bangsa dalam arti merealisasikan cita-cita para pendiri bangsa. Dengan demikian mengisi kemerdekaan tidak terbatas pada dorongan percepatan tetapi memastikan implementasi setiap ide menuju pencapaian masyarakat yang sejahtera.

Kesadaran Bernegara

Indonesia merupakan representasi dari 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, belum termasuk sub-suku dengan bahasa dan adat istiadat yang melekat. Negara Indonesia sebagai rumah yang menyatukan semua secara sadar mesti menjadi ruang yang menyenangkan bagi seluruh anak bangsa. Kesadaran bernegara ditandai dengan pemahaman utuh akan pilar atau konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Indonesia boleh berbangga sebagai salah satu negara yang tetap mempertahankan satu dalam perbedaan pada abad modern. Rumah bagi setiap suku bangsa merupakan visi kosmopolitanisme yang mendambakan sebuah tatanan ideal akan keterhubungan semua tanpa memandang kompleksitas atribut diri maupun kelompok.

Oleh karena itu, kesadaran bernegara diperlukan untuk menjamin pemahaman mendalam tentang cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, perlindungan pada warga negara dan upaya menjaga negara dari intervensi asing, serta anti pada perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sesungguhnya ideal sekaligus menyatukan. Tetapi terkadang implementasi nilai terjebak dan terhambat oleh ego sektoral yang memandang kepentingan satu wilayah lebih utama dari yang lainnya. Maka, kesadaran bernegara menjadi instrumen penting yang menyatukan pemikiran dan gagasan tentang pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, pembangunan yang inovatif dan transformatif.

Pada titik tertentu, seluruh anak bangsa dapat berhenti sejenak untuk melihat secara lebih jernih ragam tantangan seperti distorsi sosial, tantangan komunal yang kerap memunculkan perbedaan pendapat dan disparitas akibat tiadanya pemenuhan kebutuhan dasar dalam dinamika pembangunan. Dalam konteks kesadaran bernegara, setiap bentuk pembangunan mesti mengutamakan kemanusiaan, secara spesifik memastikan bahwa infrastruktur memudahkan dinamika ekonomi masyarakat. Pemerataan akses pendidikan, sistem kesehatan yang memadai dan perlidungan hukum yang adil bagi semua. Pada saat yang sama memastikan bahwa nilai-nilai budaya dan bangsa senantiasa menjadi fondasi bagi dinamika sosial kemasyarakatan.

Prolog

Kesadaran berbangsa dan bernegara dibutuhkan untuk memastikan bahwa terus melaju bukan seruan kosong dengan cita-cita untuk Indonesia Maju. Kita patut mengakui bahwa terdapat segumpal kerapuhan dan kerentanan dalam kehidupan berbangsa yang terkadang terabaikan demi pembangunan. Kita patut menyadari bahwa sering alasan teknis, mekanis menjadi pertimbangan utama dibandingkan dengan pertimbangan logis-humanis. Sebagai bangsa yang adil dan beradab, kita tidak lagi mementingkan diri dalam geliat sosial-politik, tetapi lebih dari itu, secara bijak mengutamakan bangsa dan kemanusiaan Indonesia yang kaya, berpotensi memberikan ragam kebaruan dalam dunia yang melaju. Karena bagaimanapun juga, "melaju untuk Indonesia maju" mesti berpijak pada kebebasan hati dan panggilan nurani untuk merealisasikan kemerdekaan Indonesia seutuhnya. ❑

Bahan Bacaan:
R. E. Elson (2008) The Idea of Indonesia, A History,
University of Queensland Natia Tevzadze (1994) National identity and national consciousness, History of European Ideas,
19:1-3, 437-440,
DOI: 10.1016/0191-6599(94)90245-3

Agar Tidak Menjadi Negara Terombang-Ambing

Banyak buku sudah ditulis oleh Bamsoet. Buku terbaru mengupas tentang mempersiapkan jalan Indonesia menuju tahun 2045. Dikatakan, bangsa ini butuh PPHN agar tidak menjadi negara gagal dan terombang-ambing.

POKOK-POKOK Haluan Negara (PPHN) bagi Ketua MPR Bambang Soesatyo merupakan suatu hal yang penting dan mendesak. Bukti dari penting dan mendesaknya haluan negara untuk arah pembangunan bangsa; gagasan, ide, dan harapan dari Politisi Partai Golkar itu dituangkan dalam buku. Ada empat buku dari 31 buku yang telah ditulis yang mengupas tentang haluan negara. Keempat buku itu adalah: *Cegah Negara Tanpa Arah* (2021), *Negara Butuh Haluan* (2021), *PPHN Tanpa Amendemen* (2023), dan *Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, Fokus Dan Orientasi Pokok-Pokok Haluan Negara* (2023).

Dari keempat buku itu, *Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045* merupakan buku terbaru karya pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu. Buku keempat itu juga merupakan buku karyanya yang ke-31. Saat *launching* buku terbaru, 10 September 2023, suasana meriah ada di sana. Hadir dalam acara itu Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, dan Arsul Sani; Menkopolhukam Mahfud MD, anggota MPR Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan Robert Kardinal; Anggota BPK Ahmadi Noor Supit, Rektor IPB Arief Satria, Guru Besar UNPAD Ahmad M. Ramli, Influencer Deddy Corbuzier dan Baim Wong, serta Ketua Koordinatorat Wartawan Parlemen Ariawan.

Buku setebal 224 halaman itu terbagi dalam *lima bagian, kesimpulan,* dan *penutup*. Sesuai dengan judulnya, pria yang aktif di berbagai macam organisasi itu dalam *Prakata,* halaman 5, menyampaikan pesan, Indonesia Emas 2045 akan terwujud jika semua target dan peta jalan (*road map*) yang sudah dirancang dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten. Target dan peta jalan Indonesia Emas 2045 adalah intisari dari haluan negara untuk lebih dari dua dekade ke depan. “Maka kehendak mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu layak dipayungi dengan PPHN”, ujarnya.

Haluan negara bagi pemerintahan Indonesai bukan suatu hal yang baru. Hal demikian sudah ada sejak masa Presiden Soekarno. Untuk menunjukkan haluan negara bukan hal yang asing bagi bangsa ini, dalam Bab I dengan judul *Haluan Negara Tiga Masa, Pemerintahan,* menceritakan sejarah yang ada. Disebutkan haluan negara tiga masa pemerintahan itu adalah: *Pertama*, Pembangunan Nasional Semesta Berencana (1961 - 1969); *Kedua*, Garis-Garis Besar Haluan Negara (1966 - 1998); *Ketiga*, Program Pem-bangunan Nasional (1998 - sekarang).

Haluan negara tersebut, menurut Bamsoet, memiliki dasar hukum. Dasar hukum dari haluan negara itu dikupas dalam Bab 2. Sebagai arah pembangunan, tentu apa yang ingin dicapai orientasinya harus jelas dan fokus. Apa saja fokus dan orientasi dari PPHN? Dalam Bab 4 disebut, seperti pangan, energi terbarukan, digitalisqasi, sumber daya manusia, hilirisasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam *Kesimpulan*, halaman 217, ahli hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin menulis, Ketua MPR mengajak bangsa Indonesia untuk ber-sama-sama mengkreasikan masa depan. Ternyata masa depan itu tidak boleh terombang-ambing dalam ke-tidakpastian. Lebih lanjut dikatakan, pemerintah harus berani meng-kreasikan masa depan.

Sedang dalam *Penutup*, halaman 223, dikatakan oleh Bamsoet, Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan seperti Srilangka dan Ghana. Karena itu, perlu menghadirkan PPHN sebagai produk hukum yang dapat menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara dengan menggunakan kekuasaan subjektif superlatif yang pernah dimiliki oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara. ❑

AWG

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT

INI BARU INDONESIA
DARI MPR RI UNTUK NKRI